

**PERKEMBANGAN EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Triwulan III - 2006

**Kantor Bank Indonesia
Batam**

Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil

Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang negara Indonesia yang berkesinambungan

Visi Kantor Bank Indonesia Batam

Menjadi lembaga yang kredibel melalui kebijakan yang berhasil guna, peningkatan kompetensi dan kemitraan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan

Misi Kantor Bank Indonesia Batam

Merupakan bagian jaringan Bank Indonesia yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan fungsi dan kebijakan BI serta melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah

Kantor Bank Indonesia Batam
Jl. Engku Putri – Batam Center
B A T A M
Telp. 0778 – 462280
Fax. 0778 – 462254

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dengan kuasaNya maka Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Triwulan II-2006 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan kajian rutin triwulanan yang disusun oleh Kantor Bank Indonesia Batam, guna memenuhi kebutuhan intern Bank Indonesia serta kebutuhan ekstern mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan perkembangan indikator perekonomian daerah antara lain di bidang Makro Ekonomi, Moneter, Perbankan dan Keuangan Daerah. Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode triwulan II-2006 ini sebagai kajian berkala yang meliputi data-data dan kajian wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang resmi terbentuk sejak 1 Juli 2004.

Data dan informasi yang terdapat pada laporan ini diperoleh dari beberapa pihak, diantaranya Badan Pusat Statistik, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Otorita Batam, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Kepri, dinas-dinas terkait termasuk dari Bank Indonesia

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap agar hubungan baik ini tetap terjaga dan dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Disamping itu kami juga mengharapkan masukan, saran serta penyediaan data yang lebih lengkap dari semua pihak agar kualitas dari hasil laporan ini lebih baik lagi untuk masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya serta memberikan kemudahan kepada kita semua dalam upaya meningkatkan kinerja untuk pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Batam, November 2006

ttd

Tindomora Siregar
Pemimpin

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
1.1 Kondisi Umum.....	7
1.2 Perkembangan Penduduk	11
1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	13
1.4 Perkembangan Tenaga Kerja	16
1.5 Perkembangan Pariwisata	16
1.6 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)	18
1.7 Perkembangan Pedagang Valuta Asing (PVA)	19
1.8 Pendapatan Perkapita Provinsi Kepulauan Riau	20
1.9 Sektor Ekonomi Dominan	21
1.9.1 Sisi Penawaran / Produksi	22
1.9.1.1 Komponen Industri Pengolahan	23
1.9.1.2 Komponen Pertambangan	24
1.9.1.3 Komponen Perdagangan	24
1.9.1.4 Komponen Keuangan	25
1.9.1.5 Komponen Pertanian	25
1.9.2 Sisi Permintaan / Penggunaan	27
1.10 Perkembangan Ekspor & Impor di Wilayah Kerja Batam	27
BAB II. PERKEMBANGAN INFLASI	
2.1 Kondisi Umum.....	28
2.2 Laju Inflasi / Deflasi Bulanan (m-t-m)	30
2.2.1 Laju Inflasi/Deflasi Bulan Juli 2006	30
2.2.2 Laju Inflasi/Deflasi Bulan Agustus 2006	31
2.2.3 Laju Inflasi/Deflasi Bulan September 2006	32

2.3 Laju Inflasi/Deflasi Triwulanan (q-t-q)	34
2.4 Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	35

BAB III. PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM

PEMBAYARAN

3.1 Kondisi Umum.....	36
3.2 Moneter	36
3.3 Perbankan	38
3.3.1 Perkembangan Total Asset Bank Umum.....	41
3.3.2 Perkembangan Penghimpunan Dana Bank Umum	42
3.3.3 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum	44
3.3.4 Perkembangan BPR	47
3.3.5 Perkembangan Kredit UMKM	50
3.4 Perkembangan Sistem Pembayaran	53
3.4.1 Pengedaran Uang Kartal	53
3.4.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	53
3.5 Lalu Lintas Pembayaran Giral ..	54
3.5.1 Kliring Lokal	54
3.5.2 Transaksi BI-RTGS ..	55
3.5.3 Uang Palsu	55

BAB IV. KEUANGAN DAERAH PERIODE TAHUN 2006

4.1 Kondisi Umum ..	56
4.2 APBD Kota Batam ..	58
4.3 Penerimaan Kantor Pendapatan Daerah Kota Batam	58
4.4 Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Kota Batam	59

BAB V. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

5.1 Prospek Ekonomi Makro	60
5.2 Prospek Inflasi	61
5.3 Prospek Perbankan	61

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota se-Provinsi Kepri Juni 2006 ..	11
Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Pddk Menurut Kab/Kota di Prov. Kepri th..2005-2006. .	12
Tabel 1.3 IPM Kab/Kota di Provinsi Kepri thn 2004.....	13
Tabel 1.4 Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2006.....	14
Tabel 1.5 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di Kota Batam	16
Tabel 1.6 Perkembangan Jml Wisatawan Mancanegara ke Kota Batam.....	17
Tabel 1.7 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara Menurut Kebangsaan	18
Tabel 1.8 Perkembangan Rencana Investasi Asing di Kota Batam.....	20
Tabel 1.9 Rekapitulasi Volume Usaha Pedagang Valuta Asing di Wilker KBI Batam .	21
Tabel 1.10 Pendapatan Perkapita Provinsi Kepri Tw.III-2006	22
Tabel 2.1 Perkembangan Laju Inflasi di Kota Batam thn 2006	34
Tabel 3.1 Perkembangan Uang Giral dan Kuasi di Wilker KBI Batam	37
Tabel 3.2 Perkembangan Suku Bunga.....	37
Tabel 3.3 Perkembangan Indikator Perbankan di Wilker KBI Batam.....	39
Tabel 3.4 Perkembangan Total Asset Perbankan di Wilker KBI Batam	42
Tabel 3.5 Penghimpunan Dana Bank Umum di wilker KBI Batam.....	43
Tabel 3.6 Perkembangan Outstanding Kredit Bank Umum di wilker KBI Batam.....	44
Tabel 3.7 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum	45
Tabel 3.8 Perkembangan Kolektibilitas Kredit Bank Umum di Wilker KBI	46
Tabel 3.9 Perkembangan Kinerja BPR di Wilker KBI Batam	47
Tabel 3.10 Perkembangan Kolektibilitas Kredit BPR di Wilker KBI Batam	49
Tabel 3.11 Perkembangan Kredit BPR Mnrt Jenis Penggunaan	49
Tabel 3.12 Perkembangan Sektor Ekonomi yang Memproleh Pembiayaan BPR	50
Tabel 3.13 Perkembangan Kliring Lokal di Wilker KBI Batam	54
Tabel 3.14 Perkembangan RTGS di Wilker KBI Batam	55
Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Prov. Kepri	57
Tabel 4.2 Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Provinsi Kepri	57
Tabel 4.3 Perkembangan Realisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB di Kota Btm	59
Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Pajak Neto Melalui KPP Batam	59

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Perkembangan PDRB (Rp Juta) dan LPE triwulanan 7
Grafik 1.2	Perkemb. Tingkat Pertumb.& Distrib. Sektor Industri Thdp. PDRB 9
Grafik 1.3	Perkemb. Laju Pertumb. Sektor Industri Provinsi Kepri 23
Grafik 2.1	Perkemb. Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan 30
Grafik 2.2	Perkemb. Inflasi Bulanan Kel. Makanan Jadi, Minuman, Rokok..... 30
Grafik 2.3	Perkemb. Inflasi Bulanan Kelompok Sandang 31
Grafik 2.4	Perkemb. Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan 31
Grafik 2.5	Perkemb. Inflasi Bulanan Kelompok Sandang 32
Grafik 2.6	Perkemb. Inflasi Bulanan Kel. Pendidikan, Rekreasi & Olahraga 32
Grafik 2.7	Perkemb. Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan 33
Grafik 2.8	Perkemb. Inflasi Bulanan Kelompok Sandang 33
Grafik 2.9	Perkemb. Inflasi Bulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga.. 33
Grafik 2.10	Perkembangan Harga Komoditi di Kota Batam 34
Grafik 3.1a	Grafik Perkembangan Tingkat Suku Bunga 38
Grafik 3.1b	Grafik Perkembangan DPK dan Kredit 38
Grafik 3.2	Perkemb. Total DPK Bank Umum di Wilker KBI Btm tw.III-2006 44
Grafik 3.3	Perkemb. Outstanding Kredit Bank Umum di Wilker KBI Batam 45
Grafik 3.4	Perkembangan NPL dan Kredit Bank Umum 47
Grafik 3.5	Perkemb. Asset & DPK BPR di Wilker KBI Batam 48
Grafik 3.7	Perkemb. Inflow/Outflow di KBI Batam 53
Grafik 3.8	Perkemb. PTTB 54

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1 PDRB Provinsi Kepri atas dasar harga berlaku.....	64
Tabel 2 PDRB Provinsi Kepri atas dasar harga konstan 2000	65
Tabel 3 Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Kepri	66
Tabel 4 Perkembangan Inflasi Kota Batam, Pekanbaru dan Nasional	67
Tabel 5 Data bank umum wilayah kerja Bank Indonesia Batam	68
Tabel 6 Data bank umum wilayah Kepulauan Riau	69
Tabel 7 Data Bank Umum Wilayah Kota Batam	70
Tabel 8 Data Pengaliran Kas Masuk/Keluar dan Kegiatan PTTB KBI Batam	71
Tabel 9 Perputaran Kliring Batam, Tj. Pinang & Tj. Balai Karimun	72

RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TRIWULAN III – 2006

Kondisi Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan III-2006 cukup stabil

Sampai dengan triwulan III-2006, kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan yang cukup stabil yang tercermin antara lain pada tingkat PDRB, laju inflasi yang meningkat namun cukup stabil, perkembangan angka indikator perbankan, serta perkembangan investasi.

Secara triwulanan (qtq), PDRB Provinsi Kepri pada triwulan II-2006 meningkat sebesar 1,98% terhadap triwulan I-2006

Jumlah PDRB Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan peningkatan. Secara triwulanan, tingkat PDRB Provinsi Kepri atas dasar harga konstan tahun 2000 pada triwulan III-2006 sebesar Rp.8,2 triliun dan meningkat sebesar 1,68% (qtq) terhadap triwulan II-2006 yang mencapai Rp.8,07 triliun. Sementara itu, berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB Provinsi Kepri pada triwulan III-2006 sebesar Rp.11,53 triliun dan meningkat sebesar 2,82% (qtq) terhadap triwulan II-2006 yang mencapai Rp.11,53 triliun. Secara tahunan, tingkat PDRB Provinsi Kepri atas dasar harga konstan tahun 2000 pada triwulan III-2006 meningkat sebesar 6,96% (yoy) dimana pada triwulan II-2005 nilai PDRB Provinsi Kepri sebesar Rp.7,67 triliun, dan atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 12,53% (yoy) dimana pada triwulan III-2005 nilai PDRB Provinsi Kepri sebesar Rp.10,25 triliun. Berdasarkan perkembangan data PDRB Provinsi Kepri selama beberapa tahun terakhir, maka diperkirakan kondisi perekonomian daerah yang tercermin pada PDRB Provinsi Kepri triwulan IV-2006 akan mengalami peningkatan.

Sektor Industri memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB, diikuti sektor pertambangan, sektor perdagangan, dan sektor keuangan

Sektor industri masih memberikan sumbangan pertumbuhan terbesar pada pembentukan PDRB pada triwulan laporan, yang diikuti oleh sektor pertambangan, sektor perdagangan, dan sektor keuangan. Sebagaimana diketahui, selama 3 (tiga) tahun terakhir ini secara nasional sektor industri mengalami guncangan yang cukup berat akibat dari demonstrasi yang dilakukan oleh buruh terkait dengan tuntutan kenaikan tingkat upah buruh serta revisi UU ketenagakerjaan. Hal ini cukup berpengaruh terhadap sektor industri di Kota Batam. Sampai dengan triwulan III-2006, tercatat 52 PMA baru yang menanamkan modalnya di Batam dengan total investasi sebesar US\$.64,72 juta dan 21 proyek perluasan usaha senilai US\$.193,13 juta.

Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Batam mengalami peningkatan.

Sementara itu *pasca* penerapan sistem *Special Economic Zone* (SEZ) di daerah Batam-Bintan-Karimun, investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mulai menunjukkan perkembangan, dimana hingga 2 (dua) bulan sejak perjanjian pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus atau SEZ ditandatangani Pemerintah RI dan Singapura pada 25 Juni 2006, 7 (tujuh) perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) akan menanamkan modalnya di wilayah Kepulauan Riau senilai USD.543.200.000 dengan daya serap tenaga kerja mencapai 8.000 orang. Bertempat di Gedung Departemen Keuangan – Lapangan Banteng, Jakarta, nota kesepakatan antara Pemprov Kepri, Otorita Batam, Kota Batam, Pemkab Karimun, dan Pemkab Bintan dengan perwakilan dari 5 (lima) investor asing dari India, Korea Selatan dan Singapura ditandatangani dan disaksikan langsung oleh Menko Perekonomian Boediono dan sejumlah pejabat lainnya. Adapun 5 perusahaan akan beroperasi di Kota Batam, 1 perusahaan di Bintan, dan 1 perusahaan di Kabupaten Karimun.

DAFTAR PERUSAHAAN YANG MENANDATANGANI MoU

No	Nama Perusahaan	Jml Pekerja	Bidang Usaha	Nilai Investasi (USD)
1	Schmidtmann	45	Logam	2.600.000
2	PT. Batamfast Indonesia	105	Angkutan Penyeberangan	2.000.000
3	PT. Cemara Intan Shipyard	205	Pembuatan Kapal	1.600.000
4	PT. Neptune Marine	202	Pembuatan Kapal	2.000.000
5	Indo Multi Sarana	1.500	Pengembangan	15.000.000
6	Tiong Woon Co.Ltd	1.000	Shipping, Kepelabuhan	20.000.000
7	Daeju Construction Engineering Co.Ltd	5.000	Galangan Kapal, Perumahan	500.000.000
JUMLAH		8.057		543.200.000

Pemerintah Pusat mengembangkan wacana penerapan sistem SEZ di Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Bintan

Adapun pemberlakuan SEZ di wilayah BBK (Batam, Bintan dan Karimun) yang bertujuan untuk meningkatkan investasi pada suatu daerah memberikan beberapa keunggulan, diantaranya adalah meningkatkan ekspor serta memperluas lapangan kerja. Disamping itu, pemberlakuan SEZ yang menawarkan kemudahan dalam perdagangan dan produksi untuk ekspor, maka diharapkan akan dapat menarik investasi, perdagangan valuta asing, serta meningkatkan teknologi dan infrastruktur. Dari beberapa keuntungan pemberlakuan SEZ pada suatu daerah, terdapat beberapa *issue* maupun kritik, antara lain adalah SEZ hanya akan menarik investasi dan akan menimbulkan distorsi dibidang insentif dibandingkan dengan membentuk kondisi yang saling menguntungkan, insentif yang diberikan menciptakan beban bagi pembayar pajak dan merusak lingkungan serta merusak standar buruh. Selain itu dipercayai juga

Tujuan dari pemberlakuan SEZ adalah untuk meningkatkan investasi pada suatu daerah yang diharapkan akan meningkatkan ekspor serta memperluas lapangan kerja

bahwa biaya-biaya untuk memelihara zona khusus tersebut tidak menguntungkan perekonomian dan kesejahteraan.

Pada triwulan III-2006, Kota Batam mengalami inflasi sebesar 1,28%

Sementara itu, pada triwulan III-2006 (data yang tersedia bulan Juli & Agustus 2006), Kota Batam mengalami inflasi sebesar 1,28% dimana pada bulan Juli terjadi inflasi sebesar 1,21% dan bulan Agustus terjadi inflasi sebesar 0,07%. Bila dibandingkan dengan laju inflasi Kota Batam pada triwulan II-2006 yang tercatat sebesar (0,66%) maka terdapat kecenderungan peningkatan harga komoditi selama triwulan berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat percepatan pergerakan harga-harga komoditi di Kota Batam. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap valuta asing (SGD) selama triwulan III-2006 stabil dan cenderung menguat. Posisi Kota Batam yang cukup strategis karena berada dekat dengan negara tetangga diperkirakan turut mempengaruhi pergerakan harga komoditi di Kota Batam. Sementara itu, laju inflasi pada akhir tahun 2006 (triwulan IV-2006) diperkirakan akan sedikit meningkat. Hal ini dipengaruhi perayaan hari raya keagamaan yaitu hari raya idul fitri dan natal, serta perayaan tahun baru 2007.

Indikator perbankan menunjukkan perkembangan yang cukup baik

Dari sisi perbankan, indikator pertumbuhan sektor perbankan pada triwulan III-2006 (sampai dengan bulan Agustus 2006) menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Total asset bank umum sebesar Rp.12.913.771 juta meningkat 6,08% dari triwulan II-2006. Rp.12.173.496 juta meningkat 15,28% dari triwulan I-2006. Demikian juga pada total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat sebesar 7,23%. Namun tidak demikian pada penyaluran kredit, dimana sampai dengan Agustus 2006, terdapat sedikit penurunan sebesar -0,60% dengan tingkat LDR mencapai 56,83% dan NPL nett sebesar 4,68%. Jumlah bank umum yang terdapat di Provinsi Kepri sampai dengan bulan Agustus 2006 sebanyak 24 bank umum yang terdiri dari 38 kantor cabang yang tersebar di wilker KBI Batam, 61 KCP, 17 unit, 31 kantor kas, 3 payment point, 312 ATM serta 10 BPR,. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan memandang potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kepri merupakan kesempatan untuk membuka kegiatan usahanya di daerah ini. Disamping itu perekonomian yang didominasi oleh sektor industri menyebabkan tingkat perputaran kegiatan ekonomi yang cukup tinggi dan membutuhkan peranan perbankan sebagai lembaga intermediasi.

Sementara itu, untuk memberikan dukungan terhadap upaya menjaga kestabilan moneter dan transaksi sektor perbankan dalam rangka memenuhi perkembangan

aktivitas perekonomian nasional, Bank Indonesia berupaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal, dan menjelang triwulan III-2006 telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Penggunaan uang kartal sebagai alat transaksi di wilayah kerja KBI Batam selama tahun 2006 masih cukup tinggi, tercermin dari kegiatan inflow dan outflow yang cukup tinggi. Jumlah aliran dana masuk (inflow) ke KBI Batam pada tw.I-2006 sebesar Rp.804,04 miliar dan pada tw.III-2006 (s/d bulan Agustus 2006) sebesar Rp.183,23 miliar. Sementara itu aliran dana keluar (outflow) dari KBI Batam pada tw.I-2006 sebesar Rp.933,75 miliar dan pada tw.III-2006 sebesar Rp.389,43 miliar. Pergerakan ini juga sejalan dengan jumlah PTTB yang mencapai Rp.66,75 miliar pada tw.III-2006.

Provinsi Kepri memiliki potensi yang cukup besar, diantaranya potensi kelautan

Pulau Batam yang termasuk di Provinsi Kepri merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi yang cukup besar. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Kadin Kota Batam – Nada Faza Soraya yang menyebutkan bahwa minimal terdapat 7 (tujuh) sumber utama potensi ekonomi yang potensial dikembangkan di Kota Batam, diantaranya adalah transportasi laut (berupa angkutan dalam negeri, angkutan umum ataupun angkutan luar negeri), sektor perikanan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, industri kapal, bangunan laut dan pantai, serta benda-benda berharga muatan kapal tenggelam, serta sektor pariwisata bahari.

Kota Tanjung Pinang yang merupakan ibukota Provinsi Kepri saat ini sedang menyempurnakan kelengkapan infrastruktur serta sarana umum

Disamping Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki Kota Tanjung Pinang yang juga merupakan ibukota Provinsi. Daerah tersebut saat ini sedang menyempurnakan kelengkapan infrastruktur serta sarana umum agar kegiatan pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan baik. Oleh karena itu pada tahun 2006, Pemerintah Daerah Provinsi Kepri mengalokasikan anggaran daerahnya pada sektor infrastruktur terutama pada daerah-daerah yang masih terisolir.

Pemprov melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, diantaranya pembangunan infrastruktur, perhubungan udara

Anggaran daerah yang dialokasikan tersebut hampir mencapai Rp.500 miliar. Adapun pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah sektor perhubungan laut, dimana Pemprov akan bekerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan frekuensi pelayaran antar pulau. Dengan demikian diharapkan arus perdagangan dan perekonomian antar pulau bisa meningkat. Disamping itu Pemprov juga mendukung usaha-usaha swasta yang bergerak di bidang perhubungan udara. Untuk itu Pemprov akan melakukan pembangunan dan perluasan bandara-bandara yang ada di Provinsi Kepri seperti Bandara Hang Nadim Batam, Bandara Kijang Tanjung Pinang, Bandara Dabo di Lingga dan Bandara Ranai di Natuna. Dengan terciptanya kelancaran

perhubungan laut dan udara diharapkan dapat mempersempit kesenjangan jarak antar daerah.

Posisi Provinsi Kepri yang berdekatan dengan negara tetangga, antara lain Malaysia dan Singapura turut mempengaruhi penggunaan mata uang asing dalam transaksi ekonomi. Cukup tingginya permintaan penggunaan valuta asing seperti Malaysian Ringgit, Singapore Dollar, dan USD turut mempengaruhi jumlah Pedagang Valuta Asing (PVA – *Money Changer*) yang beroperasi di wilker KBI Batam, yaitu sebanyak 91 PVA yang tersebar di Kota Batam sebanyak 65 PVA (71,43%), Kota Tanjung Pinang sebanyak 12 PVA (13,33%), Kabupaten Tanjung Balai Karimun sebanyak 9 PVA (9,89%), Tanjung Uban sebanyak 3 PVA (3,3%), serta Tanjung Batu sebanyak 2 PVA (2,2%). Apabila dibandingkan dengan jumlah PVA yang terdapat di wilker Kantor Bank Indonesia (KBI) yang lainnya, maka wilker KBI Batam menempati posisi ke-3 terbesar setelah DKI Jakarta dan Denpasar. Pedagang Valuta Asing sebagai lembaga penunjang sektor keuangan memiliki peranan yang cukup strategis, khususnya dalam perkembangan pasar valuta asing domestik maka Bank Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan terhadap pedagang valuta asing yang meliputi kegiatan pemberian izin usaha, pengawasan dan pembinaan yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 6/1/PBI/2004 tentang Pedagang Valuta Asing tanggal 6 Januari 2004.

Batam, September 2006

RINGKASAN EKSEKUTIF
INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER TRIWULANAN
WILAYAH KERJA KANTOR BANK INDONESIA BATAM

INDIKATOR	2003		2004				2005				2006		
	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Trw I	Trw II	Trw III
MAKRO													
Laju Inflasi (q-t-q)	0.75	2.35	0.47	1.10	0.70	1.89	2.65	0.39	1.52	9.6	0.66	-0.39	2.28
IHK Bahan Makanan	-1.03	7.35	-0.16	-0.34	0.83	3.18	3.78	0.05	2.21	10.3	1.76	-2.16	4.70
IHK Makanan Jadi	1.09	0.79	0.14	0.45	0.89	4.99	1.52	1.12	0.69	5.98	0.93	0.25	2.88
IHK Perumahan	0.46	1.05	0.27	1.07	0.52	0.32	0.70	0.24	1.46	4.38	0.14	0.24	0.13
IHK Sandang	1.45	3.36	-0.01	0.43	0.54	1.25	1.00	1.09	2.65	1.76	0.22	0.35	-0.22
IHK Kesehatan	1.82	-0.49	-0.01	1.84	-0.12	0.07	0.67	1.17	1.3	1.46	0.56	0.44	0.08
IHK Pendidikan	7.91	0.15	0.05	0.65	1.11	0.34	0.07	0.14	6.98	0.63	-0.24	0.36	14.74
IHK Transport	0.00	0.00	0.19	4.44	0.69	0.04	7.20	0.03	0.03	23.06	0.10	0.11	0.27
Pertumbuhan PDRB (q-t-q)	2.06	1.99	1.86	1.11	0.73	0.36	*	2.22	2.41	1.71	1.42	1.98	1.86
Ekspor (Ribuan USD)	1,229,359	1,248,603	1,077,826	925,490	1,259,378	762,606	940,773	1,618,970	1,282,820	1,307,957	1,331,007	2,262,712	1,510,189
Impor (Ribuan USD)	16,862	34,098	99,729	125,456	10,980	212,948	91,954	260,646	332,178	354,964	228,037	230,317	236,579
PERBANKAN													
Deposito (miliar Rp)	1,438.21	1,439.15	1,328.99	1,270.24	1,408.87	1,446.24	1,616.15	1,805.53	2,070.99	2,169.29	2,302.86	2,725.13	2,934.75
Giro (miliar Rp)	2,328.63	2,404.28	2,397.72	2,745.92	2,860.73	2,839.40	3,106.07	3,183.28	3,262.74	3,524.56	3,429.73	4,435.88	4,988.06
Tabungan (miliar Rp)	2,190.14	2,542.28	2,536.22	2,742.02	2,900.97	3,016.97	3,084.28	3,132.15	3,040.04	3,013.30	2,819.91	3,089.24	3,211.56
DPK (miliar Rp)	5,956.98	6,395.71	6,262.93	6,758.18	7,170.59	7,302.61	7,806.50	8,120.96	8,373.78	8,707.15	8,552.50	10,250.25	11,134.37
Total Asset (miliar Rp)	6,667.26	7,310.10	7,152.30	7,787.04	8,263.39	8,440.49	9,316.23	9,715.10	10,213.91	10,666.45	10,559.53	12,513.64	13,115.16
Kredit Umum (miliar Rp)	2,714.74	2,302.09	2,413.38	3,564.40	3,962.75	4,141.66	4,761.13	5,104.37	5,685.47	5,877.40	5,771.56	6,283.82	6,258.18
KUK (miliar Rp)	781.42	744.99	765.80	776.10	780.06	778.51	794.30	787.40	757.98	1394.67	733.61	745.69	660.37
Suku Bunga Kredit (rata2 tertimbang)	16.78%	15.45%	15.13%	15.39%	15.60%	15.26%	16.69%	21.61%	13.84%	16.31%	15.58%	16.67%	17.34%
Suku Bunga Dep 3 bln (rata2 tertmbng)	9.10%	8.13%	7.23%	6.46%	6.37%	6.26%	6.50%	6.78%	6.94%	9.89%	10.20%	10.09%	9.82%
LDR (%)	45.57%	47.72%	50.76%	52.74%	55.26%	56.71%	60.99%	62.85%	67.90%	67.50%	67.48%	59.69%	56.21%
NIM (%)	1.00%	2.45%	1.42%	2.83%	3.99%	4.84%	1.47%	2.76%	3.77%	4.83%	1.21%	2.31%	3.32%
NPL (%)	3.42%	2.37%	3.68%	4.10%	3.94%	3.34%	2.72%	4.12%	5.15%	6.01%	6.17%	5.87%	6.41%
SISTEM PEMBAYARAN													
Inflow (miliar Rp)	361.07	434.73	482.27	411.59	484.41	538.76	640.23	544.74	499.38	789.7	804.04	416.46	235.33
Outflow (miliar Rp)	639.65	1,033.53	581.28	891.15	838.26	1,339.74	926.99	999.53	1,013.85	1,234.96	933.75	854.39	686.06
PTTB (miliar Rp)	177.3	177.04	260.29	312.12	413.45	308.78	409.23	252.3	133.24	103.82	204.92	131.42	91.3
Nominal Uang Palsu	1,680,000	560,000	775,000	1,170,000	830,000	2,390,000	3,400,000	1,810,000	985,000	1,305,000	2,060,000	1,220,000	490,000
Jumlah uang palsu (lembar)	34	11	13	15	12	43	62	32	14	18	25	28	11
Volume Kliring (lembar)	138,377	135,819	136,461	140,276	145,620	145,176	144,005	154,879	157,535	150,400	146,241	154,662	134,863
Nominal Kliring (miliar Rp)	1,843,390	1,908,215	1,888,256	1,914,133	2,062,812	2,151,372	2,054,496	2,208,473	2,371,965	2,258,818	2,168.74	2,734.43	2,584.61
KEUANGAN DAERAH													
Pendapatan Asli Daerah (miliar Rp)	14.01	8.29	11.43	12.62	13.85	17.82	14.46	29.03	0	0	18.81	42.67	67.90
Dana Alokasi Umum (miliar Rp)	21.74	56.59	26.05	26.05	26.05	17.37	20.97	12.76	0	0	2,028.55	58,994.97	124,236.99
Dana Alokasi Khusus (miliar Rp)	0.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,300.75	37,300.75	722,713.15

Data Ekspor & Impor, sumber PDIE Jakarta

Ket: *) Data diperbaiki

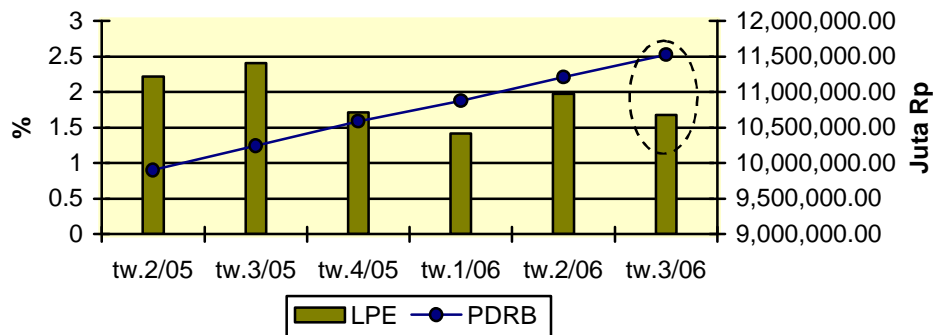
Bab 1

Perkembangan Ekonomi Makro Provinsi Kepulauan Riau

1.1 KONDISI UMUM

Perkembangan ekonomi makro Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan triwulan III-2006 mengalami perkembangan yang cukup stabil. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga konstan tahun 2000¹ pada tahun 2004 sebesar 6,47%, tahun 2005 sebesar 6,52%. Sementara itu pada triwulan I–2006 sebesar 1,42%, triwulan II–2006 sebesar 1,98%, dan pada triwulan III-2006 sebesar 1,68%. Sementara itu, perkembangan persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) baru yang disetujui oleh Otorita Batam sampai dengan triwulan III-2006 sebanyak 52 proyek baru dengan nilai investasi sebesar US\$.64,72 juta dan 21 proyek perluasan usaha senilai US\$.193,13 juta. Dari sisi pariwisata, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia melalui Batam mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 7,07% dibandingkan tw.II-2006.

Grafik 1.1
Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku(Rp Juta) dan LPE Triwulanan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) – Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan grafik 1.1 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada tw.III-2006 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, demikian pula terhadap tw.II-2005. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh penurunan distribusi sektor industri serta sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Kepri.

¹ Tahun dasar disesuaikan, dimana pada tahun 2005 menggunakan tahun dasar 1993

Untuk nasional, pertumbuhan ekonomi nasional pada tw.III-2006 diperkirakan sebesar 5,4% (y-o-y), meningkat dibandingkan tw.I dan II yang masing-masing tumbuh sebesar 4,7% dan 5,2% (y-o-y). Di sisi permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi cenderung membaik terutama dipengaruhi oleh pengeluaran Pemerintah dan ekspor. Perkembangan positif pendorong lainnya pertumbuhan berupa peningkatan konsumsi swasta sebagai indikasi mulai membaiknya daya beli masyarakat. Di sisi penawaran agregat, perbaikan pertumbuhan terutama terdapat pada sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor bangunan, khususnya properti komersial. Faktor utama yang mendukung pertumbuhan sektor properti komersial adalah semakin meningkatnya mobilitas penduduk dan meningkatnya daya beli.

Sampai dengan tw.III-2006 Pemerintah terus berupaya untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah diambil dalam rangka mendorong kegiatan perekonomian. Beberapa kebijakan yang telah diambil Pemerintah diantaranya adalah di bidang industri & perdagangan terkait dengan harmonisasi tarif untuk mengurangi distorsi tata niaga. Di bidang infrastruktur kebijakan yang dikeluarkan lebih menyentuh aspek legal. Di bidang pertanian mencakup penyesuaian harga pokok penjualan (HPP) beras dan pengalihan subsidi pupuk. Di bidang iklim investasi, kebijakan yang telah direalisasikan masih di bawah 10 bidang, antara lain bidang umum, bidang perpajakan, bidang kepabeanan dan bidang ketenagakerjaan. Adapun perkembangan kebijakan Pemerintah sampai dengan tw.III-2006 antara lain adalah penyelesaian 26 tindakan perbaikan iklim investasi dari yang direncanakan 85, kebijakan infrastruktur terselesaikan sebanyak 41 tindakan dari yang direncanakan 161. Sementara itu kebijakan lain yang bersifat penyesuaian, terutama untuk meningkatkan dan mendukung sektor produksi relatif terbatas. Kebijakan tersebut yang cukup penting antara lain adalah pemberian restitusi pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) patuh paling lama 1 bulan dan pembebasan PPn produk primer.²

Dari sisi regional, perekonomian Provinsi Kepri hingga tw.III-2006 tumbuh cukup stabil meskipun masih mengalami tekanan yang disebabkan masih relatif tingginya harga barang dan jasa sebagai dampak kenaikan harga BBM di akhir tahun. Kenaikan harga tersebut mendorong kenaikan biaya produksi sehingga memperlambat kinerja sektor industri. Padahal, Batam yang berada dekat dengan Singapura dan Johor merupakan wilayah segi tiga pertumbuhan ekonomi yang strategis karena ketiga wilayah tersebut dekat dengan Selat Malaka dan Selat Singapura yang menjadi jalur perdagangan internasional. Disamping itu, belum ditetapkannya payung hukum SEZ yang jelas turut mempengaruhi perkembangan sektor industri di wilayah Provinsi Kepri. Hal ini patut menjadi perhatian mengingat negara-negara di Asia saat ini melakukan berbagai upaya menarik investor untuk berinvestasi. Salah satunya adalah negara Malaysia yang

² Berdasarkan uraian pada Laporan Kebijakan Moneter – Triwulan III 2006

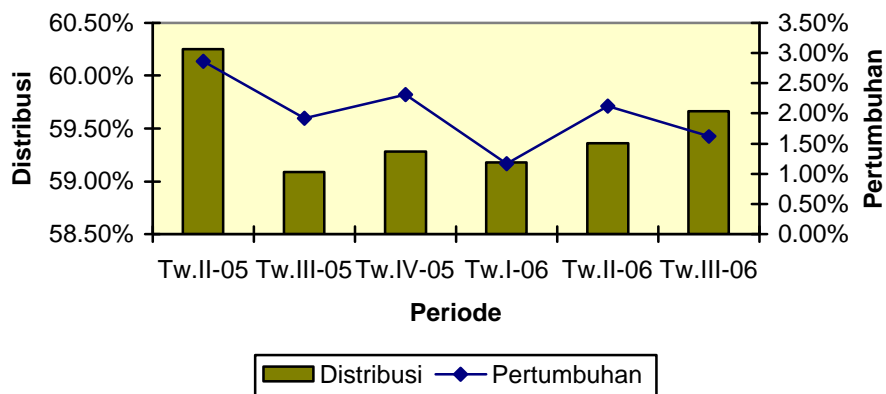
saat ini telah menetapkan konsep SEZ dengan memberikan berbagai kemudahan, seperti akses serta fiskal gratis.³

Di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada tw.III-2006 terutama didorong oleh sektor pertanian. Pada sektor ini, sub-sektor perikanan memberikan sumbangan terbesar terhadap sektor pertanian. Wilayah Kepulauan Riau yang sebagian besar merupakan perairan, menjadikan sektor perikanan sebagai penyumbang terbesar pada perekonomian daerah. Salah satu jenis komoditi yang menjadi komoditas unggulan adalah ikan kerapu, yang saat ini dicanangkan Pemerintah sebagai komoditas perikanan unggulan disamping udang, ikan nila dan rumput laut. Pengembangan perikanan kerapu diarahkan pada pembudidayaannya terutama untuk memenuhi pasar ekspor di samping pasar domestik.

Sejak dikuasainya teknologi produksi benih (*hatchery*) kerapu, perkembangan budidaya kerapu di perairan laut berkembang di berbagai daerah. Benih hasil *hatchery* yang diproduksi di berbagai lokasi telah banyak digunakan menggantikan benih alam yang sudah semakin sulit diperoleh.

Berdasarkan permintaan, sektor industri memberikan sumbangan terbesar terhadap tingkat PDRB Provinsi Kepri (59,66%), diikuti oleh sektor pertambangan (10,69%), dan sektor perdagangan (7,96%). Sedangkan berdasarkan penawaran, sektor pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memiliki pertumbuhan terbesar (2,08%) secara triwulanan (q-t-q).

Grafik 1.2
Perkembangan Tingkat Pertumbuhan & Distribusi Sektor Industri Terhadap PDRB



Sektor industri memberikan distribusi sebesar 59,66% terhadap tingkat PDRB Provinsi Kepri pada tw.III-2006. Letak wilayah Batam yang strategis menjadikan wilayah ini unggul secara komparatif dibandingkan wilayah lainnya khususnya di Sumatera karena berada dekat dengan negara Singapura dan Malaysia sehingga sektor industri dan perdagangan menjadi

³ Dikutip dari Harian Batam Pos tgl 9 November 2006 dengan judul “SEZ Plus Malaysia Ancaman Kepri”

sektor utama daerah ini. Sejak ditetapkan sebagai pusat industri dan perdagangan oleh Presiden Soeharto serta dengan diresmikannya berbagai fasilitas dasar pada tahun 1983 menjadikan Batam sebagai suatu tempat yang berkembang pesat hingga saat ini. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan untuk mendukung perkembangan wilayah tersebut agar dapat menjadi pusat kegiatan industri dan perdagangan yang diperhitungkan oleh investor, dengan ditetapkannya Batam sebagai pusat promosi produk unggulan dari berbagai daerah di wilayah Sumatera. Berdasarkan grafik 1.2 terlihat bahwa tingkat distribusi sektor industri terhadap PDRB cukup stabil dengan laju pertumbuhan yang sedikit menurun.

Sedangkan sektor bangunan turut memberikan distribusi terhadap tingkat PDRB Provinsi Kepri meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor properti menjadi satu hal yang menarik untuk diperhatikan dan dikembangkan mengingat pertumbuhan sektor ini cukup besar. Maraknya pembangunan sektor properti dapat dilihat dari alokasi lahan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam), dimana dari luas Pulau Batam sebesar 41.500 hektar, sampai akhir tahun 2005 pihak Otorita Batam telah mengalokasikan lahan untuk sektor perumahan sebesar 9.646 hektar atau 39,85%. Berdasarkan hasil survey Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) di Kota Batam yang merupakan kerjasama antara BI Batam dengan Politeknik Batam, diketahui bahwa pada tw.III-2006 tingkat IHPR sebesar 100,39 atau meningkat 0,39% terhadap triwulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi pada tipe rumah sedang (8,47%) dan rumah kecil (4,65%).

BOKS – I

Survey Indeks Harga Properti Residensial di Kota Batam Tw.III – 2006

Ruang lingkup Survey Indeks Harga Properti Residensial (SIHPR) meliputi harga jual rumah, harga jual tanah, jumlah rumah yang dibangun dan jumlah rumah yang dijual oleh perusahaan pengembang perumahan (*primary market*) yang melakukan transaksi penjualan. Informasi yang diperoleh dari hasil survey digunakan untuk melihat perkembangan harga dan kuantitas properti residensial, baik yang terjadi pada triwulan berjalan maupun perkiraan harganya untuk triwulan mendatang. Pengolahan data hasil survei dilakukan dengan membandingkan harga dan kuantitas properti triwulan berjalan dengan periode sebelumnya yang disajikan dalam bentuk indeks harga properti residensial. Perkembangan indeks harga properti residensial ini juga digunakan sebagai salah satu komponen penghitung dalam penelitian inflasi harga aset.

Lokasi responden untuk SHPR berdasarkan pada Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Otorita Batam yang meliputi : Batam Centre, Batu Ampar, Sekupang, Muka Kuning, Tanjung Uncang, Nongsa, Kabil dan Duriangkang dimana jumlah sampel sebanyak 63 proyek. Sementara itu, harga rata-rata properti residensial berdasarkan klasifikasi rumah pada tw.III-2006 adalah:

NO	Klasifikasi Rumah	Harga Rata-Rata Sampel	
		Tw.II-2006	Tw.III-2006
1.	Kecil	Rp. 66.624.303,90	Rp. 63.524.004,05
2.	Sedang	Rp. 202.249.897,50	Rp. 219.385.380,08
3.	Besar	Rp. 535.351.621,88	Rp. 561.006.761,56
Total		Rp. 235.894.997,99	Rp. 236.812.276,19

Sumber : Laporan SHPR – Data Diolah, 2006

Berdasarkan hasil survei, terlihat bahwa tipe rumah yang dijual oleh pengembang masih didominasi oleh kelas

sedang (43,21%), kelas kecil (34,57%), dan kelas besar (22,22%)⁴, sedangkan untuk rata-rata harga rumah berdasarkan klasifikasinya terlihat bahwa terdapat peningkatan harga rata-rata terhadap tw.II-2006 pada rumah besar (naik dari Rp.535.351.621,88 menjadi Rp.561.006.761,56), rumah sedang (naik dari Rp.202.249.897,50 menjadi Rp.219.385.380,08), namun pada rumah kecil terdapat penurunan yaitu dari Rp.66.624.303,90 menjadi Rp.63.524.004,05. Hasil survei IHPR tw.III-2006 diketahui bahwa indeks triwulan laporan sebesar 0,39 yang relatif lebih rendah dibandingkan tw.II-2006 yaitu 1,72.

Terkait dengan perkembangan sektor properti di Kota Batam, Bank Indonesia melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait antara lain REI, Developer serta perbankan, terutama mengingat kecenderungan developer di Kota Batam umumnya belum memanfaatkan peran perbankan dalam pembiayaan usahanya.

1.2 Perkembangan Penduduk⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau, sampai dengan bulan September 2006 jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.337.863 jiwa, dimana sebagian besar penduduk terdapat di Kota Batam (49,03%), Kabupaten Karimun (15,69%), dan Kota Tanjung Pinang (12,90%).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
Periode September 2006

Kabupaten/Kota (1)	Jumlah Penduduk (2)	Persentase (3)
1. Batam	656.001	49,03%
2. Karimun	209.875	15,69%
3. Tanjung Pinang	172.616	12,90%
4. Bintan	121.303	9,07%
5. Natuna	91.918	6,87%
6. Lingga	86.150	6,44%
Total	1.337.863	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Kota Batam yang menempati urutan teratas berdasarkan jumlah penduduk dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian yang berkembang di daerah tersebut, dimana sektor industri dan perdagangan memegang peranan yang cukup besar dalam perekonomian. Kedua sektor ekonomi tersebut memberikan kontribusi yang dominan terhadap ketersediaan lapangan kerja. Hal ini menyebabkan proporsi penduduk Batam menjadi lebih heterogen dari Kabupaten/Kota lainnya baik dari sisi agama maupun dari sisi suku bangsa.

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2000, dapat dilihat bahwa persentase terbesar suku bangsa yang menghuni Kota Batam adalah suku bangsa Jawa

⁴ tipe rumah kecil : luas bangunan s.d 36 m²;
tipe rumah sedang : luas bangunan >36 m² s.d 70 m²
tipe rumah besar : luas bangunan >70 m²

⁵ berdasarkan definisi BPS yang dimaksud penduduk adalah *all residents in the entire geographical territory of the RI who have stayed for 6 months or longer and those who intend to stay even though their length of stay were less than 6 months*

(26,69%) diikuti oleh suku bangsa Melayu (20,90%) dan suku bangsa Batak (14,92%). Persebaran dan kepadatan penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh luas wilayah dan skala pembangunan saja, akan tetapi skala kegiatan pemerintahan diduga juga mempunyai pengaruh terhadap persebaran dan kepadatan penduduk. Perkiraan ini terkait dengan ketersediaan fasilitas bagi penduduk seperti sekolah, fasilitas kesehatan, jalan dan sebagainya. Dari hasil sensus tersebut juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kota Batam sebagian besar berada pada usia produktif (antara 15-64 tahun) yaitu sebesar 76,76% sedangkan untuk usia 15 tahun ke bawah sebesar 22,58% dan untuk usia 65 tahun keatas sebesar 0,66%.

Sementara itu, jumlah penduduk di Kota Tanjung Pinang berada di urutan ketiga setelah Tanjung Balai Karimun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis serta sektor ekonomi yang berkembang di daerah tersebut, dimana sebagian besar penduduk Kabupaten Karimun bekerja di sektor pertanian yang dikelompokkan dalam 5 sub sektor yaitu: tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan. Namun demikian sub sektor perikanan merupakan sektor yang paling signifikan dibanding sub sektor lainnya. Sementara sektor pertambangan di daerah Karimun menghasilkan 3 (tiga) bahan tambang/galian utama, yaitu pertambangan timah, granit dan penggalian pasir.

Sejak berdirinya Provinsi Kepulauan Riau yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 2004, Kota Tanjung Pinang ditetapkan sebagai ibukota Provinsi dimana pusat pemerintahan untuk 2 (dua) tahun pertama bertempat di Kota Batam. Sejak Februari tahun 2006 pusat pemerintahan berada di Kota Tanjung Pinang. Hal ini diperkirakan akan mempengaruhi jumlah penduduk di kota gurindam tersebut mengingat pusat pemerintahan berada di daerah tersebut. Disamping itu, penerapan sistem *Special Economic Zone (SEZ)*⁶ yang meliputi wilayah Batam, Bintan dan Karimun akan turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan struktur penduduk di wilayah ini.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi yang tergolong muda ini terus meningkat setiap tahunnya, dimana tingkat pertumbuhan pada tahun 2006 terhadap tahun 2005 mencapai 1,05% dengan pertumbuhan terbesar terdapat di Kota Batam.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kab/Kota di Provinsi Kepri tahun 2005-2006

Kab/Kota	Jml Penduduk 2005	Jml Penduduk 2006	Laju Pertumbuhan
1. Batam	616.114	656.001	1,06%
2. Karimun	200.704	209.875	1,05%
3. Tanjung Pinang	167.611	172.616	1,03%
4. Bintan	117.825	121.303	1,03%
5. Natuna	88.914	91.918	1,03%
6. Lingga	83.680	86.150	1,03%
Total	1.274.848	1.337.863	1,05%

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

⁶ Uraian lebih lengkap lihat di Boks – II “Penerapan SEZ di Wilayah BBK”

1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan definisi dari BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur dimaksud yang menunjukkan persentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan pada 3 (tiga) faktor yang paling esensial dalam kehidupan manusia, yaitu: kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi kelangsungan hidup dan sehat adalah angka harapan hidup, untuk mengukur dimensi pengetahuan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kepulauan Riau, tingkat IPM Provinsi Kepulauan Riau mencapai 70,8 dan menempati urutan ke-8 dari 33 Provinsi di Indonesia. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, Kota Batam menempati urutan IPM ke-11 dari 440 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan nilai 75,8.

Tabel 1.3
IPM Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2004

Prov/Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (tahun)	Rata-rata Lama sekolah (tahun)	Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita disesuaikan (000Rp)	IPM	Peringkat
Provinsi Kepri	68,8	94,7	8,0	613,0	70,8	8
Karimun	69,2	95,0	7,8	614,1	71,0	102
Bintan	69,0	92,3	7,1	613,9	69,7	152
Natuna	67,0	95,3	6,7	596,3	67,7	235
Lingga	68,9	90,3	7,0	605,0	67,7	236
Kota Batam	70,1	98,4	10,4	634,2	75,8	11
Kota Tj. Pinang	68,8	96,7	9,1	614,7	72,2	77

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau – diambil dari Laporan Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006

Nilai IPM yang mendukung sehingga Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai nilai IPM dengan peringkat baik didukung oleh angka harapan hidup yang masing-masing sebesar 70,1 tahun dan 68,8 tahun. Disamping itu peran angka harapan hidup tersebut juga ditunjang oleh komponen angka melek huruf dimana nilai untuk Provinsi Kepulauan Riau sebesar 94,7% dan Kota Batam sebesar 98,4%. Secara parsial per Kab/Kota angka harapan hidup tertinggi terdapat di Kota Batam (70,1 tahun) sedangkan harapan hidup terendah terdapat di Kabupaten Natuna (67,0 tahun). Untuk Kab/Kota lainnya seperti Karimun, Bintan, Lingga dan Tanjung Pinang masing-masing sebesar 69,2 tahun, 69,0 tahun, 68,9 tahun, dan 68,8 tahun. Untuk indikator angka melek huruf, angka tertinggi terdapat di Kota Batam (98,4%) sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Lingga (90,3%).

Sementara itu, secara nasional indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia pada tahun 2006 naik 2 (dua) peringkat menjadi 108 terhadap tahun 2005. Sementara laju

pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,3% per tahunnya.⁷ Hal ini diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi sambutan dalam Kongres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia 2006 bertema *Membangun Manusia Indonesia yang Sehat, Berilmu, Sejahtera, dan Berbudi Pekerti Luhur* di Jakarta pada tanggal 10 November 2006. Berdasarkan laporan bertajuk *Human Development Report 2006 Beyond Scarcity: Power, Poverty, and The Global Water Crisis*, IPM Indonesia pada tahun 2006 naik 2 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari urutan 110 atau angka indeks 0,697 (skala 1-0) menjadi peringkat ke 108 (0,711) dari 177 negara. Berdasarkan laporan tersebut, sepanjang periode 1990-2004, jumlah penduduk miskin di Indonesia yang hidup dengan pendapatan US\$1 per harinya mencapai 7,5%. Sementara yang berpendapatan US\$2 per harinya mencapai 52,4%, dan berdasarkan kriteria garis kemiskinan nasional (2.100 kalori per hari per orang) sebesar 27,1%.

Sebagai perbandingan, Thailand, pada periode yang sama mencatat jumlah orang miskin yang hidup dengan US\$1 per hari sebesar 2%, hidup di bawah US\$2 per hari sebesar 25,2%, dan berdasarkan garis kemiskinan nasional 13,1%.

Tabel 1.4
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2006

Negara	2003		2004		2005		2006	
	Peringkat**	IPM*	Peringkat***	IPM*	Peringkat***	IPM*	Peringkat	IPM
Singapura	28	0,884	25	0,902	25	0,907	25	0,916
Brunei	31	0,872	33	0,867	33	0,866	34	0,871
Thailand	74	0,768	76	0,768	73	0,778	74	0,784
Filipina	85	0,751	83	0,753	84	0,758	84	0,763
Vietnam	109	0,688	112	0,691	108	0,704	109	0,709
Indonesia	112	0,682	111	0,692	110	0,697	108	0,711
Myanmar	131	0,549	132	0,551	129	0,578	130	0,581
Kamboja	130	0,556	130	0,568	130	0,571	129	0,583

Ket: *Skala 0-1, **dari 175 negara yang diperingkat, ***dari 177 negara yang diperingkat
Sumber: HDR 2006

⁷ Sebagaimana dikutip dari harian Bisnis Indonesia tanggal 11 November 2006

BOKS – II

PENERAPAN *SPECIAL ECONOMIC ZONE* DI WILAYAH BATAM, BINTAN & KARIMUN (BBK)

Pulau Batam dibangun berdasarkan Inpres No.74 tahun 1971, dimana Batam dan sekitarnya dibangun berdasarkan visi bahwa Singapura dalam kurun waktu tertentu akan bersifat selektif sehingga Indonesia harus siap menerima limpahan industri barang dan jasa. Visi ini menjadi kenyataan. Namun Batam dan sekitarnya sendiri kurang berkembang, padahal Batam sudah memiliki pelabuhan udara dan laut yang memadai. Disamping itu beberapa jembatan dibangun untuk menghubungkan Batam dengan pulau-pulau yang berdekatan. Tenaga kerja juga sudah tersedia dalam jumlah yang banyak. Adapun kesulitan investasi di Batam dan sekitarnya antara lain disebabkan oleh peraturan perpajakan, pertanahan, dan perizinan investasi yang tidak kondusif. Persoalan yang terjadi di Batam salah satunya disebabkan oleh pemerintah yang tidak tegas mengimplementasikan visi untuk menjadikan Batam dan sekitarnya sebagai daerah yang kondusif untuk investasi. Pembentukan SEZ kemudian dipandang sebagai salah satu solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hingga saat ini, Singapura sudah mendirikan SEZ di China, India, dan Vietnam. Oleh karena itu kredibilitas Singapura dalam mengembangkan SEZ sangat baik.

SEZ merupakan suatu kerangka kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura dimana penerapannya adalah untuk wilayah Batam, Bintan dan Karimun. Bentuk kerjasama tersebut telah dituangkan dalam draft kerjasama antara Indonesia dan Singapura dimana pada tanggal 25 Juni 2006 Presiden RI – Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura – Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) SEZ untuk wilayah BBK. Adapun implementasi perjanjian SEZ ini akan dievaluasi pada 4 (empat) bulan kedepan.

Persetujuan SEZ tersebut ditandatangani oleh Menko Perekonomian – Boediono dan Menteri Perdagangan & Perindustrian Singapura – Lim Hing Kiang yang berlangsung di Nongsa Point Marina – Batam. Untuk merealisasikan kesepakatan kerjasama tersebut, maka dibentuk tim perumus *Joint Steering Committee* yang diketuai Menko Perekonomian RI Boediono dan Menteri Ekonomi Singapura Lim Hing Kiang. Sedangkan pelaksanaan SEZ itu sendiri dilakukan oleh *Joint Working Committee* yang diketuai Menteri Perdagangan RI – Mari Elka Pangestu dan Ketua Pengembangan Ekonomi Singapura – Mr. Lim Siong Guan. Dalam tenggat waktu 4 (empat) bulan tim tersebut harus sudah menginventarisir masalah yang dihadapi para pengusaha dari 2 (dua) negara dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden RI dan PM Singapura.

Terkait dengan pengembangan SEZ di Kota Batam, Bintan dan Tanjung Balai Karimun, maka mulai tanggal 25 Juli 2006 diberlakukan pelayanan *One Stop Service* (OSS) yang bertempat di Gedung Promosi Sumatera – Batam Center. Pelayanan ini berkaitan dengan izin-izin dari Otorita Batam dan Dispenda. Adapun izin usaha dari Otorita Batam antara lain: persetujuan perizinan PMA dan PMDN, perizinan fatua planologi, pengurusan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), pengurusan izin pematangan lahan dan rekomendasi TKA (Tenaga Kerja Asing). Sementara pelayanan perizinan dari Pemko Batam melibatkan pelayanan perizinan dari 9 dinas teknis dan 3 badan yang ada. Kerjasama Otorita Batam – Pemko untuk OSS didasarkan pada UU No.32 tahun 2004 dan UU No.53 tahun 2006 serta kesepakatan kerjasama Pemko dan Otorita Batam.

Terdapat 6 (enam) esensial berkenaan dengan OSS, yaitu : (i) peningkatan pelayanan, (ii) peningkatan investasi, (iii) pemasukan pajak dan PAD, (iv) kesejahteraan sosial, (v) peningkatan hubungan kerja daerah – pusat termasuk instansi vertikal, serta (vi) sebagai syarat penerapan SEZ.

Berdasarkan hasil kerja dari *Join Steering Comittee* (JSC) maupun *Join Working Group* (JWG) telah disusun beberapa hal terkait kerja sama ekonomi, dimana terdapat 75 rencana terkait dengan kebutuhan SEZ ke depannya, antara lain di bidang keimigrasian, bea cukai, perpajakan, tenaga kerja, pelatihan dan sertifikasi, investasi, peningkatan kapasitas kelembagaan maupun infrastruktur. Sedangkan menyangkut bentuk atau payung hukum SEZ, proses pengkajian UU Nomor.36 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (*free trade zone*) terus dilakukan agar dapat dipergunakan sebagai payung hukum Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam Bintan dan Karimun.

Dengan pemberlakuan SEZ di wilayah BBK, maka diharapkan peranan perbankan dalam perekonomian menjadi lebih optimal. Sentimen-sentimen positif akibat pemberlakuan SEZ ini diperkirakan akan mampu menghidupkan kembali kegiatan ekonomi di wilayah Batam, Bintan dan Karimun yang secara tidak langsung akan berdampak pada indikator-indikator makro maupun mikro. Fungsi intermediasi perbankan yang sampai dengan Semester I-2006 mengalami perlambatan diharapkan mampu meningkat kembali.

1.4 Perkembangan Tenaga Kerja

Berdasarkan data yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, sampai dengan bulan September 2006 jumlah tenaga kerja sektor formal sebanyak 236.793 orang dan meningkat sebesar 0,03% (72 orang) dibandingkan Desember 2005.

Dari 236.793 orang pekerja tersebut sebagian besar (76,53%) atau sebanyak 181.210 orang bekerja pada sektor industri, dan sektor lain yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor bangunan, dan sektor perdagangan, hotel & restoran dengan jumlah pekerja masing-masing sebanyak 19.820 orang (8,37%) dan 17.659 orang (7,46%). Sementara itu, menurut jenis kelamin, sebesar 56,90% pekerja di Kota Batam adalah perempuan sedangkan pekerja laki-laki sebesar 43,10%.

1.5 Perkembangan Pariwisata

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Batam hingga periode tw.III – 2006 berjumlah 752.637 orang, menurun 7,64% dibandingkan periode yang sama tahun 2005.

Tabel 1.5
Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Kota Batam
Tahun 2004 – 2006

Periode	2004	2005	2006
1. Januari	126.168	124.169	82.584
2. Februari	123.263	83.677	69.254
3. Maret	134.119	83.811	83.725
4. April	90.409	79.967	86.676
5. Mei	122.141	90.924	86.834
6. Juni	142.557	90.828	93.857
7. Juli	134.233	87.022	86.219
8. Agustus	142.490	77.993	83.772
9. September	129.622	76.547	79.716
Jumlah	738.657	814.938	752.637

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam – Data olahan dari Kantor Imigrasi Batam

Penurunan kunjungan wisatawan ini diperkirakan bersifat kondisional mengingat peningkatan kunjungan wisatawan berkaitan dengan masa liburan yang terjadi pada bulan Juni dan Desember. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya upaya oleh pihak-pihak terkait untuk menciptakan *event-event* yang diperkirakan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Batam. Antara lain dengan menyusun program-program kegiatan yang akan mendukung sektor pariwisata, misalnya: pertandingan *Sea Eagle Boat*, Festival Laut Melayu, pertandingan *Dragon Boat Race (DBR)* yang direncanakan akan berlangsung tanggal 23-26 November 2006. Disamping itu, Pemerintah Daerah membangun sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah Provinsi Kepri, salah satunya adalah pembangunan jalan lintas barat sepanjang 47 km yang menghubungkan Desa Busung Kecamatan Bintan Utara

dengan Kecamatan Gunung Kijang. Rencananya di jalur lintas selebar 50m tersebut akan dibangun 5 jembatan.

Satu hal yang menarik adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Visa untuk wilayah Indonesia, dimana Batam menduduki peringkat ke-3 dari total belanja yang dikeluarkan wisatawan mancanegara (Wisman) yang datang ke Indonesia, dan mencapai USD.12 juta (2,2%). Sedangkan untuk peringkat pertama belanja terbesar wisman adalah Bali dengan total belanja mencapai USD 261 juta (47%), disusul Jakarta dengan pengeluaran USD.186 juta (33%). Meskipun jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia tahun 2005 turun 6% dibanding 2004 yang tercatat sebesar 5,3 juta orang, namun jumlah transaksi pembelanjaan yang dilakukan wisman justru mengalami peningkatan sebesar 20% dibanding tahun sebelumnya. Data tersebut berdasarkan pembelanjaan pengunjung asing yang datang ke Indonesia, dimana nantinya akan bermanfaat bagi pelaku pariwisata di Indonesia sehingga diketahui tren pembelanjaan wisman dengan adanya isu-isu nasional. Transaksi terbanyak dilakukan di hotel yang tercatat 852.000 transaksi dengan nilai mencapai USD.198 juta (26%), kemudian pembelanjaan di restoran sebesar USD.36 juta (6%), pembelanjaan Departemen Store yang mencapai USD.90 juta (16%).

Sementara itu, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Karimun mengajak para pengusaha hotel untuk meningkatkan sektor pariwisata, antara lain dengan menyusun kalender kegiatan atau program setiap bulannya sehingga mendukung program wisata di Karimun.

Sementara itu, selama tw.III-2006 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Batam masih didominasi oleh warga negara Singapura dengan kontribusi sebesar 65,86%.

Tabel 1.6
Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara Menurut Kebangsaan
Yang Berkunjung ke Kota Batam

Kebangsaan	2005			2006			
	Tw.I	Tw.II	Sem.I	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Jml
1. Singapura	218.876	185.053	403.929	150.052	182.453	163.157	495.662
2. Malaysia	33.721	31.402	65.123	30.419	32.168	33.321	95.908
3. Korsel	11.429	17.060	28.489	22.476	18.440	17.515	58.431
4. Jepang	5.688	6.564	12.252	6.500	6.177	6.235	18.912
5. Inggris	2.630	2.358	4.988	2.490	2.449	2.425	7.364
6. Amerika	1.891	2.031	3.922	1.937	1.800	1.976	5.713
7. Taiwan	1.400	1.792	3.192	1.263	1.561	3.370	6.194
8. Australia	1.752	1.701	3.453	1.604	1.688	1.543	4.835
9. Jerman	1.027	570	1.597	634	627	616	1.877
10. Belanda	374	381	755	423	406	591	1.420
11. Lainnya	12.869	12.807	25.676	17.765	19.598	18.958	56.321
Jumlah	291.657	261.719	553.376	235.563	267.367	249.707	752.637

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau – Data diolah dari Kantor Imigrasi Batam

1.6 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Batam dari sisi jumlah perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 52 perusahaan pada periode Januari-September 2005 menjadi 28 perusahaan pada periode yang sama tahun 2006. Sementara itu, nilai investasi yang direncanakan (termasuk perluasan usaha) mengalami peningkatan, dari US\$ 232,38 juta menjadi US\$ 257,45 juta atau naik sebesar 10,78%.

Negara asal investasi pada periode Januari-September 2006 adalah Singapura, Korea Selatan, RRC, Jepang, Malaysia, Australia, Belanda dan Inggris dengan bidang usahanya berupa industri perkapalan, industri rokok, industri kemasan, perdagangan ekspor impor, industri pakaian jadi, jasa akomodasi dan jasa lainnya.

Tabel 1.7
Perkembangan Rencana Investasi Asing di Kota Batam

Periode	2005		2006	
	Jml Perusahaan Baru	Nilai *) (US\$)	Jml Perusahaan Baru	Nilai *) (US\$)
Semester I	29	82.996.927	44	168.138.111
Tw.III	16	149.389.952	29	89.307.004

Sumber : Subdit BKPM Otorita Batam

Keterangan : *) termasuk perluasan usaha

Berdasarkan informasi dari Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM – Darmawan Djajusman menjelaskan bahwa target realisasi investasi pada tahun 2006 untuk PMDN sebesar Rp.35,32 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp.13,54 triliun atau 38,34%. Sedangkan target investasi PMA Rp.97,50 triliun dan terealisasi Rp.43,46 triliun atau 44,57%. Sementara itu, untuk tahun 2007 diperkirakan jumlah investasi tumbuh sebesar 12,5% dengan alasan semakin membaiknya iklim investasi di Indonesia diantaranya berupa pemberian insentif fiskal.

Saat ini Thailand memberikan *tax holiday* 3-8 tahun dengan pembebasan bea masuk impor barang modal dan bahan baku. Vietnam memberikan *tax holiday* 2-4 tahun dengan pemotongan pajak 10%-20%. Singapura memberikan *tax holiday* 5-10 tahun dengan pemotongan pajak 10%-20%. Sedangkan China memberikan pemotongan pajak 33% dengan pembebasan bea masuk maksimal 5%. Sementara itu, Indonesia memberikan keringanan bea masuk maksimal 5% dengan *investment allowance* sebesar 30% selama 6 tahun yang diatur dalam PP 148/2000 yang hingga saat ini belum dapat dioperasionalkan.

BOKS – III

PERBANDINGAN SEZ POLA CINA & INDIA

Penerapan *Special Economic Zone* (SEZ) di wilayah Batam-Bintan-Karimun saat ini telah melewati batas waktu 100 hari yang diberikan Presiden RI pada Batam untuk mampu mengimplementasikan pelayanan satu atap (*one stop service/OSS*) sebagai awal realisasi SEZ di BBK. Untuk itu, pelaksanaan perizinan satu atap di Gedung Pusat Promosi Sumatera – Batam Center telah mulai diberlakukan. Disamping itu, proses penetapan payung hukum atas penerapan SEZ saat ini masih dalam tahap perumusan.

Pemberlakuan SEZ di wilayah BBK merupakan kerjasama antara pihak Pemerintah RI dengan Pemerintah Singapura, dimana nantinya Singapura akan memiliki kewenangan untuk menjadi pengelola atau manajemen dan marketing SEZ.

Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) MS. Hidayat dan Ketua Komisi VI DPR – Didik J. Rachbini yang juga merupakan pengamat ekonomi, penerapan SEZ di wilayah BBK lebih cocok bila menggunakan pola seperti yang diterapkan di Cina. Pemberlakuan SEZ di Cina terbukti mampu menjadikan negeri tersebut pesaing kompetitif Amerika Serikat.

Perbandingan SEZ Pola Cina dan India

Model Cina	Model India
1. Dipisahkan ke dalam tiga kawasan yang disesuaikan dengan spesifikasi, terdiri dari 5 FTZ, 32 zona ekonomi teknologi khusus, & 53 zona industri berteknologi tinggi.	1. Investor asing tidak dibatasi hanya di kawasan tertentu, tapi seluruh negeri adalah SEZ serta barang yang masuk adalah barang transit, apapun bentuk penanganan yang dilakukan terhadapnya.
2. Sewa lahan yang lebih panjang dan murah.	2. Investor memiliki <i>time limit</i> penggunaan lahan & kawasan, sehingga dalam rentang waktu tertentu (berkisar 10-15 tahun) harus memperpanjang izin.
3. Investor yang berada di luar kawasan direlokasi ke dalam kawasan berikat.	3. Semua kawasan bisa dipakai.
4. Pemerintah terapkan 1 panduan buat seluruh SEZ.	4. Kawasan SEZ lebih banyak dikelola swasta dengan promosi besar-besaran. Untuk menarik <i>tenant</i> dilakukan pemerintah.
5. Insentif pajak berupa tax holiday 5-10 tahun.	5. Mendapat <i>tax holiday</i> 10 tahun dan pengusaha dipungut pajak bila sudah untung, terhitung tahun ke-5 sejak beroperasi.
6. Proses perizinan 3 hari dengan sistem satu atap.	6. Tarif bea masuk hanya 25%
7. Keamanan iklim investasi.	7. Keamanan iklim investasi.
8. Infrastruktur berstandar internasional.	8. Infrastruktur berstandar internasional.

Sumber : Tribun Batam – 14 November 2006

1.7 Perkembangan Pedagang Valuta Asing (PVA)

Pedagang Valuta Asing (PVA) atau yang biasa dikenal dengan *money changer* memiliki peranan yang cukup besar dalam sektor keuangan di Indonesia. Oleh karena itu Bank Indonesia memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kegiatan ini, antara lain dengan mengeluarkan beberapa aturan yang mengatur keberadaan PVA antara lain : Peraturan Bank Indonesia / PBI No.6/1/PBI/2004 tanggal 4 Januari 2004 tentang PVA, serta Surat Edaran / SE No.6/13/DPM tanggal 11 Maret 2004 tentang tata cara perizinan, penerapan prinsip mengenal nasabah, pengawasan, pelaporan dan peneraan sanksi bagi PVA bukan bank.⁸

⁸ Peraturan Bank Indonesia dapat dilihat melalui <http://www.bi.go.id>

Pada umumnya, terdapat beberapa hal yang mendukung peranan PVA di Indonesia, antara lain :

- i. sebagai upaya untuk memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi nilai Rupiah, PVA merupakan lembaga penunjang sektor keuangan yang memiliki peranan yang cukup strategis khususnya dalam perkembangan pasar valuta asing domestik.
- ii. Dalam upaya mendukung peningkatan penerimaan devisa nasional melalui pengembangan pariwisata maka pelayanan dan kemampuan PVA perlu ditingkatkan.
- iii. Upaya menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan bertanggung jawab serta kegiatan usaha yang berkesinambungan, PVA perlu melaksanakan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian termasuk *Know Your Customer* (KYC).
- iv. Turut menanggulangi tindak pidana pencucian uang, PVA mempunyai peranan yang cukup strategis dalam membantu instansi yang berwenang.

Sampai dengan tw.III-2006, jumlah PVA yang melakukan kegiatan di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam berjumlah 95 PVA dimana terdapat peningkatan sebanyak 4 PVA dibandingkan tw.II-2006, yang melakukan kegiatan usaha di Kota Batam. Oleh karena itu, jumlah PVA yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Riau adalah : 69 PVA di Kota Batam, 12 PVA di Kota Tanjung Pinang, 9 PVA di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, 3 PVA di Tanjung Uban, dan 2 PVA di Tanjung Batu. Berdasarkan data yang ada, jumlah PVA yang melakukan usaha di wilker KBI Batam menempati urutan ke-3 (tiga) di Indonesia setelah Jakarta dan Denpasar. Banyaknya PVA bukan bank tersebut diperkirakan karena tingginya permintaan akan transaksi Uang Kertas Asing (UKA) diwilayah ini serta didukung dengan mudahnya perijinan serta didukung dengan letak geografis yang strategis.

Berdasarkan rekapitulasi volume usaha PVA selama tw.III-2006, terdapat peningkatan pada transaksi mata uang Malaysian Ringgit (MYR) dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara untuk mata uang USD dan SGD terdapat penurunan transaksi baik penjualan maupun pembelian.

Tabel 1.8
Rekapitulasi Volume Usaha Pedagang Valuta Asing di Wilker KBI Batam

Pembelian/Penjualan	Tw.II-06		Tw.III-06	
	Pembelian	Penjualan	Pembelian	Penjualan
USD	2.574.395,00	2.439.779,69	2.159.426,00	2.212.455,94
SGD	76.383.407,93	74.503.986,21	58.708.416,30	57.746.290,64
MYR	12.703.173,99	14.171.602,62	14.597.303,46	16.195.794,18

Sumber: Bank Indonesia

1.8 Pendapatan Perkapita Provinsi Kepulauan Riau

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. PDRB per-kapita dan pendapatan per-kapita

mencerminkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh proses produksi suatu daerah setelah dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Oleh karena itu, besar dan kecilnya jumlah penduduk di suatu daerah berpengaruh terhadap nilai PDRB per-kapita maupun pendapatan per-kapita.

Tabel 1.9
Pendapatan Per-Kapita Provinsi Kepulauan Riau
Periode Triwulan III – 2006

Rincian	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000
1. PDRB Provinsi tw.III-2006	Rp. 11.529.240.460.000	Rp. 8.204.602.300.000
2. Jumlah Penduduk tw.III-2006	1.337.863 orang	
3. Pendapatan Per-Kapita	Rp. 8.617.654,02	Rp. 6.132.617,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau – Data Diolah

Berdasarkan tabel 1.8, terlihat bahwa pendapatan per-kapita pada tw.III-2006 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 8.617.654,02, sedangkan jika dilihat secara riil (atas dasar harga konstan 2000) pendapatan per-kapita Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.6.132.617,69.

Tingkat UMK Kota Batam tahun 2006 ditetapkan sebesar Rp.815.000,00. Saat ini pembahasan upah minimum kota (UMK) Batam tahun 2007 mulai dibicarakan, dimana sejak 10 Oktober 2006 Dewan Pengupahan Kota Batam telah memulai perundingan tripartit untuk memutuskan UMK 2007. Sebelumnya telah dilakukan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dimana pada bulan November 2006 ditetapkan sebesar Rp.1.026.793/bulan dan bulan Oktober sebesar Rp.1.011.000/bulan.

1.9 Sektor Ekonomi Dominan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tw.III-2006 secara triwulanan (q-t-q) diperkirakan sebesar 1,68% lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada tw.II-2006 yang tercatat sebesar 1,98%. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar berdasarkan lapangan usaha adalah komponen pertanian (2,93%) diikuti komponen jasa-jasa (2,19%) dan komponen perdagangan (1,80%). Sementara itu, berdasarkan penggunaan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 2,08% diikuti komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (2,03%), dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba (1,86%).

Keberadaan ekonomi suatu Kabupaten/Kota salah satunya dapat dilihat dari peranannya terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan dalam suatu provinsi. Selama 5 (lima) tahun terakhir Kota Batam merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan yang terlihat dari nilai kontribusinya yang mencapai 77% baik berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan. Sementara itu penyumbang nomor kedua adalah Kota Tanjung Pinang dengan nilai kontribusinya diatas 6%.

Tabel 1.10
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Pembentukan PDRB Provinsi Kepri
Tahun 2000 – 2004 (%)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2000	2001	2002	2003	2004
A. Atas dasar harga berlaku					
1. Karimun	5,57	5,66	5,91	5,78	6,12
2. Kepulauan Riau / Bintan	5,90	5,87	5,65	5,35	5,18
3. Natuna	2,12	2,25	2,40	2,63	2,86
4. Lingga	1,59	1,62	1,59	1,58	1,56
5. Batam	78,50	78,25	77,99	78,48	77,65
6. Tanjung Pinang	6,32	6,36	6,48	6,17	6,64
Provinsi Kepri	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B. Atas dasar harga konstan 2000					
1. Karimun	5,57	5,63	5,54	5,49	5,37
2. Kepulauan Riau / Bintan	5,90	5,84	5,69	5,54	5,36
3. Natuna	2,12	2,14	2,11	2,10	2,06
4. Lingga	1,59	1,60	1,59	1,58	1,54
5. Batam	78,50	78,44	78,67	78,90	79,35
6. Tanjung Pinang	6,32	6,34	6,41	6,39	6,31
Provinsi Kepri	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Batam

Dalam perkembangannya, sejak tahun 2002 terjadi pergeseran pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau yang semula pada Kabupaten Bintan menjadi Kabupaten Karimun, dimana dalam 5 (lima) tahun terakhir kontribusi Kabupaten Bintan terus mengalami penurunan dari 5,90% (tahun 2000) menjadi 5,18% (tahun 2004). sedangkan kontribusi Kabupaten Karimun naik dari 5,57% (tahun 2000) menjadi 6,12% (tahun 2004).

Jika dilihat dari nilai kontribusi Kabupaten/Kota terhadap pembentukan PDRB Provinsi menurut lapangan pekerjaan, terlihat bahwa pada tahun 2004 Kota Batam merupakan penyumbang terbesar di hampir semua sektor lapangan usaha kecuali sektor pertanian dan pertambangan. Sumbangan Kota Batam pada sektor-sektor tersebut berkisar antara 43,81% sampai 91,71%. Pada sektor pertanian dan pertambangan peranan Kota Batam masih cukup signifikan karena nilai sumbangannya masih mencapai diatas 18%. Untuk sektor pertanian Kabupaten Natuna dan Karimun adalah penyumbang terbesar terhadap nilai PDRB Provinsi di sektor ini dimana sekitar 60% nya merupakan sumbangan dari kedua Kabupaten tersebut. Sedangkan untuk sektor pertambangan dan penggalian, Kabupaten Kepri / Bintan dan Karimun menyumbang hampir 80% dari PDRB Provinsi.

1.9.1 Sisi Penawaran / Produksi

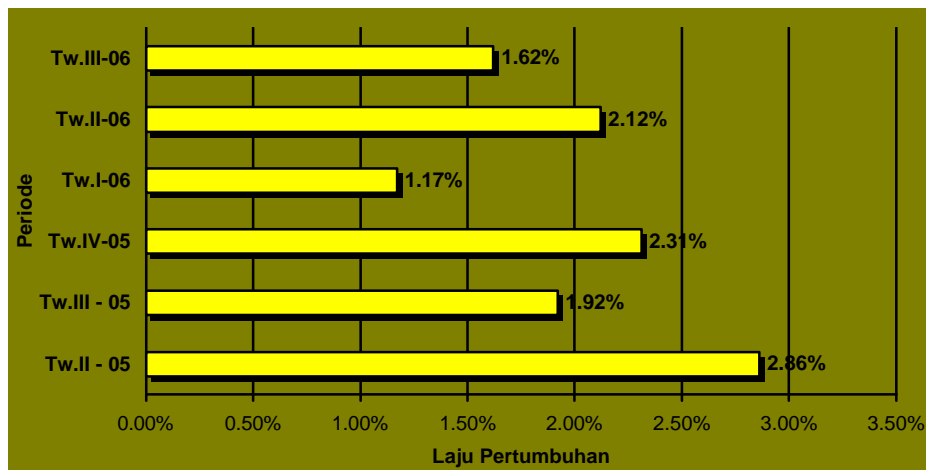
Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau selama tw.III-2006 masih didominasi oleh sektor industri dengan kontribusi sebesar 59,66% diikuti oleh sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 10,69%, sedangkan sektor-sektor lain yang cukup berperan dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Riau adalah sektor perdagangan hotel & restoran, sektor keuangan, dan sektor pertanian. Sektor industri berkembang di Kota Batam dan Kabupaten Bintan, sedangkan sektor pertambangan & penggalian bertumpu pada pertambangan migas di Kabupaten Natuna. Sementara itu sektor perdagangan merupakan sektor unggulan di Kota

Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun, serta sektor pertanian menjadi sektor andalan Kabupaten Lingga.

1.9.1.1 Komponen Industri Pengolahan ⁹

Wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam yang berada di Provinsi Kepulauan Riau meliputi 6 Kabupaten/Kota, yaitu : Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna. Berdasarkan nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau, komponen industri memiliki nilai terbesar atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2000¹⁰, serta memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri merupakan komponen utama pendukung perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Grafik 1.3
Perkembangan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Provinsi Kepulauan Riau
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2005
Periode 2005 – 2006



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Sektor industri menjadi sektor andalan Kota Batam, serta Kabupaten Bintan (semula bernama Kabupaten Kepulauan Riau) dengan kawasan industri Lobamnya. Mengingat cukup besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor industri terhadap perekonomian daerah, maka pemerintah menerapkan berbagai macam kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor tersebut. Salah satunya adalah melalui penerapan sistem *Special Economic Zone* (SEZ) di wilayah Batam-Bintan-Karimun (BBK). Untuk mendukung kegiatan perekonomian khususnya di Kota Batam, maka pemerintah memberikan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan, antara lain: fasilitas jalan raya dan jembatan, fasilitas pelabuhan laut dan udara, tenaga listrik dan

⁹ Berdasarkan klasifikasi dari BPS, kegiatan sektor industri pengolahan mencakup 3 sektor, yaitu: industri pengilangan minyak bumi, industri pengolahan non-migas, dan industri pengilangan gas alam cair

¹⁰ Perhitungan dan nilai tambah untuk sub sektor industri besar/ sedang digunakan pendekatan produksi, dan untuk output & nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 digunakan metode deflasi

telekomunikasi, persediaan air bersih, berbagai macam fasilitas umum (hotel, bank, perusahaan asuransi, ekspedisi, pusat perbelanjaan, sekolah, kesehatan, tempat peribadatan, fasilitas olahraga). Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan payung hukum yang mengatur penerapan SEZ di wilayah BBK, dan masih dalam pembahasan.

1.9.1.2 Komponen Pertambangan

Sektor pertambangan memberikan kontribusi terbesar kedua pada tw.III-2006 yaitu sebesar 10,69% dimana kontribusi minyak dan gas bumi sebesar 9,36% sementara pertambangan tanpa migas (0,85%) dan penggalian (0,48%) memberikan kontribusi yang tidak terlalu signifikan. Adapun daerah yang memberikan kontribusi migas pada PDRB Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Natuna.

Meskipun pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2005-2006 terus mengalami pertumbuhan namun *trend* pertumbuhannya cenderung menurun, hal ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan pertambangan migas mengalami penurunan dimana pada tw.II-2005 sebesar 0,21%, dan pada tw.III-2005 terjadi peningkatan laju pertumbuhan yaitu sebesar 3,04%, namun pada tw.IV-2005 terjadi perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar -1,31%. Kemudian pada tahun 2006 terdapat perbaikan laju pertumbuhan yang cukup baik yaitu sebesar 0,21% (tw.I-2006); 1,49% (tw.II-2006); dan 1,27% (tw.III-2006).

Di samping Kabupaten Natuna, kontribusi sektor pertambangan juga disumbangkan oleh wilayah Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Terdapat 3 (tiga) bahan tambang/galian utama yang dihasilkan di daerah ini antara lain : pertambangan timah, pertambangan granit, dan penggalian pasir. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Karimun (data yang diperoleh s/d tahun 2002), produksi pertambangan granit yang tercatat pada tahun 2002 adalah sebanyak 5.103.690.000 m³ dengan jumlah iuran sebanyak Rp.15.774.603.731. Untuk produksi timah, pada tahun 2002 tercatat sebanyak 6.237.300 ton. Sementara itu, penggalian pasir darat tercatat sebanyak 1.359.450.000 ton, sedangkan penggalian pasir laut belum ada data yang tersedia.

1.9.1.3 Komponen Perdagangan

Sebagai daerah yang menjadi salah satu kawasan pertumbuhan IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapore – *Growth Triangle*), Provinsi Kepulauan Riau memiliki berbagai macam keunggulan, diantaranya adalah : letaknya yang strategis karena berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja yang berada dijalur pelayaran internasional serta memiliki potensi sumber daya alam. Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya tersebut, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Oleh karena itu, sektor perdagangan menjadi salah satu sektor unggulan disamping sektor-sektor ekonomi lainnya. Daerah yang menjadikan sektor perdagangan menjadi kegiatan ekonomi unggulan diantaranya Kabupaten Tanjung Balai Karimun dan Kota Tanjung Pinang. Adapun sektor perdagangan terbagi dalam 3 sub-sektor, yaitu : sub-sektor perdagangan, sub-sektor hotel, dan sub-sektor restoran.

Dengan ditetapkannya Kota Tanjung Pinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau, maka saat ini terdapat 3 (tiga) pemerintahan di Kota ini, yaitu : sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan. Kota ini memiliki beragam kultur budaya suku dari hampir seluruh Indonesia yang masuk ke kota ini dengan bahasa melayu sebagai bahasa daerah. Hal ini menjadi salah satu potensi untuk sektor ekonomi terutama sektor perdagangan yang sebelumnya telah menjadi sektor andalan di daerah ini. Disamping itu, sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan dan ini turut mempengaruhi sub-sektor perdagangan diantaranya sub-sektor hotel dan sub-sektor restoran.

1.9.1.4 Komponen Keuangan

Komponen keuangan memberikan distribusi sebesar 5,51% terhadap total PDRB Provinsi Kepulauan Riau tw.III-2006. Sub-sektor Bank¹¹ memberikan sumbangan sebesar 3,76% dan sub-sektor sewa bangunan sebesar 1,53%. Perkembangan sub-sektor perbankan di Provinsi Kepulauan Riau selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik dimana data-data indikator perbankan terus meningkat, antara lain pada : jumlah bank yang beroperasi (bank umum dan BPR), total asset, total Dana Pihak Ketiga (DPK), serta jumlah kredit yang disalurkan.

1.9.1.5 Komponen Pertanian

Sebagai daerah yang 96%-nya merupakan perairan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang besar pada sektor perikanan. Hal ini ditunjukkan dari besarnya kontribusi sub-sektor perikanan pada pembentukan PDRB daerah yaitu sebesar 3,77% pada tw.III-2006. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala pengembangan potensi tersebut seperti masih maraknya praktek *illegal fishing* dan *illegal logging* serta rusaknya terumbu karang yang dapat mengganggu kestabilan ekosistem sehingga menurunkan kualitas alam itu sendiri.¹²

Gubernur Provinsi Kepri – H. Ismeth Abdullah memiliki komitmen untuk memajukan taraf hidup dan perekonomian kalangan masyarakat pesisir dan nelayan di Provinsi Kepri. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri mengalokasikan dananya untuk penguatan modal kalangan nelayan, tambak, dan budi daya ikan.

¹¹ meliputi Bank Indonesia (BI) dan bank umum pemerintah & swasta serta BPR

¹² Disampaikan pada laporan kegiatan di daerah Provinsi Kepulauan Riau oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah – RI

Sementara itu, Kabupaten Bintan juga memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian dan peternakan. Untuk itu, pada tahun 2006 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Provinsi Kepri telah mengajukan beberapa program terkait sektor tersebut diatas. Antara lain adalah program penggemukan 1000 ekor sapi unggulan dengan alokasi dana mencapai Rp.10 miliar, serta pengembangan budidaya sayuran kualitas ekspor. Sebagaimana diuraikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Provinsi Kepri – Drs. Said Ja'afar, disebutkan bahwa wilayah Bintan sangat potensial untuk pengembangan budidaya sayuran kualitas ekspor tersebut. Hal ini didukung oleh lokasi wilayah, serta tingkat kesuburan tanah.

Terkait dengan pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia, Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan departemen kelautan dan perikanan dalam upaya pemberdayaan KKMB di bidang kelautan dan perikanan. Uraian lebih lengkap dapat dilihat di Boks – IV.

BOKS – IV **PENANDATANGANAN MoU PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI SHIPYARD DI PULAU KARIMUN**

Terkait dengan penunjukkan daerah Tanjung Balai Karimun sebagai salah satu wilayah yang menerapkan sistem *Special Economic Zone* (SEZ) khususnya di galangan kapal (*shipyard*), Pemerintah Daerah Karimun telah mempersiapkan lahan seluas 500 Ha. Hal ini bertujuan untuk mendukung investor yang akan menanamkan modalnya dan ikut membangun proyek galangan kapal. Disamping itu juga telah dibangun berbagai sarana infrastruktur, diantaranya akses jalan transportasi sepanjang 17 km², alokasi luas areal reklamasi seluas 281 Ha, dan kondisi alam maupun perairan yang termasuk dalam alur perdagangan internasional. Hal ini diungkapkan Bupati Karimun – Nurdin Basirun dalam presentasinya di hadapan sejumlah pengusaha *shipyard* yang tergabung dalam Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) di Gedung Serra Guna Karimun pada hari Rabu-15 November 2006.

Pada kesempatan itu berlangsung penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Karimun, BSOA, dan Kadin Provinsi Kepri dan disaksikan oleh Gubernur Provinsi Kepri – Ismeth Abdullah dan 26 wakil perbankan di wilayah Provinsi Kepri.

Negara yang sudah menyatakan minatnya investasi di bidang *shipyard* antara lain Korea dan Dubai. Untuk menarik investor, Pemkab Karimun menawarkan insentif diantaranya membebaskan pungutan pajak daerah, pajak ekspor, impor, bea masuk, dan berbagai pungutan pajak lainnya.

Adapun potensi investasi yang ditawarkan oleh Pemkab Karimun selain *shipyard* adalah pertanian dan kelautan, dimana kondisi tanah di pulau tersebut dikenal sangat subur dan banyak ditumbuhi pohon karet. Sementara itu potensi laut terkenal dengan kekayaan kandungan lautnya berupa ikan dan menjadi salah satu wilayah pengembangan budidaya ikan.

Terkait dengan penerapan SEZ di Karimun, selain prasarana infrastruktur yang memadai, sektor pembiayaan perbankan juga menjadi salah satu faktor yang mendukung. Oleh karena itu, penandatanganan MoU tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Bank Indonesia dimana kehadiran wakil perbankan kali ini akan dapat melihat langsung kesiapan Karimun SEZ. Selanjutnya, sektor perbankan akan memberikan kemudahan pinjaman kepada pengusaha yang akan menanamkan modalnya di Karimun. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia mengharapkan agar pihak Pemerintah Daerah menyusun program kerja yang akan dapat menguraikan dan menggali informasi mengenai potensi-potensi di wilayah Provinsi Kepri terutama wilayah Batam-Bintan-Karimun sehingga pihak perbankan dapat mengetahui potensi-potensi pembiayaan yang terdapat di daerah.

1.9.2 Sisi Permintaan / Penggunaan

PDRB menurut penggunaan diperoleh dengan menghitung seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi oleh berbagai golongan masyarakat, meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan barang modal tetap bruto (PMTB), perubahan stok, dan ekspor neto.

Selama tw.III-2006 pertumbuhan terbesar terdapat pada komponen pembentukan barang modal tetap bruto (PMTB) sebesar 2,08% (q-t-q), diikuti oleh pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 2,03%, dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar 1,86%.

PMTB mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri/wilayah dan barang modal baru atau bekas dari luar negeri/wilayah yang digunakan untuk memproduksi di dalam negeri/wilayah.

1.10 Perkembangan Ekspor dan Impor di Wilayah Kerja Batam

Total ekspor non-migas dari wilayah Batam selama periode Januari s/d September 2006 sebesar US\$. 4.096.952.148 dengan volume ekspor berjumlah 17.319.594.543 kg. Komponen yang memiliki nilai ekspor terbesar adalah komponen *capital goods parts and accesories* (US\$. 1.404.994.706), sedangkan komponen yang memiliki volume ekspor terbesar adalah komponen *Industrial Supplies Not Elsewhere Specified* (16.291.819.837 kg).

Sementara itu total impor non-migas ke wilayah Batam selama periode Januari s/d September 2006 sebesar US\$.696.321.590 dengan volume impor berjumlah 697.291.580 kg. Komponen yang memiliki nilai serta volume impor terbesar tersebut adalah komponen *Industrial Supplies Not Elsewhere Specified (Processed)*. Total impor yang tercatat di wilayah Batam bernilai tidak terlalu besar karena status Batam sebagai wilayah khusus (sebagai wilayah *Free Trade Zone – FTZ*, yang selanjutnya menjadi *Bonded Zone Plus – BZP*, dan saat ini sebagai *Special Economic Zone – SEZ*) menyebabkan proses masuknya barang ke dalam wilayah pabean RI melalui Batam tidak dicatat sebagai impor.

Secara nasional, nilai ekspor bulan Januari s/d bulan September 2006 mencapai US\$. 74,06 miliar atau meningkat 17,26% dibandingkan periode yang sama tahun 2005 (US\$. 63,16 miliar). Sedangkan selama bulan Januari – September 2006 nilai impor Indonesia mencapai US\$.51,77 miliar, menurun 2,76% dibandingkan periode yang sama tahun 2005 (y-o-y) sebesar US\$.53,20 miliar.

Bab 2

Perkembangan Inflasi¹⁴

2.1 KONDISI UMUM

Laju pergerakan harga komoditi di Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kota Batam pada tw.III-2006 mengalami inflasi sebesar 1,34%, dan meningkat dibandingkan tw.II-2006 yang tercatat mengalami deflasi sebesar -0,39%. Secara bulanan, inflasi terbesar terjadi pada bulan September sebesar 1,00%, sedangkan pada bulan Juli dan Agustus masing-masing sebesar 0,27% dan 0,07%.

Laju inflasi Kota Batam pada triwulan laporan berada diatas inflasi nasional (1,16%), namun masih dibawah inflasi Pekanbaru yang tercatat sebesar 1,98%. Berdasarkan kelompok komoditi, laju inflasi terbesar terdapat pada kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga dimana pada tw.III-2006 mencapai 14,74%. Besarnya tekanan inflasi tersebut sehubungan dengan tahun ajaran baru khususnya pada bulan Agustus 2006.

Sementara itu, secara tahunan (y-o-y), laju inflasi Kota Batam pada bulan September 2006-September 2005 sebesar 1,00% dan lebih tinggi dibandingkan periode September 2005-September 2004 yang tercatat sebesar 0,02%. Sedangkan tekanan inflasi Kota Batam periode Januari-September 2006 mencapai 2,56% dimana pada tahun 2005 tercatat 4,62%.

Sesuai dengan UU No.3/2004 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mulai Juli 2005, BI mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan moneter yang baru konsisten dengan *Inflation Targeting Framework* (ITF). Pengimplementasian kerangka kerja tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan tata kelola (*governance*) kebijakan moneter dalam mencapai kestabilan harga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Laju inflasi di Kota Batam diukur dengan menggunakan nilai variabel Indeks Harga Konsumen (IHK)¹⁵ yang berfungsi untuk menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Nilai IHK secara nasional dilakukan atas dasar survei bulanan di 45 kota, di pasar tradisional dan modern terhadap 283 – 397 jenis barang / jasa di setiap kota dan secara keseluruhan terdiri dari 742 komoditas.

¹⁴ Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus (dikutip dari Boediono, *Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.5; Teori Moneter, BPFE-1982 Bab VIII*)

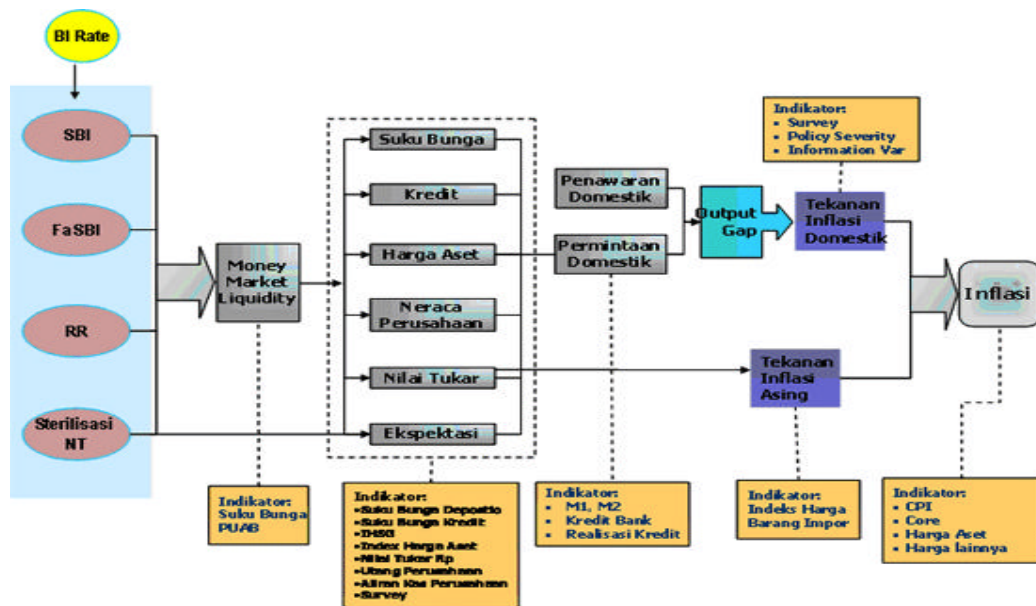
¹⁵ Uraian IHK selengkapnya dapat dilihat di Boks - VI

BOKS – V

PERAN KEBIJAKAN MONETER UNTUK MENGENDALIKAN INFLASI

Tugas Bank Indonesia tidak sepenuhnya efektif dalam mengendalikan inflasi, terutama tekanan inflasi yang berasal dari sisi penawaran (*cost push inflation*). Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dapat mempengaruhi inflasi dari sisi permintaan, seperti investasi dan konsumsi masyarakat. Misalnya, kenaikan suku bunga dapat memperlambat pengeluaran masyarakat dan pemerintah sehingga dapat menurunkan permintaan secara keseluruhan yang pada akhirnya dapat menurunkan inflasi. Selain itu, kenaikan suku bunga ini dapat menguatkan nilai tukar melalui peningkatan *interest rate differential*. Demikian juga, BI dapat mempengaruhi ekspektasi masyarakat melalui kebijakan yang konsisten dan kredibel. Harapannya adalah sasaran (target) inflasi BI diacu oleh masyarakat dan pelaku ekonomi sehingga inflasi yang terjadi dapat sama atau mendekati sasaran inflasi. Apabila kondisi ini terjadi, maka biaya pengendalian moneter dapat diminimalkan.

Secara teori, kebijakan moneter dapat ditransmisikan melalui berbagai jalur (*channel*), yaitu jalur suku bunga, jalur kredit perbankan, jalur neraca perusahaan, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Dengan melewati jalur-jalur tersebut, kebijakan moneter akan ditransmisikan dan berpengaruh ke sektor finansial dan sektor riil setelah beberapa waktu lamanya (*lag of monetary policy*)*.



Selain kebijakan moneter yang bersifat "langsung" seperti di atas, bank sentral juga dapat mempengaruhi tujuan akhirnya secara "tidak langsung", yaitu melalui berbagai regulasi dan himbauan (*moral suassion*) kepada sektor perbankan guna mempercepat mekanisme transmisi kebijakan moneter.

Dalam melaksanakan pengendalian moneter Bank Indonesia diberikan kewenangan dalam menggunakan instrumen moneter berupa tetapi tidak terbatas pada (i) Operasi Pasar Terbuka (*open market operation*), (ii) penetapan tingkat diskonto (*discount rate*), (iii) penetapan Giro Wajib Minimum (*minimum reserve requirement*), dan (iv) pengaturan kredit atau pembiayaan.

*Berdasarkan penelitian terkini di Bank Indonesia, lag of monetary policy berkisar antara 4 s.d 6 triwulan.

2.2 LAJU INFLASI/DEFLASI BULANAN (m-t-m)

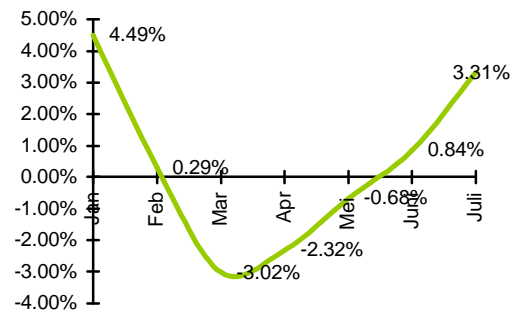
Selama tw.III-2006, pergerakan harga kelompok komoditi di Kota Batam cenderung stabil dimana laju pergerakan harga pada bulan Juli, Agustus, dan September 2006 tidak terlalu berfluktuasi, yaitu masing-masing sebesar 1,21%, 0,07%, dan 1,00%.

2.2.1 LAJU INFLASI/DEFLASI BULAN JULI 2006

Pada bulan Juli 2006, pergerakan harga komoditi di Kota Batam cenderung meningkat terhadap bulan sebelumnya, sehingga terjadi inflasi sebesar 1,21%. Sementara itu secara nasional, terjadi inflasi sebesar 0,45%. Faktor utama penyebab terjadinya inflasi di Kota Batam pada bulan ini adalah tekanan laju pergerakan harga bahan makanan (3,31%), dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau (1,59%).

Inflasi bulanan **kelompok bahan makanan** mencapai 3,31%, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,84%. Pendorong dominan penurunan harga kelompok ini adalah sub-kelompok sayur-sayuran (12,84%); kelompok daging & hasil-hasilnya (8,49%); kelompok ikan segar (5,77%).

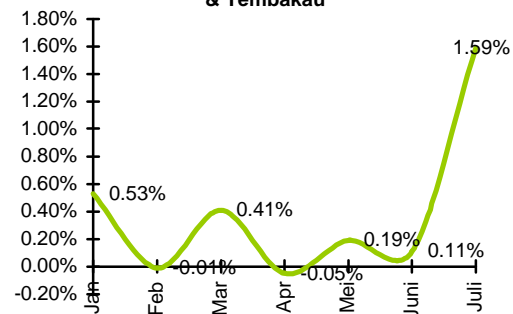
Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau pada bulan Juli 2006 mengalami inflasi sebesar 1,59% dan meningkat dibandingkan bulan Juni 2006 yang sebesar 0,11%. Pendorong terbesar terjadinya inflasi pada kelompok ini adalah sub-kelompok tembakau & minuman beralkohol sebesar 4,34%.

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Makanan jadi, Minuman, Rokok & Tembakau

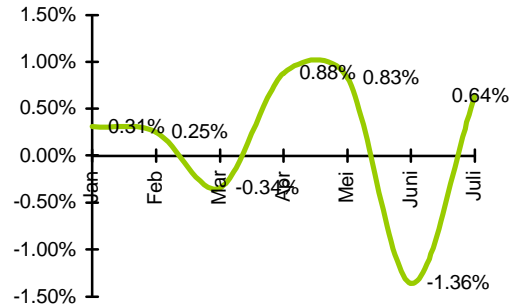


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar pada bulan Juli 2006 mengalami inflasi sebesar 0,12% dan relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya.

Kelompok sandang bulan Juli 2006 mengalami inflasi sebesar 0,64% dan meningkat dibandingkan laju pergerakan harga bulan lalu yang mengalami deflasi sebesar 1,36%. Penyumbang terbesar terhadap pembentukan inflasi berasal dari sub-kelompok barang pribadi dan sandang lainnya sebesar 2,90%.

Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Sandang



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pada bulan Juli 2006, dari 45 kota di Indonesia yang diamati perkembangan harganya, sebanyak 39 kota mengalami kenaikan harga (inflasi) dan 6 kota mengalami penurunan harga (deflasi). Inflasi tertinggi terjadi di Palu sebesar 3,65% dan inflasi terendah di Kota Surakarta sebesar 0,02%. Deflasi terbesar terjadi di Kota Lhokseumawe sebesar -3,05% dan deflasi terkecil di Kota Palangkaraya sebesar -0,03%.

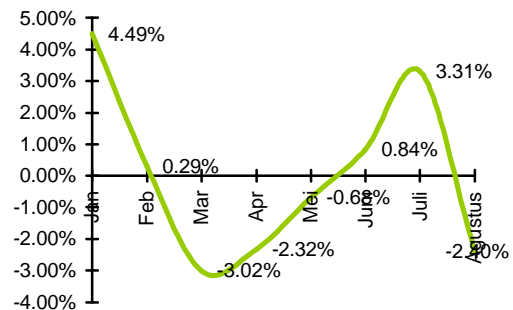
Kota Batam mengalami inflasi sebesar 1,21% pada bulan Juli 2006 dan memberikan sumbangan sebesar 1,72% terhadap pembentukan inflasi nasional.

2.2.2 LAJU INFLASI/DEFLASI BULAN AGUSTUS 2006

Pada bulan Agustus 2006, pergerakan harga komoditi di Kota Batam masih mengalami peningkatan meskipun cenderung melambat dibandingkan Juli 2006, dimana laju inflasi Agustus 2006 tercatat sebesar 0,07%. Sementara itu secara nasional, terjadi inflasi sebesar 0,33%. Faktor utama penyebab terjadinya inflasi di Kota Batam pada bulan ini adalah peningkatan laju pergerakan harga pendidikan, rekreasi & olahraga sebesar 14,62%. Sementara itu, kelompok bahan makanan mengalami penurunan harga sebesar 2,40% terhadap bulan sebelumnya.

Deflasi bulanan **kelompok bahan makanan** mencapai 2,40%, menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,31%. Pendorong dominan penurunan harga kelompok ini adalah sub-kelompok sayur-sayuran (12,28%); sub-kelompok bumbu-bumbuan (4,24%); dan sub-kelompok ikan segar (3,19%).

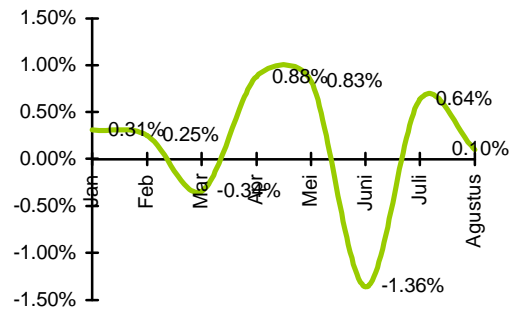
Grafik 2.4 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Kelompok Sandang pada bulan Agustus 2006 mengalami inflasi sebesar 0,10% dan menurun dibandingkan bulan Juli 2006 yang sebesar 0,64%. Pendorong terbesar terjadinya inflasi pada kelompok ini adalah sub-kelompok sandang wanita sebesar 0,44%.

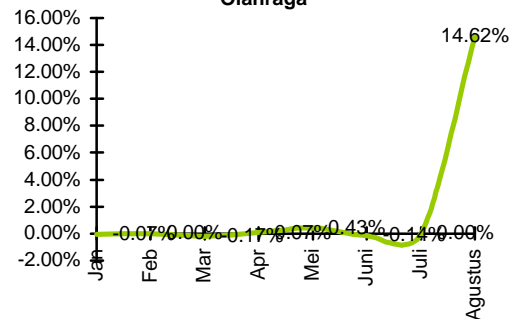
Grafik 2.5 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Sandang



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga bulan Agustus 2006 mengalami inflasi yaitu sebesar 14,62% dan meningkat cukup signifikan dibandingkan bulan lalu yang mengalami inflasi sebesar 0,00%. Penyumbang terbesar terhadap pembentukan inflasi berasal dari sub-kelompok jasa pendidikan sebesar 30,02%. Peningkatan laju pergerakan harga pada kelompok ini disebabkan adanya tahun ajaran baru.

Grafik 2.6 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pada bulan Agustus 2006, dari 45 kota di Indonesia yang diamati perkembangan harganya, sebanyak 29 kota mengalami kenaikan harga (inflasi) dan 16 kota mengalami penurunan harga (deflasi). Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 3,65% dan inflasi terendah di Kota Cirebon sebesar 0,02%. Deflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar -3,05% dan deflasi terendah di Jember sebesar -0,03%.

Adapun Kota Batam mengalami inflasi sebesar 0,07% pada bulan Agustus 2006 dan memberikan sumbangan sebesar 1,72% terhadap pembentukan inflasi nasional.

2.2.3 LAJU INFLASI/DEFLASI BULAN SEPTEMBER 2006

Pada bulan September 2006, pergerakan harga komoditi di Kota Batam cenderung meningkat, sehingga terjadi inflasi sebesar 1,00%. Sementara itu secara nasional, terjadi inflasi sebesar 0,38%. Faktor utama penyebab terjadinya inflasi di Kota Batam pada bulan September

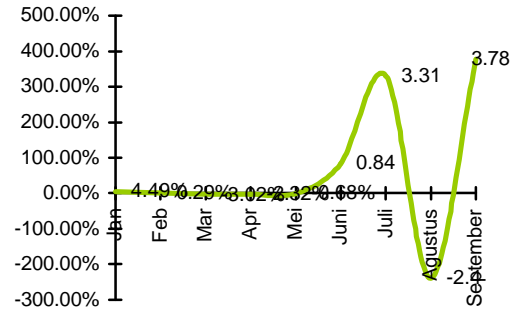
adalah peningkatan laju pergerakan harga bahan makanan yang cukup signifikan (3,79%), meskipun terdapat penurunan laju pergerakan harga pada beberapa kelompok komoditi, yaitu : kelompok sandang sebesar -0,96%, serta kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga sebesar 0,12%.

Inflasi bulanan **kelompok bahan makanan** mencapai 3,78%, meningkat cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang terjadi deflasi sebesar -2,40%. Pendorong dominan peningkatan harga kelompok ini adalah sub-kelompok daging & hasil-hasilnya (2,47%); sub-kelompok ikan segar (1,92%); sub-kelompok sayur-sayuran (29,28%); sub-kelompok kacang-kacangan (3,96%) dan sub-kelompok lemak dan minyak (2,16%).

Kelompok Sandang pada bulan September 2006 mengalami deflasi sebesar -0,96% dan menurun dibandingkan bulan Agustus 2006 yang terjadi inflasi sebesar 0,10%. Pendorong terbesar terjadinya deflasi pada kelompok ini adalah sub-kelompok sandang anak-anak dan barang pribadi dan sandang lain.

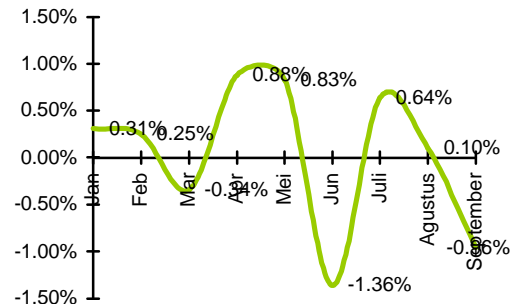
Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga bulan September 2006 mengalami inflasi sebesar 0,12% dan menurun cukup signifikan dibandingkan bulan lalu yang mengalami inflasi sebesar 14,62%. Penyumbang terbesar terhadap pembentukan inflasi berasal dari sub-kelompok jasa pendidikan sebesar 0,20%.

Grafik 2.7 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan



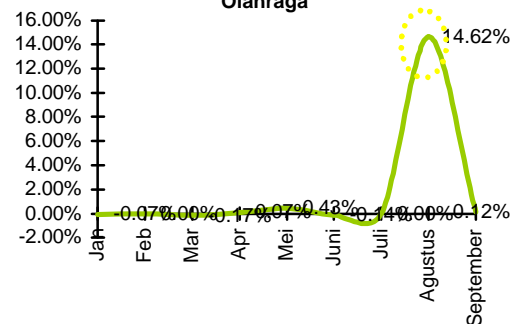
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 2.8 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Sandang



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 2.9 Perkembangan Inflasi Bulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Pada bulan September 2006, dari 45 kota di Indonesia yang diamati perkembangan harganya, sebanyak 39 kota mengalami kenaikan harga (inflasi) dan 6 kota mengalami penurunan harga (deflasi), yaitu : Kupang, Balikpapan, Palu, Makassar, Ambon dan Jayapura.l

Kota Batam mengalami inflasi sebesar 1,00% pada bulan September 2006 dan memberikan sumbangan sebesar 1,72% terhadap pembentukan inflasi nasional.

2.3 LAJU INFLASI/DEFLASI TRIWULANAN (q-t-q)

Secara triwulanan, laju pergerakan harga komoditi di Kota Batam cenderung mengalami percepatan (inflasi) sebesar 2,28%. Hal ini disebabkan oleh inflasi pada bulan Juli dan September 2006 yang cukup besar dan berada diatas laju inflasi nasional.

Tabel 2.1
Perkembangan Laju Inflasi di Kota Batam Tahun 2006

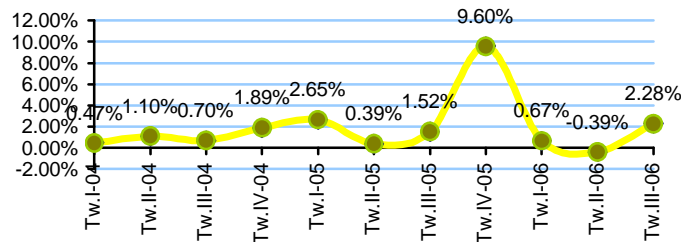
Kelompok Komoditi	Tw.I	Apr	Mei	Jun	Tw.II	Jul	Ags	Sep	Tw.III
Umum	0.67	(0.56)	(0.02)	0.19	(0.39)	1.21	0.07	1.00	2.28
1. Bahan Makanan	1.76	(2.32)	(0.68)	0.84	(2.16)	3.31	(2.40)	3.79	4.70
2. Makanan jadi, rokok & tembakau	0.93	(0.05)	0.19	0.11	0.25	1.59	0.99	0.30	2.88
3. Perumahan, air, gas & bhn bakar	0.14	0.03	0.19	0.02	0.24	0.12	0.00	0.01	0.13
4. Sandang	0.22	0.88	0.83	(1.36)	0.35	0.64	0.10	(0.96)	(0.22)
5. Kesehatan	0.56	0.12	0.00	0.32	0.44	0.02	0.06	0.00	0.08
6. Pendidikan, rekreasi & olahraga	(0.24)	0.07	0.43	(0.14)	0.36	0.00	14.62	0.12	14.74
7. Transport, Komunikasi & jasa keu	0.10	0.00	0.12	(0.01)	0.11	0.00	0.27	0.00	0.27

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data pada tabel 2.1 terlihat bahwa terdapat kecenderungan peningkatan laju pergerakan tingkat harga komoditi di Kota Batam secara triwulanan yaitu dari 0,67% (tw.I-2006) menjadi -0,39% (tw.II-2006), dan 2,28% pada tw.III-2006. Peningkatan harga ini sebagian besar dipengaruhi oleh kelompok bahan makanan yang meningkat cukup signifikan yaitu dari 1,76% (tw.I-2006) menjadi -2,16% (tw.II-2006) dan pada tw.III-2006 sebesar 4,70%. Sementara itu, kelompok sandang mengalami deflasi sebesar 0,22% pada tw.III-2006.

Pada tw.III-2006, tingkat inflasi tertinggi terdapat pada kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga yang mencapai 14,74%.

Grafik 2.10 Perkembangan Harga Komoditi di Kota Batam



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Dari grafik 2.10 diatas terlihat bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir Kota Batam selalu mengalami inflasi, sedangkan deflasi baru terjadi pada tw.II-2006.

2.4 SURVEI KEGIATAN DUNIA USAHA (SKDU)¹⁶

Pelaksanaan survei kegiatan dunia usaha bertujuan untuk mendapatkan informasi dini mengenai indikasi perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil, dimana hasil survei merupakan salah satu pendekatan/proksi kegiatan usaha, disamping sebagai salah satu komponen/variabel pembentuk *leading economy indicator*. Adapun responden pada survei tersebut adalah perusahaan yang termasuk menengah ke atas berdasarkan nilai produksi/penjualan/penghasilan operasional/jumlah tenaga kerjanya. Pengambilan sampel untuk kegiatan ini dilakukan dengan metode *stratified purposive sampling*. Dimana stratifikasi berdasarkan sektor ekonomi, daerah/regional, nilai usaha yang diukur dari produksi/penjualan/penghasilan operasional/jumlah tenaga kerjanya.

Secara umum, kegiatan dunia usaha pada tw.II-2006 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (diwakili oleh Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang) sedikit mengalami peningkatan setelah sebelumnya mengalami berbagai tantangan akibat kondisi perekonomian makro yang kurang kondusif. Saat ini perekonomian Indonesia umumnya, dan Kepulauan Riau khususnya berangsur-angsur mulai menunjukkan pemulihan kearah yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan pada jawaban responden dimana hampir semua sektor sudah mulai meningkatkan produksinya yang sebelumnya sebagian besar responden merasakan dampak yang cukup berat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak pada tw.IV-2005.

Berdasarkan hasil SKDU, para pengusaha di wilayah Batam dan Tanjung Pinang memperkirakan laju inflasi pada tw.III-2006 secara rata-rata sebesar 9% (y-o-y), meningkat dibandingkan prakiraan inflasi triwulan sebelumnya (7,6%).

¹⁶ pelaksanaan survey kegiatan dunia usaha (SKDU) dilakukan setiap triwulanan dan merupakan kerjasama BI dengan BPS Provinsi Kepri.

Bab 3

Perkembangan Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran

3.1 KONDISI UMUM

Kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2006 menunjukkan peningkatan yang cukup stabil setiap triwulannya. Peningkatan kinerja tersebut tercermin dari angka pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 secara triwulanan meningkat sebesar 1,68% (q-t-q) pada tw.III-2006. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku secara triwulanan meningkat sebesar 2,82%, angka tersebut lebih rendah dibanding pertumbuhan PDRB pada tw.II-2006 yang mencapai 3,06%. Sementara itu, jumlah uang giral dan uang kuasi di wilayah kerja KBI Batam pada tw.III-2006 juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, demikian pula dengan indikator-indikator perbankan, seperti: total aset, Dana Pihak Ketiga dan penyaluran kredit oleh perbankan. Di bidang sistem pembayaran, transaksi tunai selama tw.III-2006 di Provinsi Kepulauan Riau mengalami *net outflow* sebesar Rp.450,73 miliar, sedangkan transaksi non-tunai melalui kegiatan kliring di wilayah kerja KBI Batam mencapai Rp.2,584 triliun (134.863 lembar).

3.2 MONETER

Dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap kondisi makro ekonomi Indonesia serta prospek ekonomi moneter ke depan, pada tw.III-2006 Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI Rate dari 12,25% (6 Juli 2006) menjadi 11,75% (8 Agustus 2006) dan 11,25% (5 September 2006). Langkah yang dilakukan oleh otoritas moneter ini masih dalam kerangka upaya pencapaian sasaran inflasi ke depan yaitu $8\% \pm 1\%$ untuk tahun 2006. Sementara itu, pada 5 Oktober 2006 Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 50 bps dari 11,25% menjadi 10,75%. Keputusan ini diambil dengan melihat kondisi perekonomian Indonesia yang semakin membaik sampai dengan tw.III-2006 disertai dengan stabilitas makroekonomi dan keuangan yang tetap terjaga. Pada tw.III-2006 perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 5,40%, meningkat dibandingkan triwulan I dan II yang masing-masing tumbuh sebesar 4,70% dan 5,22%. Membaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh tingginya konsumsi Pemerintah dan net ekspor. Konsumsi swasta juga mengindikasikan pertumbuhan yang meningkat meski belum terlalu kuat. Investasi swasta, khususnya non-bangunan, belum memperlihatkan tanda perbaikan yang signifikan. Di sisi penawaran, Sektor Bangunan dan

Sektor Pengangkutan & Komunikasi terus menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, dan diperkirakan akan diikuti laju pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sementara itu, inflasi sampai dengan September tetap terkendali dan terus menurun. Inflasi bulan September tercatat sebesar 0,38% sehingga inflasi tahun kalender (Januari-September) mencapai 4,06% sedangkan inflasi *year on year* sebesar 14,55%.

Tabel 3.1
Perkembangan Uang Giral dan Kuasi di Wilker KBI Batam

(dalam miliar rupiah)

Ket	2005				2006		
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III
Uang Giral	3.106,07	3.183,28	3.262,74	3.524,56	3.429,73	4.435,88	4.988,06
Giro	3.106,07	3.183,28	3.262,74	3.524,56	3.429,73	4.435,88	4.988,06
Uang Kuasi	4.700,43	4.937,68	5.111,04	5.182,59	5.122,77	6.104,83	6.146,31
Tabungan	3.084,28	3.132,15	3.040,04	3.013,30	2.819,91	3.089,24	3.211,56
Deposito	1.616,15	1.805,53	2.070,10	2.169,29	2.302,86	2.725,13	2.934,75
Total	7.806,50	8.120,96	8.373,78	8.707,15	8.552,49	10.450,71	11.134,37

Sumber : Bank Indonesia

Dana masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang disimpan dalam bentuk giral dan kuasi menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu jumlah uang kuasi pada tw.III-2006, menunjukkan adanya peningkatan sebesar 41,48 miliar (0,68%) dibandingkan tw.II-2006. Peningkatan jumlah uang kuasi tersebut diiringi oleh peningkatan uang giral dimana sampai dengan tw.III-2006 sebesar 552,18 miliar (12,45%). Secara total jumlah uang giral dan uang kuasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebesar 683,66 miliar (6,54%) dibandingkan triwulan sebelumnya.

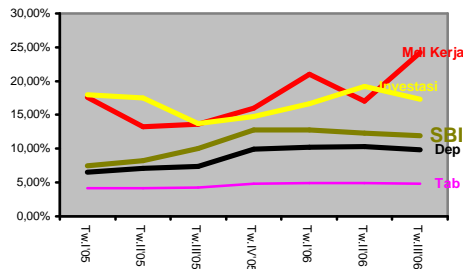
Suku bunga simpanan menunjukkan pergerakan yang cenderung meningkat. Untuk tw.III-2006 rata-rata suku bunga simpanan berjangka 3 bulan mencapai 9,82% dan sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 10,25%, tingkat suku bunga tabungan sebesar 4,81%, dan tingkat suku bunga kredit modal kerja serta kredit investasi masing-masing sebesar 24,21% dan 17,34%. Perkembangan suku bunga perbankan di wilker KBI Batam dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perkembangan Suku Bunga (%)

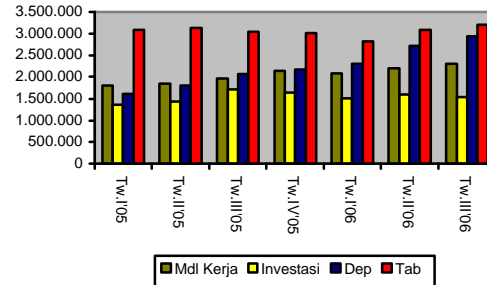
Keterangan	2004			2005				2006		
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw. II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw. II	Tw. III
SBI 1 bulan	7,34	7,39	7,43	7,44	8,25	10	12,75	12,75	12,25	11,94
DPK *)										
Tabungan	4,47	4,36	4,34	4,14	4,16	4,23	4,75	4,86	4,85	4,81
Dep 3 bln	7,5	8,41	6,73	6,47	7,03	7,31	9,89	10,20	10,25	9,82
Kredit *)										
Mdl Krj	17,75	17,88	17,88	17,62	13,25	13,62	15,98	21,00	16,99	24,21
Investasi	17,75	18		18	17,53	13,71	14,76	16,64	19,20	17,34

Sumber : Bank Indonesia *) angka diperbaiki

Grafik 3. 1a Perkembangan Tingkat Suku Bunga



Grafik 3. 1b. Perkembangan DPK dan Kredit



Berdasarkan grafik diatas dasar nilai rata-rata, terjadi penurunan suku bunga simpanan dalam bentuk tabungan, namun sebaliknya, suku bunga kredit justru mengalami peningkatan khususnya pada kredit modal kerja. Hal ini sebagai respon dunia perbankan terhadap penurunan BI-rate.

3.3 PERBANKAN

Indikator-indikator perbankan di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tw.III-2006 menunjukkan peningkatan. Jumlah jaringan kantor Bank Umum sebanyak 38 kantor pada triwulan laporan. Sedangkan jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih tetap 10 (sepuluh) kantor. Selain itu, saat ini ada 4 (empat) BPR yang sedang dalam proses perijinan untuk pendiriannya.

Total *asset*, jumlah dana masyarakat yang dihimpun serta total kredit yang diberikan oleh perbankan menunjukkan *trend* peningkatan jika dibanding tw.II-2006. Peningkatan total *asset* serta jumlah dana masyarakat yang dihimpun mengindikasikan kembalinya kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan. *Trend* peningkatan yang terjadi pada setiap triwulan ini menunjukkan masyarakat sudah mulai yakin untuk menyimpan dan menginvestasikan dananya di sektor perbankan. Setelah krisis yang terjadi tahun 1998, masyarakat berangsur-angsur kembali memberikan kepercayaan kepada perbankan untuk mengelola dana mereka. Kepercayaan masyarakat ini diperkuat dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang akan menjamin keamanan dana yang mereka simpan di perbankan.

Tabel 3.3
Perkembangan Indikator Perbankan di Wilker KBI Batam

(juta rupiah)

Indikator	Periode							
	2004	2005				2006		
		Tw.I	Tw.II	Tw. III	Tw. IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III
1. Jaringan BU	32	34	33	33	33	36	38	38
a. Batam	21	23	23	23	23	24	24	24
b. Tj. Pinang	7	7	7	7	7	9	11	11
c. Karimun	3	3	2	2	2	2	2	2
d. Natuna	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Jaringan BPR	4	5	8	9	10	10	10	10
a. Batam	3	4	6	6	7	7	7	7
b. Tj. Pinang	-	-	1	2	2	2	2	2
c. Karimun	1	1	1	1	1	1	1	1
d. Natuna	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Total Asset	9.427.598	9.316.232	9.715.095	10.213.912	10.666.450	10.559.530	12.173.496	13.115.164
a. Batam	6.703.118	7.077.782	7.601.663	8.022.161	8.188.109	8.160.702	9.131.399	9.421.420
b. Tj. Pinang	1.749.929	1.718.356	1.718.891	1.768.540	1.950.983	1.907.064	2.240.879	2.650.857
c. Krimn&Natuna	442.855	406.736	267.007	271.785	311.01	281.865	345.781	1.042.887 *)
d. Natuna	104.6	113.358	127.534	151.426	216.348	209.899	455.437	-
4. Total DPK	7.721.045	7.806.495	8.120.960	8.373.778	8.707.149	8.552.495	10.250.252	11.134.372
a. Batam	5.458.347	5.599.666	6.049.847	6.224.301	6.269.948	6.178.643	7.197.490	7.606.786
b. Tj. Pinang	1.724.321	1.692.427	1.678.209	1.728.343	1.916.705	1.884.600	2.249.608	2.477.426
c. Karimun	437.779	400.665	263.969	268.182	306.791	279.067	343.947	345.887
d. Natuna	100.598	113.737	128.935	152.952	213.705	210.185	459.207	704.273
5. Total Kredit	4.397.899	4.761.130	5.104.373	5.685.474	5.877.399	5.771.562	6.118.262	6.258.180
a. Batam	3.763.287	4.121.633	4.465.106	4.988.122	5.138.278	5.029.911	5.302.606	5.266.622
b. Tj. Pinang	498.143	501.424	521.712	571.737	607.85	604.457	657.171	819.222
c. Karimun	120.798	120.94	97.217	102.511	108.393	111.945	125.964	136.633
d. Natuna	15.671	17.133	20.338	23.104	22.878	25.249	32.521	35.703
6. LDR	56,96%	60,99%	62,85%	63,68%	67,50%	67,48%	59,69%	56,21%
a. Batam	68,95%	73,60%	73,81%	74,90%	81,95%	81,41%	72,67%	69,24%
b. Tj. Pinang	28,89%	29,63%	31,09%	30,63%	31,71%	32,07%	29,43%	33,07%
c. Karimun	27,59%	30,18%	36,83%	38,25%	35,33%	40,11%	36,62%	39,50%
d. Natuna	15,58%	15,06%	15,77%	16,49%	10,71%	12,01%	7,08%	5,07%
7. NPL's	2,67%	2,72%	4,12%	4,56%	6,01%	4,27%	5,43%	4,83%
a. Batam	2,84%	2,85%	4,43%	3,80%	5,17%	3,14%	2,01%	3,62%
b. Tj. Pinang	1,94%	2,13%	2,24%	12,09%	14,28%	14,65%	9,11%	12,76%
c. Karimun	0,81%	0,86%	0,99%	1,21%	0,69%	0,19%	4,18%	4,87%
d. Natuna	0,15%	0,14%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : Bank Indonesia

Ket: *) termasuk Natuna

Kinerja perbankan di wilayah kerja KBI Batam cukup baik pada triwulan laporan, dimana jumlah penghimpunan dana oleh bank umum lebih besar dibandingkan jumlah penyaluran kredit. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan di Provinsi Kepulauan Riau masih belum optimal. Meskipun jumlah kredit yang diberikan oleh perbankan meningkat, namun tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada triwulan laporan justru mengalami *trend* penurunan sebesar 3,48% dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena peningkatan total kredit lebih kecil daripada peningkatan total dana masyarakat yang berhasil dihimpun. Kecenderungan ini juga sebagaimana yang terjadi pada perbankan secara nasional, dimana tingkat LDR perbankan nasional mengalami penurunan dari 64,8% (tw.II-2006) menjadi 64,7% (tw.III-2006). Keengganan dunia perbankan menyalurkan kredit ini akan berpengaruh pada pertumbuhan dunia usaha, terutama yang pendanaannya berasal dari perbankan.

Sementara itu, terdapat perbaikan pada tingkat *Non Performing Loan* (NPL) di wilayah kerja KBI Batam, yaitu dari 5,43% pada tw.II-2006 menjadi 4,83% pada triwulan laporan. Berdasarkan daerah Tk.II, tingkat NPL bank umum di wilker KBI Batam rata-rata mengalami peningkatan, dimana NPL di Tanjung Pinang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan nilai NPL di Provinsi Kepulauan Riau. Dari nilai 9,11% pada tw.II-2006 meningkat menjadi 12,76%.

Peningkatan total nilai NPL di wilayah kerja KBI Batam ini menunjukkan performa dunia usaha yang masih belum optimal. UMKM sebagai salah satu target pemberian kredit perlu dikembangkan agar dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Oleh karena itu KBI Batam sebagai otoritas moneter telah melakukan rapat koordinasi dengan dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). untuk wilayah kerja KBI Batam telah diadakan rapat koordinasi dengan UMKM sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tanggal 20 Februari 2006, 17 Maret 2006, 4 Mei 2006, 16-18 Mei 2006, dan 19 Mei 2006.

BOKS - VI **Kerjasama GUMKI dengan FE - UI Dalam Rangka Pemberdayaan Sektor** **UMKM di Batam**

Keberadaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Batam diharapkan mampu menjadi sektor yang dapat mendukung penerapan *Special Economic Zone* (SEZ) di wilayah Batam-Bintan-Karimun (BBK). Untuk itu Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) bekerja sama dengan Gabungan Usaha Mikro Kecil Indonesia (GUMKI) menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) antara GUMKI dengan FEUI pada tanggal 3 Oktober 2006 di Jakarta dan disaksikan langsung oleh Ketua DPR-RI – Agung Laksono.

Dalam rangka pembinaan UMKM di Batam tersebut, GUMKI akan membuat *pilot project* bagi pelaku UMKM di Star Trade Center (STC) yang berlokasi di Sekupang-Batam. Pemilihan Batam untuk pembinaan UMKM tersebut berkaitan dengan penerapan SEZ di wilayah BBK sehingga melalui kerjasama ini diharapkan pelaku UMKM dapat menjadi pengusaha komoditas ekspor ke mancanegara melalui negara Singapura. Hal ini juga didukung oleh letak Batam yang strategis karena berada dekat dengan negara tetangga. STC sebagai pusat sarana bisnis UMKM akan diisi oleh 500 pelaku UMKM yang berasal dari 6 Kab/Kota di Provinsi Kepri, dimana setiap pelaku usaha yang memiliki tempat usaha akan disubsidi oleh Pemprov Kepri.

UMKM Center FE UI sebagai pihak yang bekerjasama dengan GUMKI akan bertugas untuk memberikan bimbingan manajerial untuk memberdayakan para pelaku UMKM, dan akan dilakukan melalui pendidikan dan latihan.

BI sebagai lembaga otoritas moneter sangat *concern* dan memiliki perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan sektor usaha di Indonesia terutama sektor usaha kecil. Oleh karena itu, program pengembangan UMKM merupakan suatu program kerja yang secara rutin dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Terkait dengan pengembangan sektor UMKM di wilker KBI Batam, sampai dengan saat ini telah dilakukan berbagai kegiatan seperti: Rakor UMKM, Bantuan Teknis UMKM, Bazaar Intermediasi. Disamping itu, BI juga menghimbau kepada perbankan untuk mendukung keberadaan sektor UMKM melalui beberapa cara, seperti *linkage program*. Untuk mendukung pengembangan UMKM, khususnya melalui peran perbankan, dapat dipertimbangkan upaya pemanfaatan dana Pemerintah Daerah yang dialokasikan untuk pemberian kredit kepada sektor UMKM dimana dana Pemda tersebut ditempatkan di Bank Umum maupun BPR dan berfungsi sebagai jaminan atas kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada sektor UMKM. Hal ini akan memberikan beberapa manfaat dan keuntungan, diantaranya adalah: memberikan jaminan kepada Pemda atas tingkat pengembalian kredit mengingat kredit disalurkan oleh perbankan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang kredit, serta memberikan tambahan sumber dana bagi perbankan untuk penyaluran kredit.

Secara geografis, dana simpanan yang masuk ke dunia perbankan di wilayah kerja KBI Batam porsi terbesar berasal dari kota Batam sebesar 7,61 triliun atau 68,32% dari seluruh dana masyarakat yang berhasil dihimpun di Provinsi Kepulauan Riau. Demikian pula kredit yang disalurkan oleh perbankan sebagian besar mengalir ke kota Batam sebesar 5,27 triliun atau 84,16% dari seluruh total kredit yang disalurkan ke masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

3.3.1 Perkembangan Total Asset Bank Umum

Total *asset* bank umum yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam mengalami peningkatan. Sampai dengan tw.III-2006, total *asset* bank umum mencapai Rp.13,12 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 7,74% dibanding tw.II-2006 yang tercatat sebesar Rp. 12,17 triliun.

Komposisi total *asset* perbankan di wilayah kerja KBI Batam masih didominasi oleh kelompok Bank Swasta, dimana kelompok bank ini memiliki total *asset* sebanyak Rp.6,75 triliun atau 51,50% dari seluruh *asset* perbankan di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu kelompok Bank Pemerintah mengumpulkan *asset* sebanyak Rp.4,59 triliun atau sama dengan 35,01% dari seluruh *asset* perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (tidak termasuk BPD Riau).

Demikian juga jika dilihat dari *trend* pertumbuhan, kelompok Bank Swasta menunjukkan kinerja paling baik dimana total *asset* yang dimilikinya meningkat sebesar 8,10% dibandingkan triwulan sebelumnya (506 miliar). Sedangkan total *asset* pada kelompok Bank Pemerintah menurun sebesar 2%.

Meskipun ibukota Provinsi Kepulauan Riau telah pindah ke Tanjung Pinang, namun kegiatan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam. Oleh karena itu jumlah total *asset* perbankan masih tetap terhimpun di Kota Batam. Total *asset* perbankan yang ada di Kota Batam pada tw.III-2006 sebesar 9,42 triliun atau 71,84% dari seluruh total *asset* perbankan di Kepulauan Riau. Sedangkan total *asset* yang berhasil dihimpun oleh perbankan di Tanjung Pinang sebesar 2,65 triliun atau 20,21% dari seluruh total *asset* perbankan di Kepulauan Riau. Sementara itu total *asset* perbankan di wilayah Kepulauan Riau (Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, dan Natuna) sebesar 1,04 triliun (7,95%).

Tabel 3.4
Perkembangan Total Asset Perbankan di Wilker KBI Batam

(MiliarRupiah)

Lokasi	2004			2005				2006			Pertumb (%)	
	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	q-t-q	y-o-y
Kota Batam	5.574	6.142	6.703	7.078	7.602	8.022	8.188	8.161	9.131	9.421	3.18	17.44
Wil.Tj.Pinang	1.672	1.624	1.75	1.718	1.719	1.769	1.951	1.907	2.241	2.651	17,51	49,86
Kepln Riau*)	540	497	547	520	395	423	527	491	801	1.043	29,57	146,57
Total	7.787	8.263	9	9.316	9.716	10.214	10.666	10.559	12.174	13.115	4,81	28,40

Sumber : Bank Indonesia

*) wilayah Kepulauan Riau meliputi Tj.Uban, Kab. Tanjung Balai Karimun dan Kab. Natuna

Namun peningkatan total *asset* terbesar triwulanan (q-t-q) justru terjadi di wilayah Kepulauan Riau sebesar 29,57%, kemudian diikuti Tanjung Pinang (17,51%). Namun untuk Kota Batam terdapat penurunan *asset* sebesar 0,32%. Demikian pula total *asset* secara tahunan (y-o-y), peningkatan terbesar kembali terjadi di Kepulauan Riau sebesar 146,57% atau lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu total *asset* perbankan di Tanjung Pinang mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 49,86% dari tahun sebelumnya. Peningkatan total *asset* tersebut diikuti oleh Kota Batam sebesar 17,44%. Satu hal yang menarik adalah pada triwulan laporan ini terjadi perlambatan pertumbuhan total *asset* di wilayah kerja KBI Batam. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan penyaluran kredit oleh perbankan.

3.3.2 Perkembangan Penghimpunan Dana Bank Umum

Pada tw.III-2006, penghimpunan dana masyarakat pada Bank Umum masih mengalami pertumbuhan, dimana pada triwulan laporan jumlah dana masyarakat mencapai Rp.11,13 triliun atau meningkat sebesar Rp.884,12 miliar (8,63%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun terdapat peningkatan DPK terhadap triwulan sebelumnya, namun persentase pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan tw.II-2006. Hal ini diperkirakan dipengaruhi oleh perayaan hari raya Idul Fitri dimana transaksi masyarakat pada saat itu meningkat yang berpengaruh terhadap dana yang disimpan oleh masyarakat.

Apabila dilihat dari jenis simpanannya, sebagian besar masyarakat di wilayah kerja KBI Batam memilih menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro dan tabungan. Hal ini ditunjukkan dari total dana masyarakat yang ada pada bank umum, sebagian besar berbentuk giro Rp.4,99 triliun atau 44,80% dari total dana simpanan, tabungan sebesar 3,21 triliun (28,84%), dan deposito 2,93 triliun (26,36%). Preferensi masyarakat terhadap giro dan tabungan tersebut antara lain dipengaruhi oleh sektor ekonomi industri dan perdagangan yang masih menjadi sektor utama di Provinsi Kepulauan Riau sehingga masyarakat cenderung membutuhkan dana yang mudah dicairkan untuk kepentingan transaksi ekonomi.

Preferensi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau terhadap giro masih tetap tinggi. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan simpanan jenis giro yang terus meningkat. Simpanan jenis giro menunjukkan *trend* peningkatan terbesar yaitu 12,45%. Peningkatan itu diikuti oleh simpanan jenis deposito sebesar 7,69% dan simpanan jenis tabungan sebesar 3,96%. Untuk *trend* perkembangan dana yang dapat dihimpun oleh bank umum yang berada di wilayah kerja KBI Batam dari tw.I-2005 sampai dengan tw.III-2006 dapat dilihat tabel 3.5.

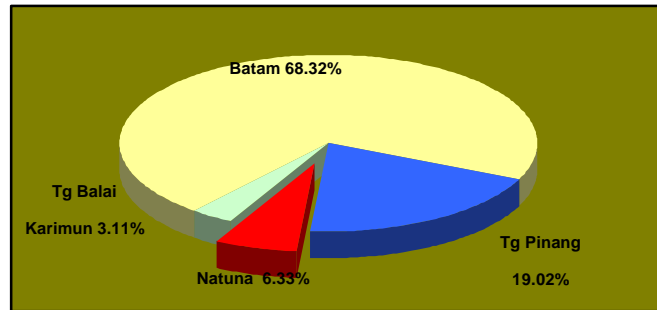
Tabel 3.5
Penghimpunan Dana Bank Umum di Wilker KBI Batam

Keterangan	2005				2006		
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3
Jenis Simpanan:	7,806,495	8,120,960	8,373,778	8,707,149	8,552,495	10,250,252	11,134,372
- Giro	3,106,069	3,183,277	3,262,739	3,524,558	3,429,726	4,435,878	4,988,060
- Tabungan	3,084,279	3,132,152	3,040,044	3,013,300	2,819,911	3,089,243	3,211,560
- Deposito Berjangka	1,616,147	1,805,531	2,070,995	2,169,291	2,302,858	2,725,131	2,934,752
Jenis Bank:							
Bank Pemerintah	2,908,186	3,039,967	3,032,576	3,217,522	3,191,790	3,595,272	3,464,724
- Giro	861,001	869,819	851,339	1,011,615	997,127	1,220,980	1,037,079
- Tabungan	1,478,146	1,536,402	1,487,591	1,494,184	1,423,278	1,540,704	1,560,522
- Deposito Berjangka	569,039	633,746	693,646	711,723	771,385	833,588	867,123
BPD Riau	505,002	573,855	669,662	854,888	809,241	1,263,075	1,780,649
- Giro	346,156	414,541	511,997	627,222	572,038	986,016	1,445,086
- Tabungan	126,946	126,437	124,294	190,101	127,317	135,654	165,738
- Deposito Berjangka	31,900	32,877	33,371	37,565	109,886	141,405	169,825
Bank Swasta	4,393,307	4,507,138	4,671,540	4,634,739	4,551,464	5,391,905	5,888,999
- Giro	1,898,912	1,898,917	1,899,403	1,885,721	1,860,561	2,228,882	2,505,895
- Tabungan	1,479,187	1,469,313	1,428,159	1,329,015	1,269,316	1,412,885	1,485,300
- Deposito Berjangka	1,015,208	1,138,908	1,343,978	1,420,003	1,421,587	1,750,138	1,897,804

Sumber : Bank Indonesia Batam

Kelompok Bank Swasta masih mendominasi peta perbankan di wilayah kerja KBI Batam dalam hal penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Swasta sebesar 5,89 triliun atau 52,89% dari total DPK di wilayah kerja KBI Batam. DPK yang berhasil dihimpun oleh kelompok Bank Swasta ini juga masih menunjukkan peningkatan yang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok Bank Pemerintah. Peningkatan penghimpunan dana masyarakat oleh kelompok Bank Swasta sebesar 9,22%, sedangkan kelompok Bank Pemerintah menurun sebesar 3,63%. Sedangkan dari segi geografis kota Batam masih tetap sebagai kontributor terbesar dari penghimpunan DPK yaitu sebesar 7,61 triliun (68,32%), diikuti oleh Tanjung Pinang sebesar 2,12 triliun (19,02%), Natuna 704 miliar (6,33%) dan Tanjung Balai Karimun sebesar 346 miliar (3,11%).

Grafik 3.2.
Perbandingan Total DPK Bank Umum di Wilker KBI Batam Triwulan III-2006



Sumber : Bank Indonesia

3.3.3 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum

Jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam sampai dengan tw.III-2006 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, dimana jumlah penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank umum pada triwulan laporan mencapai Rp.6,26 triliun. Jika dibandingkan dengan tw.II-2006, jumlah itu meningkat sebesar Rp.139,92 miliar (2,29%), dimana pertumbuhan terbesar terdapat pada kelompok Bank Swasta (3,45%) dan diikuti oleh kelompok Bank Pemerintah (1,24%) terhadap triwulan sebelumnya. Meskipun jumlah penyaluran kredit oleh Bank Umum pada triwulan laporan meningkat terhadap triwulan sebelumnya, namun persentase pertumbuhan kredit lebih rendah dibandingkan persentase pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), sehingga berdampak pada penurunan tingkat *Loan to Deposit Ratio/LDR* Bank Umum yaitu dari 59,69% (tw.II-2006) menjadi 56,21% (tw.III-2006).

Tabel 3.6
Perkembangan Outstanding Kredit Bank Umum di Wilker KBI Batam

(dalam miliar rupiah)

Keterangan	2005				2006			Pertumbuhan
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	
TOTAL	4.761.130	5.104.373	5.685.474	5.877.399	5.771.562	6.118.262	6.258.180	2,29%
- Bank Pemerintah*)	2.832.251	3.014.255	3.132.359	3.202.872	3.139.689	3.216.364	3.256.116	1,24%
- Bank Swasta	1.928.879	2.090.118	2.553.115	2.674.527	2.631.873	2.901.898	3.002.064	3,45%

Sumber : Bank Indonesia

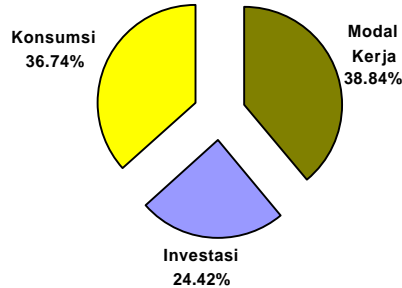
*) termasuk BPD Riau

Tingkat penyaluran kredit yang relatif lebih kecil dari peningkatan DPK tersebut perlu didorong agar bank umum dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit yang disalurkan di wilayah kerja KBI Batam sebagian besar digunakan untuk kredit konsumsi sebesar Rp.2,43 triliun atau 38,84% dari total kredit yang diberikan. Sedangkan kredit untuk modal kerja dan investasi masing-masing

sebesar Rp.2,30 triliun (36,74%) dan Rp.1,53 triliun (24,42%). Untuk komposisi penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan, dapat dilihat pada grafik 3.3.

Grafik 3.3
Komposisi Penyaluran Kredit di Wilker KBI Batam
Triwulan III-2006



Kelompok kredit modal kerja memiliki porsi terbesar pada penyaluran kredit Bank Umum pada tw.III-2006.

Sementara itu, porsi terkecil dimiliki oleh kelompok kredit investasi yaitu sebesar 24,42% dimana besaran ini mengalami penurunan terhadap triwulan sebelumnya. Dari segi pertumbuhan, peningkatan jumlah kredit terbesar pada tw.III-2006 terdapat pada kredit untuk jenis konsumsi yang meningkat sebesar RP.108,38 miliar atau 4,67% dari tw.II-2006. Sementara itu kredit modal kerja meningkat sebesar Rp.99,35 miliar (4,52%). Sedangkan kredit investasi menurun sebesar Rp.67,81 miliar (4,25%). Peningkatan pembiayaan kredit modal kerja yang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kredit konsumsi ini menunjukkan bahwa masih terdapat prospek dan potensi bagi dunia perbankan untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha.

Tabel 3.7
Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum di Wilayah Kerja KBI Batam pada
Triwulan III-2006

(dalam miliar rupiah)

NO	KETERANGAN	2005				2006		
		Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III
1	Kredit Brdsrkn Jenis Penggunaan:	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,877,399	5,771,562	6,118,262	6,258,180
	- Modal kerja	1,803,592	1,848,852	1,962,136	2,137,919	2,081,520	2,199,868	2,299,214
	- Investasi	1,359,514	1,433,060	1,712,592	1,637,894	1,511,012	1,596,120	1,528,315
	- Konsumsi	1,598,024	1,822,461	2,010,746	2,101,586	2,179,030	2,322,274	2,430,651
2	Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi:	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,877,399	5,771,562	6,118,262	6,258,180
	- Pertanian	120,228	129,475	130,138	148,299	150,171	151,213	168,031
	- Pertambangan	43,474	42,258	51,099	59,329	46,681	53,657	29,922
	- Industri	847,348	811,029	1,058,739	1,024,812	909,123	893,615	844,595
	- Listrik, gas dan air	131	322	2,402	2,238	4,067	4,422	5,002
	- Konstruksi	543,896	573,415	630,556	579,345	548,264	589,123	585,052
	- Perdagangan	1,133,026	1,222,608	1,279,157	1,332,411	1,304,544	1,384,811	1,468,010
	- Pengangkutan	61,014	60,511	77,735	99,132	94,345	134,863	133,480
	- Jasa dunia usaha	338,443	353,305	366,738	450,586	473,365	517,172	525,683
	- Jasa sosial	69,322	80,537	71,855	74,795	58,011	63,490	63,520
	- Lainnya	1,604,248	1,830,913	2,017,055	2,106,452	2,182,991	2,325,896	2,434,885

Sumber : Bank Indonesia

Penyaluran kredit di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar digunakan untuk konsumsi, demikian pula dilihat dari segi tingkat pertumbuhan. Data ini dapat mencerminkan bahwa kegiatan dunia usaha yang dibiayai oleh perbankan masih belum

optimal. Sebagian besar DPK yang masuk ke dunia perbankan disalurkan kembali ke masyarakat untuk keperluan konsumsi. Salah satu sebab besarnya jumlah kredit untuk konsumsi ini adalah karena perbankan menilai penyaluran kredit untuk konsumsi relatif lebih aman dan feasible untuk dibiayai. Pada tw.III-2006, suku bunga kredit konsumsi (17,86%), sedangkan kredit modal kerja (16%) dan kredit investasi (15,81%).

Kredit yang disalurkan di luar konsumsi sebagian besar disalurkan ke sektor perdagangan, dimana kredit tersebut mendapatkan porsi terbesar dibandingkan dengan sektor ekonomi yang lain pada setiap triwulan. Demikian pula pada tw.III-2006, sektor perdagangan mendapatkan dana dari perbankan dalam bentuk kredit sebesar Rp.1,47 triliun atau 23,46% dari seluruh total kredit. Besarnya porsi kredit untuk sektor perdagangan ini dapat mencerminkan bahwa sektor perdagangan adalah sektor yang lebih berkembang dibanding dengan sektor yang lain.

Tabel 3.8
Perkembangan Kolektibilitas Kredit Bank Umum di Wilayah Kerja KBI

KETERANGAN	2005				2006		
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III
Total	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,877,399	5,771,562	6,118,262	6,258,180
- Lancar	4,267,390	4,288,212	4,615,820	4,844,373	4,650,364	4,957,027	4,978,457
- Dalam Perhatian Khusus	364,458	605,892	776,895	680,053	789,573	801,847	878,791
- Kurang Lancar	21,268	46,585	63,022	86,674	22,604	43,229	113,297
- Diragukan	54,412	33,562	79,628	23,721	52,004	40,739	30,406
- Macet	53,602	130,122	150,109	242,578	257,017	275,420	257,229
>> NPL (Nominal)	129,282	210,269	292,759	352,973	331,625	359,388	400,932
>> NPL (%)	2.72%	4.12%	5.15%	6.01%	5.75%	5.87%	6.41%

Sumber : Bank Indonesia

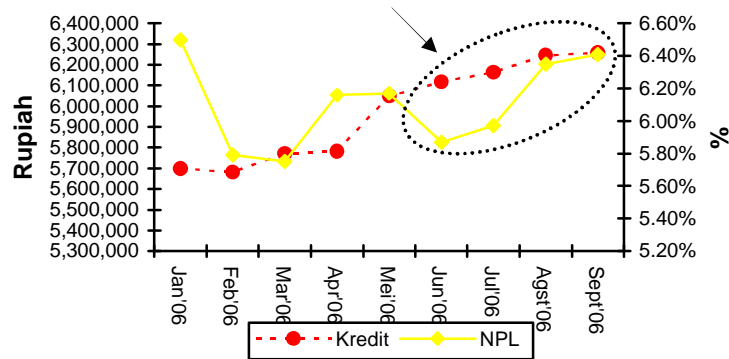
Adanya industri dan perusahaan-perusahaan asing yang melakukan produksi di Provinsi Kepulauan Riau menyerap tenaga kerja yang berasal dari luar daerah, dimana mobilisasi tenaga kerja dari luar daerah tersebut menciptakan pangsa pasar baru di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, adanya pangsa pasar baru tersebut menjadikan sektor perdagangan sebagai salah satu sektor yang paling berkembang di Provinsi Kepulauan Riau. Disamping itu, sektor-sektor lain yang juga mendapatkan pembiayaan cukup besar dari perbankan adalah sektor industri sebesar Rp.845 miliar (13,50%) dan sektor konstruksi sebesar Rp.589 miliar (9,35%).

NPL bank umum di Provinsi Kepulauan Riau pada tw.III-2006 meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jika pada tw.II-2006 NPL bank umum sebesar 5,87%, maka pada triwulan laporan NPL bank umum meningkat menjadi 6,41%. Secara nominal NPL bank umum meningkat sebesar Rp.41,54 miliar dibanding triwulan sebelumnya.

Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan NPL di bank umum adalah kinerja dunia usaha yang belum optimal. Kinerja dunia usaha di sektor riil tersebut perlu didorong untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi Kepulauan Riau. KBI Batam

telah melakukan upaya untuk mendorong kinerja dunia usaha dengan memberikan Bantuan Teknis (Bantek) kepada dunia usaha khususnya UMKM yang berada di wilayah kerja KBI Batam. Bantuan teknis yang dilakukan oleh KBI Batam tersebut dilaksanakan pada 20 Juni 2006.

Grafik 3.4
Perkembangan NPL dan Kredit Bank Umum



3.3.4 Perkembangan BPR

Total *asset* BPR yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam mengalami peningkatan. Sampai dengan tw.III-2006, total *asset* BPR mencapai Rp.371,27 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp.31,13 miliar (9,15%) dibanding tw.II-2006 yang tercatat sebesar Rp. 340,14 miliar.

Tabel 3.9
Perkembangan Kinerja BPR di Wilayah Kerja KBI Batam

(dalam jutaan rupiah)

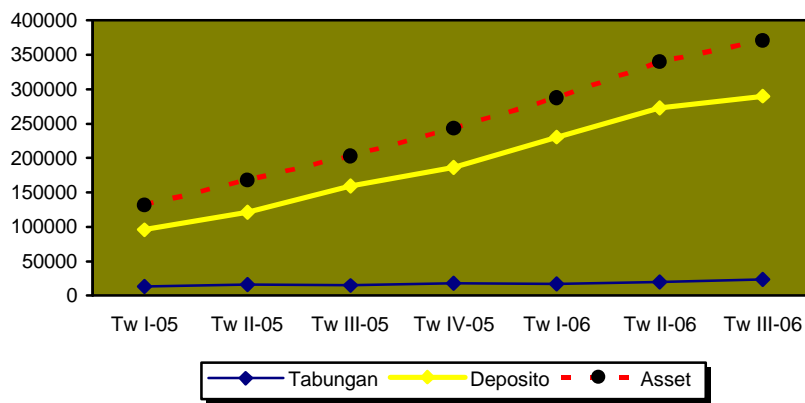
KETERANGAN	2005				2006		
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
1. TOTAL ASSET	131,648	167,946	203,213	243,143	287,447	340,141	371,274
2. TOTAL DANA	109,278	137,669	174,307	204,361	248,163	293,085	314,030
a. Tabungan	13,398	16,211	14,758	18,074	17,391	20,018	23,803
b. Deposito	95,880	121,458	159,548	186,287	230,772	273,067	290,227

Sumber: Bank Indonesia

Total dana yang berhasil dihimpun oleh BPR di wilayah kerja KBI Batam pada tw.III-2006 meningkat, dimana pada tw.II-2006 tercatat sebesar Rp.293,08 miliar, maka pada tw.III-2006 meningkat menjadi Rp.314,03 miliar, atau naik sebesar Rp.20,95 miliar (7,15%). Sebagian besar dana masyarakat yang dihimpun oleh BPR disimpan dalam bentuk deposito yaitu sebesar Rp.290,23 miliar atau 92,42% dari seluruh total DPK BPR. Sedangkan 7,58% sisanya disimpan dalam bentuk tabungan sebesar Rp.23,80 miliar. Hal ini merupakan kebalikan dari kondisi jenis simpanan masyarakat di Bank Umum. Perbedaan ini dipengaruhi

oleh tingkat suku bunga deposito BPR yang tinggi menjadi salah satu alasan kuat mengapa masyarakat lebih suka menyimpan dananya dalam bentuk deposito di BPR dibandingkan Bank Umum. Disamping itu, untuk kondisi di BPR, selisih suku bunga deposito dan suku bunga tabungan yang relatif cukup besar menyebabkan jumlah simpanan masyarakat dalam bentuk deposito daripada tabungan. Bunga deposito berjangka BPR rata-rata sebesar 6,5%, sementara suku bunga tabungan rata-rata 4%.

Grafik 3.5
Perkembangan Asset dan Dana Pihak Ketiga BPR di Wilker KBI Batam



Seperti halnya yang terjadi di bank umum, jumlah dana masyarakat yang dihimpun BPR di wilayah Provinsi Kepulauan Riau lebih besar dibandingkan jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk kredit. Baik dari segi jumlah maupun tingkat pertumbuhan, penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR masih lebih kecil jika dibandingkan dengan penghimpunan dana yang dilakukan oleh BPR.

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR kepada masyarakat meningkat jika dibandingkan dengan triwulan II-2006. Jumlah kredit yang diberikan pada tw.III-2006 sebesar Rp.196,54 miliar meningkat sebesar Rp.30,98 miliar (18,71%) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.165,56 miliar. Peningkatan penyaluran kredit oleh BPR juga dibarengi dengan peningkatan NPL. Jika pada tw.II-2006 NPL BPR di Provinsi Kepulauan Riau adalah 1,17% maka pada tw.III-2006, nilai tersebut naik menjadi 1,50%.

Tabel 3.10
Perkembangan Kolektibilitas Kredit BPR di Wilayah Kerja KBI Batam

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2005				2006		
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
Total Kredit	72,408	86,433	100,312	118,456	141,064	165,561	196,539
a. Lancar	72,320	85,805	99,919	117,796	139,800	163,620	193,584
b. Kurang Lancar	40	611	303	484	1,149	1,157	1,977
c. Di ragukan	16	8	28	-	45	385	624
d. Macet	32	9	62	176	70	399	354

Sumber: Bank Indonesia

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan konsumsi. Kredit untuk konsumsi yang disalurkan BPR di wilayah kerja KBI Batam pada tw.III-2006 sebesar Rp.119,52 miliar atau 60,81% dari seluruh total kredit yang diberikan oleh BPR. Sementara kredit untuk modal kerja yang diberikan BPR di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.56,47 miliar atau 28,73% dari seluruh total kredit yang diberikan oleh BPR. Sedangkan untuk kredit investasi sebesar Rp.20,5 miliar (10,45%). Besarnya kredit BPR untuk keperluan konsumsi mencerminkan intermediasi yang dilakukan BPR terhadap dunia usaha masih belum optimal. Seperti halnya bank umum, BPR masih lebih merasa aman memberikan kredit di sektor konsumsi.

Tabel 3.11
Perkembangan Kredit BPR Menurut Jenis Penggunaannya di Wilayah Kerja KBI Batam pada triwulan III-2006

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2005				2006		
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
Total Kredit	72,408	86,433	100,312	118,456	141,064	165,561	196,539
a. Investasi	14,178	15,454	15,373	16,584	17,830	20,073	20,541
b. Modal Kerja	10,911	18,071	26,863	34,643	41,294	50,126	56,473
c. Konsumsi	46,266	52,032	56,914	66,282	71,859	81,870	58,005
d. KPR	1,053	876	1,163	947	10,081	13,492	61,519*

Ket: *) termasuk kendaraan bermotor

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan data pada tabel 3.11, penyaluran kredit untuk investasi dan modal kerja mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, sedangkan untuk penyaluran kredit konsumsi mengalami penurunan. Sementara itu, pada tw.III-2006 penyaluran kredit KPR termasuk didalamnya jumlah pembiayaan kendaraan bermotor. Peningkatan kredit untuk KPR ini menunjukkan adanya pergeseran pembiayaan yang dilakukan oleh BPR, dimana banyaknya proyek dan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam menyebabkan permintaan kredit untuk KPR meningkat.

Pada tw.III-2006, kredit yang diberikan untuk sektor ekonomi di luar kepentingan konsumsi masih didominasi kredit untuk sektor perdagangan meskipun menurun jumlahnya menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu sebesar Rp.32,74 miliar atau 16,66% dari

total kredit untuk sektor ekonomi di luar konsumsi. Kemudian kredit untuk sektor jasa-jasa tercatat sebesar Rp.21,89 miliar atau 11,14% dari seluruh kredit yang diberikan untuk sektor ekonomi di luar konsumsi. Sedangkan sektor perindustrian dan pertanian masing-masing sejumlah Rp.938 juta (0,48%) dan Rp.410 juta (0,21%). Besarnya porsi kredit untuk sektor perdagangan menunjukkan industri ini masih merupakan sektor yang cukup berkembang di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam.

Tabel 3.12
Perkembangan Sektor Ekonomi yang Memperoleh Pembiayaan dari BPR di Wilayah Kerja KBI Batam pada Triwulan III-2006

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2005				2006		
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
SEKTOR EKONOMI	72,408	86,433	100,312	118,456	141,064	165,561	196,515
a. Pertanian	80	151	141	262	252	252	410
b. Perindustrian	11	208	164	185	633	584	938
c. Perdagangan	21,795	29,151	31,829	35,700	35,067	35,577	32,739
d. Jasa - Jasa	4,155	4,401	6,247	5,793	7,108	14,823	21,885
e. Lainnya	46,367	52,522	61,931	76,516	98,004	114,325	140,544

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan tabel 3.12, kredit yang diberikan kepada sektor ekonomi secara rata-rata mengalami peningkatan kecuali sektor perdagangan. Peningkatan paling tinggi pada tw.III-2006 dialami oleh kredit untuk sektor ekonomi pertanian yang meningkat 62,70% dari triwulan sebelumnya. Peningkatan penyaluran kredit juga terjadi di sektor perindustrian sebesar Rp.354 juta atau 60,62% dari triwulan sebelumnya. Sebaliknya sektor perdagangan justru mengalami penurunan kredit sebesar Rp.2,84 juta atau turun 7,98%.

3.3.5 Perkembangan Kredit UMKM

Dalam rangka mendorong upaya pengembangan UMKM, Bank Indonesia secara aktif mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan UMKM antara lain melalui pembentukan satgas KKMB. Selain itu, dalam upaya pemberdayaan UMKM, Bank Indonesia Batam menyelenggarakan beberapa kegiatan, seperti Bantuan Teknis UMKM dan Rapat Koordinasi UMKM. Disamping itu, Bank Indonesia Batam juga turut serta dalam upaya untuk mendukung kegiatan Bazaar Intermediasi UMKM.

Secara nasional, Bank Indonesia juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan sektor UMKM, diantaranya adalah pendirian lembaga riset perbankan daerah

(LRPD) dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan KKMB di bidang kelautan dan perikanan antara BI dengan Departemen Kelautan & Perikanan.¹⁸

BOKS VII

MENDORONG PENJAMINAN KREDIT, KECIL & MIKRO SERTA PENDIRIAN LEMBAGA RISET PERBANKAN DAERAH (LRPD)

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Maman H. Somantri menyaksikan penandatanganan kerjasama perjanjian penjaminan kredit antara Pemerintah Daerah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan PT. Askrindo, di Jakarta. Sebagai implementasi pilar-I Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu menciptakan struktur perbankan yang sehat, kerjasama ini sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK). “Program penjaminan ini diharapkan dapat meningkatkan akses kredit perbankan bagi UMK yang dinilai *feasible* namun karena berbagai keterbatasan dinilai tidak *bankable*”, demikian tambah Maman H. Somantri.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia bersama Universitas Hasanuddin – Makassar dan Universitas Andalas – Padang menandatangani MoU dalam rangka pendirian Lembaga Riset Perbankan Daerah (LRPD). Sebagai bentuk implementasi pilar-II API yaitu menciptakan sistem pengaturan yang efektif, kerjasama ini ditandatangani oleh Maman H. Somantri dengan Pembantu Rektor-II Universitas Andalas – Dr. Werry Dartta Taifur, SE, MA dan Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin – Dr. Dwia Aries Tina, MA.

Lembaga Riset Perbankan Daerah diharapkan memiliki beberapa karakter yang khas, yaitu : independen, kredibel dan proaktif dalam melakukan penelitian. Hal ini menjadi visi lembaga ini dan harus menjadi pedoman bagi semua yang terlibat dalam pendirian dan operasional lembaga tersebut. Riset yang dihasilkan diharapkan bersifat *demand driven* dan *up to date*, artinya penelitian tersebut adalah penelitian yang memang menjadi kebutuhan industri perbankan pada saat itu, yang hasilnya dapat diterapkan secara nyata.

Hingga saat ini, kerjasama dalam rangka penjaminan kredit telah dilakukan oleh 27 pemerintah Kabupaten/Kota di 11 propinsi. Sementara itu, kerjasama pembentukan LRPD oleh BI telah dilakukan dengan 4 universitas, yaitu: Universitas Brawijaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Andalas.

Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, saat ini belum terdapat wacana pembentukan LRPD serta kerjasama penjaminan kredit. Namun demikian, BI Batam tetap *concern* terhadap sektor UMKM. diharapkan pembentukan KKMB yang saat ini sedang dalam tahap pendirian dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap perkembangan sektor UMKM khususnya di Kepulauan Riau.

Dikutip dari <http://www.bi.go.id>

Untuk wilayah kerja KBI Batam, dilihat dari sisi pendanaan, penyaluran kredit UMKM oleh bank umum di Provinsi Kepulauan Riau pada tw.III-2006 tercatat sebesar Rp.3,45 triliun, dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

¹⁸ Uraian selengkapnya dapat dilihat di Boks VIII dan IX

BOKS VIII

BANK INDONESIA DAN DEPARTEMEN KELAUTAN & PERIKANAN BEKERJASAMA BERDAYAKAN KKMB DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Deputi Gubernur Bank Indonesia – Siti Ch. Fadrijah dan Direktur Jenderal Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan & Perikanan – Martani Husaini, menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka Pelatihan Konsultan Keuangan/Pendampingan UMKM Mitra Bank (KKMB) dan Penyusunan Buku Pola Pembiayaan Komoditi Unggulan Sektor Kelautan dan Perikanan, pada Rabu, 19 Juli 2006 di Jakarta. Perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama mengenai “Pengembangan KKMB di Sektor Kelautan dan Perikanan”, yang telah ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Kelautan & Perikanan pada tanggal 30 Januari 2006.

“Pemberdayaan KKMB didasari visi untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan kepada UMKM yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara UMKM dengan bank. Keberhasilan KKMB akan nampak dari beberapa indikator seperti meningkatnya jumlah UMKM yang *bankable* dan memperoleh kredit dari bank serta lancar pengembaliannya, meningkatnya kualitas dan produktifitas pelayanan KKMB dan tumbuhnya kemampuan KKMB untuk membiayai dirinya sendiri (swadana)”, demikian Siti Ch. Fadrijah dalam sambutannya.

Selama tahun 2005 sampai Mei 2006, Bank Indonesia telah memberikan pelatihan kepada 1.721 KKMB dan KKMB telah berhasil memfasilitasi pencairan kredit sebesar Rp.169,8 miliar kepada 3.734 UMKM. Selain pelatihan, dalam rangka bantuan teknis, Bank Indonesia menyediakan informasi yang dibutuhkan UMKM seperti menyusun pola pembiayaan (*lending model*) untuk komoditas unggulan yang hingga tahun 2005 telah mencakup 76 komoditi, termasuk 10 komoditi di sektor kelautan dan perikanan. Disamping itu, untuk mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah yang makin pesat beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia selama tahun 2006 akan menerbitkan buku pola pembiayaan dengan sistem syariah untuk 15 komoditi termasuk usaha budi daya pendederan dan pembesaran ikan gurami.

Untuk mengoptimalkan upaya yang dilakukan, peran serta aktif seluruh pihak yang peduli dengan pengembangan UMKM sangat diharapkan untuk menetapkan langkah terbaik dengan tetap menghargai otonomi masing-masing pihak. Selain itu, diperlukan keterpaduan antara *financial assistance* dengan *technical assistance* berupa program pendampingan dari instansi/dinas terkait atau penyediaan infrastruktur secara bersamaan (*full pledge service*).

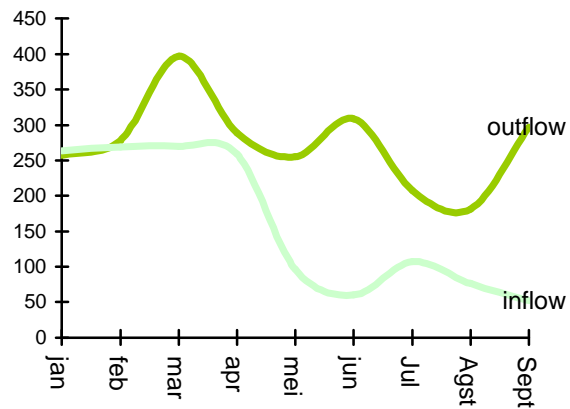
Dikutip dari <http://www.bi.go.id>

3.4 Perkembangan Sistem Pembayaran

3.4.1 Pengedaran Uang Kartal

Perkembangan aliran uang yang masuk (*inflow*) dan keluar (*outflow*) di wilayah kerja Bank Indonesia Batam secara nominal menunjukkan *outflow* yang lebih besar daripada *inflow*. Pada tw.III-2006, *outflow* mencapai Rp.686,06 miliar, sementara *inflow* mencapai Rp.235,33 miliar, sehingga terjadi *net outflow* sebesar Rp.420,73 miliar. Secara bulanan rata-rata *outflow* Rp.228,69 miliar, sedangkan rata-rata *inflow* Rp.78,44 miliar.

Grafik 3.7 Perkembangan Inflow/Outflow di KBI Batam (Rp. miliar)



Sumber : Bank Indonesia

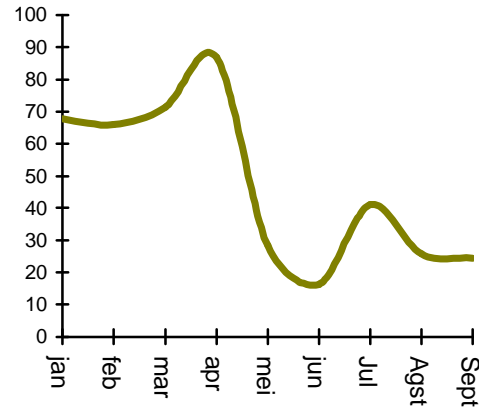
Selama tw.III-2006, uang kertas yang keluar dari KBI Batam sebanyak Rp.684,99 miliar dan uang logam sebanyak Rp.850,16 juta. Dibandingkan triwulan sebelumnya, baik uang kertas maupun uang logam yang keluar mengalami penurunan, masing-masing sebesar 19,73% dan 17,46%.

3.4.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Dalam upaya melaksanakan kebijakan uang bersih (*clean money policy*) Bank Indonesia senantiasa menyediakan uang rupiah dalam kondisi yang layak kepada masyarakat dengan melakukan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) yang dilakukan dengan cara memusnahkan uang yang tidak layak edar dan menggantinya dengan uang yang layak edar. Disamping itu, Bank Indonesia juga memberikan pelayanan kepada perbankan dan masyarakat untuk kegiatan setoran, penarikan dan penukaran untuk pecahan besar ke pecahan kecil serta untuk uang rupiah lusuh.

Pada tw.III-2006, jumlah PTTB pada uang yang tidak layak edar sebesar Rp.91,30 miliar, menurun sebesar 30,53% terhadap triwulan sebelumnya. Penurunan PTTB ini sejalan dengan penurunan jumlah *inflow* ke BI Batam yang menunjukkan bahwa jumlah uang lusuh di masyarakat yang masuk ke Bank Indonesia cenderung berkurang, yang disebabkan penurunan tingkat perputaran uang kartal di masyarakat.

Grafik 3.8 Perkembangan PTTB (Rp miliar)



3.5 Lalu Lintas Pembayaran Giral

3.5.1 Kliring Lokal

Untuk wilayah kerja KBI Batam, terdapat 3 (tiga) wilayah kliring lokal, yaitu: di KBI Batam untuk wilayah Kota Batam, PT. Bank Mandiri untuk wilayah Tanjung Pinang, dan PT. BNI untuk wilayah Tanjung Balai Karimun.

Nilai transaksi melalui sistem kliring lokal di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada tw.III-2006 mencapai Rp.2,58 miliar atau rata-rata mencapai Rp.646,15 miliar/bulan. Nilai total kliring tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya baik total warkat kliring maupun secara nominal, begitu pula secara rata-rata.

Tabel 3.13

Perkembangan Kliring Lokal di Wilayah Kerja KBI Batam (Rp. miliar)

Keterangan	2005				2006		
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III
Perputaran Kliring							
- Lembar	144.005	154.879	157.535	150.400	146.241	154.662	134.863
- Nominal (miliar Rp)	2.054.496	2.208.473	2.371.965	2.258.818	2.168.735	2.734.433	2.584.609
Rata-rata Harian Perputaran Kliring							
- Lembar	2.400	2.539	2.583	2.593	2.359	2.535	2.247
- Nominal (miliar Rp)	34.242	36.204	38.885	38.945	34.980	44.827	43.077
Penolakan Cek/BG Kosong							
- Lembar	860	987	981	1.122	860	1.012	856
- Nominal (miliar Rp)	23.780	22.388	21.049	22.034	29.418	19.924	14.506

Sumber : Bank Indonesia

Volume transaksi kliring di wilker BI Batam pada tw.III-2006 rata-rata mencapai 2.247 per-hari, menurun 11,36% dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2.535 warkat. Sementara untuk nominal transaksi kliring, terdapat penurunan sebesar 27,19% dibandingkan triwulan sebelumnya.

3.5.2 Transaksi BI-RTGS

Transaksi masyarakat melalui sarana Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Kantor Bank Indonesia Batam pada tw.III-2006 mengalami peningkatan pada transaksi masuk sedangkan untuk transaksi keluar terdapat peningkatan jika dibandingkan triwulan sebelumnya baik nominal maupun volume transaksi. Nominal transaksi RTGS untuk transaksi masuk sebesar Rp.4,246 triliun dengan jumlah transaksi sebanyak 6.135 transaksi, sementara untuk transaksi keluar sebesar Rp.4,187 triliun dengan jumlah transaksi sebanyak 6.866 transaksi.

Tabel 3.14
Perkembangan RTGS di wilker KBI Batam (Rp triliun)

Keterangan	2006			q-t-q	
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Nominal	%
Transaksi Masuk					
Nominal	3,362	4,025	4,246	221	5,49
Volume	4,903	6,053	6,135	82	1,35
Transaksi Keluar					
Nominal	3,845	5,515	4,187	-1,328	-24,08
Volume	5,773	7,385	6,866	-519	-7,03

Sumber : Bank Indonesia

3.5.3 Uang Palsu

Jumlah uang rupiah palsu yang dilaporkan ke Bank Indonesia Batam pada tw.III-2006 berjumlah Rp.490.000,00 dan mencapai 11 lembar. Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan nominal sebesar Rp.730.000,00 dengan jumlah lembar menurun sebanyak 17 lembar.

Berdasarkan jenis pecahan, uang kertas Rp.50.000,00 tahun emisi 1999 merupakan jenis uang terbanyak dipalsukan yang mencapai 3 lembar atau 27,27% dari total temuan uang palsu. Terkait dengan uang palsu yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia Batam terus melakukan berbagai upaya untuk menekan peredarannya, antara lain dengan melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada berbagai kalangan (perbankan, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum).

Bab 4

Keuangan Daerah Periode Tahun 2006

4.1 KONDISI UMUM

Jumlah anggaran yang ditetapkan oleh suatu Pemerintah Daerah menjadi salah satu faktor pendukung utama terhadap kemajuan dan perkembangan suatu daerah, demikian pula dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 (enam) Kota/Kabupaten, yaitu : Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD terdiri atas :

- a. Anggaran pendapatan, terdiri atas :
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - Bagian dana perimbangan, yang meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dana alokasi khusus, serta bagi hasil pajak dan bantuan keuangan Provinsi.
- b. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2006 terdapat peningkatan target penerimaan sebesar 70,99% yang disebabkan peningkatan target penerimaan pada beberapa pos, antara lain: pos pendapatan asli daerah, dan pos dana perimbangan. Sementara itu untuk pos retribusi daerah, pos lain-lain PAD yang sah, pos Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pos lain-lain pendapatan yang sah terjadi penurunan target penerimaan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Perbandingan Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri
Tahun 2005 dan 2006

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	RENCANA	RENCANA	PERUBAHAN	RENCANA
		PENERIMAAN 2005	PENERIMAAN 2006	2005 Thd 2006 (%)	PENERIMAAN 2007
1	PAD	178.831.000.000,00	235.536.000.000,00	31,71	274.262.900.000,00
	Pajak Daerah	172.421.000.000,00	229.116.000.000,00	32,88	267.486.300.000,00
	Retribusi Daerah	280.000.000,00	420.000.000,00	-9,53	462.000.000,00
	Lain-lain PAD yg sah	6.310.000.000,00	6.000.000.000,00	-100,00	6.314.600.000,00
2	DANA PERMBNGN	158.132.000.000,00	400.075.000.000,00	153,00	688.815.500.000,00
	Bagi Hasil Pajak	85.032.000.000,00	100.555.000.000,00	18,26	115.600.500.000,00
	Bagi Hasil Bkn Pajak	37.200.000.000,00	121.520.000.000,00	226,67	350.715.000.000,00
	DAU	25.900.000.000,00	178.000.000.000,00	587,26	222.500.000.000,00
	DAK	10.000.000.000,00	0	-100,00	0
3	LAIN2 PENDPTAN YG SAH	34.758.840.000,00	0	-100,00	0
	Dana Penyeimbang	34.758.840.000,00	0	-100,00	0
	JML PENDAPATAN DAERAH	371.721.840.000,00	635.611.000.000,00	70,99	963.078.400.000,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, jumlah penerimaan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tw.II-2006 sebesar Rp.296,29 atau sebesar 62,44% dari jumlah yang ditargetkan.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Provinsi Kepulauan Riau

(dalam miliar rupiah)

No	Jenis Penerimaan	2005	2006		
		Sem. I	Tw.I	Tw.II	Sem. I
I	PEMBIAYAAN	37.589,37	91.770,24	448,53	92.218,77
II	PENDAPATAN				
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.029,51	18.808,15	23.862,91	42.671,06
1	Pajak Daerah	16.602,37	12.827,94	15.335,24	28.163,18
2	Retribusi Daerah	9.818,01	4.639,40	5.247,78	9.887,18
3	Lain-lain PAD yang sah	2.126,06	1.340,81	3.279,90	4.620,71
4	Laba Perusahaan yang Sah	482,95	-	-	-
B	DANA PERIMBANGAN	105.610,98	45.719,23	115.682,66	161.401,89
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	40.009,4	6.100,06	19.386,93	25.486,99
2	Dana Alokasi Umum	2.686,08	2.028,55	58.994,97	61.023,52
3	Dana Alokasi Khusus	62.915,5	37.300,75	37.300,75	74.601,50
4	Bagi Hasil Pajak Provinsi	-	289,87	-	289,87
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	172.222,86	156.297,62	139.994,10	296.291,72

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah – Provinsi Kepulauan Riau

Target pendapatan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2006 sebesar Rp.635 miliar dan belanja daerah sebesar Rp.914 miliar. Oleh karena itu, terdapat defisit sebesar Rp.278 miliar. Untuk mengatasi defisit tersebut, Pemerintah Daerah akan melakukan pembiayaan melalui beberapa upaya, antara lain :

a. sisa anggaran tahun 2005	Rp.127.455.716.443,00
b. Over target pendapatan tahun 2005	Rp.151.358.425.330,00
c. Over target yang berasal dari :	
- selisih pendapatan APBD P	Rp. 17.575.412.499,00
- over target PAD	Rp. 32.852.667.003,00
- over target dana perimbangan	Rp.100.930.345.828,00

4.2 APBD KOTA BATAM

Target APBD Kota Batam tahun 2006 terdiri dari pos pendapatan sebesar Rp.474,50 miliar (APBD murni) atau sebesar Rp.623,06 miliar (APBD perubahan), dan pos pembiayaan sebesar Rp.63,74 miliar (APBD murni) atau sebesar Rp.93,83 miliar (APBD perubahan). Target APBD Kota Batam tahun 2006 meningkat dibandingkan tahun 2005, dimana pada tahun 2005 pos pendapatan Kota Batam sebesar Rp.356,10 miliar dan pos pembiayaan sebesar Rp.60,05 miliar.

Realisasi penerimaan pendapatan Kota Batam sampai dengan tw.III-2006 mencapai Rp.463,94 miliar atau mencapai 74,46% dari target pendapatan Kota Batam tahun 2006 yang telah ditetapkan. Penerimaan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.67,90 miliar dan Dana Perimbangan sebesar Rp.303,58 miliar.

Penerimaan daerah sampai dengan tw.III-2006, jika dilihat menurut jenisnya sebagian besar (65,43%) dari jenis dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak dan dana alokasi umum, sedangkan penerimaan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kontribusi sebesar 14,64% atau sebesar Rp.67,90 miliar.

Secara total, penerimaan Dispenda Kota Batam selama periode Januari-September 2006 meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan PAD mengalami peningkatan, yaitu pada periode Januari-September 2005 rata-rata perbulan PAD sebesar Rp.5,26 miliar, sedangkan pada periode Januari-September 2006 rata-rata perbulan sebesar Rp.7,54 miliar.

4.3 PENERIMAAN KANTOR PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kota Batam meningkat dari Rp.26,95 miliar (tw.I-2006) menjadi Rp.32,26 miliar (tw.II-2006) atau meningkat sebesar 19,70%. Dengan demikian selama Semester I (Januari – Juni 2006) penerimaan PKB dan BBN-KB di Kota Batam sebesar Rp.59,20 miliar, lebih tinggi dibandingkan penerimaan periode yang sama tahun 2005 atau naik sebesar 13,10%.

Dari struktur penerimaan menurut jenisnya selama periode Semester I-2006, sebesar 70,13% dalam bentuk PKB dan 29,87% dalam bentuk BBN-KB, atau dari Rp.15,44 miliar pada periode Semester I-2005 menjadi Rp.17,69 miliar pada periode Semester I-2006 atau naik sebesar 14,53%.

Tabel 4.3
Perkembangan Realisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB
Di Kota Batam (Juta Rp)

Periode	2005			2006		
	PKB	BBN-KB	Jml	PKB	BBN-KB	Jml
I. Tw.I	16.823,27	6.308,54	23.131,81	18.962,54	7.983,65	26.946,19
1. Januari	4.229,82	1.881,70	6.111,52	5.850,35	2.545,76	8.396,11
2. Februari	5.279,26	2.113,37	7.392,63	6.448,63	2.532,15	8.980,78
3. Maret	7.314,19	2.313,47	9.627,66	6.663,56	2.905,74	9.569,30
II. Tw.II	20.080,22	9.133,57	29.137,91	22.553,12	9.702,07	32.255,19
1. April	6.736,47	2.879,79	9.616,26	7.464,52	3.055,47	10.520,00
2. Mei	6.545,87	2.901,39	9.447,26	9.369,07	3.680,76	13.049,83
3. Juni	6.797,88	3.352,39	10.150,27	5.719,53	2.965,84	8.685,37
Semester I	36.903,49	15.442,11	52.345,60	41.515,66	17.685,72	59.201,38

Sumber : Kantor Pendapatan Daerah Provinsi Kepri

4.4 PENERIMAAN KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA BATAM

Pada tw.I-2006 (Januari-Maret), realisasi penerimaan pajak neto dalam bentuk PPh, PPN, dan PPn-BM serta pajak lainnya berjumlah Rp.210,75 miliar, sedangkan pada tw.II-2006 realisasi penerimaan sebesar Rp.180,79 miliar. Dengan demikian selama periode Januari-Juni 2006, realisasi penerimaan pajak neto telah mencapai Rp.391,54 miliar, lebih rendah dibandingkan periode Semester I-2005 yang tercatat sebesar Rp.600,10 miliar atau turun sebesar 34,75%.

Apabila dilihat dari struktur penerimaan pajak menurut jenisnya selama periode Semester I-2006, sebesar 90,96% dalam bentuk PPh meskipun menunjukkan peningkatan andil jenis pajak ini dibanding pada periode Semester I-2005 yang mencapai 86,59%. Penerimaan pajak dalam bentuk PPN dan PPn-BM kontribusinya juga menurun dari 11,98% (Semester I-2005) menjadi 8,59% (Semester I-2006). Dengan demikian, perlu terus ditindaklanjuti langkah-langkah positif yang telah diterapkan dalam upaya mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak di Kota Batam, dengan lebih mengedepankan transparansi dari objek pajak maupun aparat perpajakan.

Tabel 4.4
Realisasi Penerimaan Pajak Neto melalui KPP Batam
(Miliar Rp)

Periode	2005 *)				2006 *)			
	PPh	PPN & PPn-BM	Lain	Jml	PPh	PPN & PPn-BM	Lain	Jml
I, Triwulan I	264,91	38,13	4,08	307,12	199,24	11,00	0,51	210,75
a. Januari	63,14	14,00	1,14	78,28	49,80	5,47	0,10	55,37
b. Februari	54,65	11,58	,52	67,75	53,72	5,76	0,11	59,60
c. Maret	147,12	12,55	1,42	161,09	95,72	-0,24	0,30	95,78
II, Triwulan II	254,71	33,78	4,49	292,98	156,91	22,64	1,24	180,79
d. April	74,55	11,73	1,45	87,73	53,38	6,86	0,69	60,93
e. Mei	67,69	11,90	1,50	81,09	54,80	7,89	0,41	63,10
f. Juni	112,47	10,15	1,54	124,16	48,73	7,89	0,14	56,76
Semester I	519,62	71,91	8,57	600,10	356,15	33,64	1,75	391,54

Sumber : KPP Batam

Ket : *) Angka Perbaikan

Bab 5

Prospek Perekonomian Daerah

5.1 PROSPEK EKONOMI MAKRO

Berdasarkan uraian perkembangan indikator ekonomi dan perbankan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau periode tw.III-2006, terlihat bahwa kondisi perekonomian regional terus mengalami pertumbuhan meskipun persentasenya lebih kecil dibandingkan triwulan sebelumnya. Disamping itu, laju inflasi regional yang diwakili oleh Kota Batam juga mengalami peningkatan terhadap triwulan sebelumnya, demikian pula dengan perkembangan indikator perbankan meskipun secara triwulanan persentase pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sementara itu, wacana penerapan *Special Economic Zone (SEZ)* di wilayah Batam-Bintan-Karimun saat ini masih dalam proses pengembangan, dimana paying hukum pemberlakuan SEZ itu sendiri masih menjadi satu hal yang diharapkan agar segera ditetapkan oleh banyak pihak. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat terus melakukan promosi dan sosialisasi kepada pihak investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri terkait dengan penerapan SEZ tersebut. Hal ini merupakan satu hal yang sangat penting mengingat penetapan wilayah Batam-Bintan-Karimun sebagai daerah SEZ adalah *pilot project* bagi Pemerintah, dimana apabila SEZ tersebut berhasil dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia maka Pemerintah akan menerapkan sistem SEZ tersebut di beberapa daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan perkembangan sektor ekonomi di Provinsi Kepri, sektor industri masih menjadi sektor utama yang memberikan distribusi terbesar pada pembentukan PDRB Provinsi Kepri, dan diikuti oleh sektor pertambangan dan sektor perdagangan. Dari sisi penggunaan sektor PMTB dan sektor pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kepri.

Untuk triwulan mendatang, beberapa hal pendorong perekonomian daerah terkait dengan kebijakan pemerintah akan turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi makro. Disamping itu, upaya pemerintah daerah dan pusat untuk mempromosikan potensi-potensi yang terdapat di Kepulauan Riau dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Negara-negara tetangga yang sebelumnya belum mengetahui potensi yang terdapat di Kepri akan tertarik untuk berinvestasi di wilayah ini.

5.2 PROSPEK INFLASI

Laju pergerakan harga pada tw.III-2006 diperkirakan akan sedikit meningkat dan berada diatas laju inflasi nasional, meskipun masih lebih rendah dibandingkan laju inflasi Pekanbaru. Hal ini diperkirakan masih berupa dampak kenaikan BBM pada akhir tahun 2005 masih mempengaruhi daya beli masyarakat. Disamping itu, isu kenaikan tarif listrik dan air akan berpengaruh terhadap ekspektasi masyarakat terhadap laju inflasi kedepan.

5.3 PROSPEK PERBANKAN

Sejalan dengan prospek perekonomian daerah yang meningkat, peran sektor keuangan khususnya perbankan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada tw.III-2006 diperkirakan juga akan mengalami peningkatan pada indikator-indikator perbankan, baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran kredit. Hal ini dipengaruhi oleh prospek penurunan suku bunga yang didukung oleh pendapatan masyarakat yang meningkat.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau cenderung mengalami pertumbuhan penghimpunan dana yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi cukup besar yang terdapat pada sektor perbankan terhadap sisi pembiayaan, dimana dana masyarakat yang terhimpun tersebut akan menjadi modal perbankan untuk penyaluran kredit. Meskipun demikian, pihak perbankan mesti tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dengan meningkatnya kegiatan dunia usaha serta rencana pemerintah untuk membangun beberapa proyek infrastruktur di wilayah Kepri diperkirakan juga akan mendorong peningkatan fungsi intermediasi dan transaksi ekonomi dengan menggunakan pelayanan jasa pada sistem perbankan.

**TABEL 1. PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA 2005 - 2006 (JUTAAN RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2005				2006		
	Trw.I	Trw.II	Trw.III	Trw.IV	Trw.I	Trw.II	Trw.III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN	523,813.54	527,493.85	575,444.60	555,568.45	578,142.99	591,645.21	609,684.23
a. Tanaman Pangan & Hortikultura	32,750.83	27,927.78	28,187.01	19,611.67	34,619.11	34,619.11	32,028.31
b. Perkebunan	22,788.15	38,204.04	49,649.33	34,904.93	35,073.77	36,567.16	42,954.22
c. Peternakan	88,288.54	87,982.77	89,884.15	89,673.05	90,136.94	92,924.82	91,991.50
d. Kehutanan	7,308.13	8,324.88	8,077.57	7,493.95	7,648.92	7,898.51	7,538.28
e. Perikanan	372,677.90	365,054.38	399,646.54	403,884.85	410,664.25	419,635.61	435,171.92
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	865,919.07	962,131.50	1,092,582.76	1,156,387.99	1,181,518.99	1,212,007.33	1,232,552.32
a. Pertambangan	758,041.28	833,139.03	961,853.08	1,017,061.48	1,040,394.35	1,061,483.96	1,079,399.73
b. Pertambangan non migas	62,570.15	82,424.52	81,634.05	88,486.58	89,073.33	96,271.45	98,183.71
c. Penggalian	45,307.63	46,567.95	49,095.64	50,839.94	52,051.30	54,251.92	54,968.88
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5,649,754.42	5,906,613.08	6,054,262.36	6,279,602.23	6,438,488.32	6,656,379.13	6,878,155.81
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-	-
b. Industri Non migas	5,649,754.42	5,906,613.08	6,054,262.36	6,279,602.23	6,438,488.32	6,656,379.13	6,878,155.81
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	30,208.07	31,935.93	32,290.14	33,189.26	33,890.98	34,943.56	35,516.39
a. Listrik	24,272.32	24,909.15	25,105.54	25,885.32	26,406.54	27,356.37	27,897.13
b. Air Bersih	5,935.75	7,026.78	7,184.60	7,303.94	7,484.44	7,587.19	7,619.26
5. BANGUNAN	342,521.88	371,673.29	394,801.83	418,751.16	453,158.26	900,828.39	479,470.23
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	800,279.27	847,551.34	882,370.30	889,098.39	893,056.24	900,828.39	918,265.57
a. Perdagangan Besar dan Eceran	699,656.04	737,038.98	766,644.09	769,032.21	770,322.28	773,619.70	787,717.24
b. Hotel	62,613.58	69,368.18	73,676.35	75,634.81	77,132.90	79,995.21	82,556.91
c. Restoran	38,009.66	41,144.17	42,049.86	44,431.37	45,601.06	47,213.48	47,991.42
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	365,587.93	380,556.16	401,163.46	417,671.42	435,870.58	453,107.63	466,956.80
a. Angkutan	330,280.69	340,247.46	357,115.48	371,605.95	388,749.35	405,986.39	414,857.28
b. Komunikasi	35,307.23	40,308.70	44,047.98	46,065.47	47,121.24	47,121.24	52,099.52
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PRS	540,075.51	549,899.67	575,161.37	595,083.02	611,498.39	624,643.71	634,994.37
a. Bank	373,170.08	375,580.75	394,352.78	407,418.97	420,145.49	427,284.95	433,591.11
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & JPK	17,857.99	18,573.33	19,321.71	19,557.48	19,876.67	20,169.31	20,720.54
c. Jasa Penunjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Sewa Bangunan	145,245.50	151,782.99	157,380.09	163,768.06	166,953.80	172,478.14	175,887.07
e. Jasa Perusahaan	3,801.93	3,962.60	4,106.79	4,338.52	4,522.43	4,711.31	4,795.65
9. JASA - JASA	213,652.64	226,390.87	237,822.83	248,315.96	254,733.83	264,204.79	273,644.74
P D R B	9,331,812.34	9,804,245.68	10,245,899.66	10,593,667.88	10,880,358.58	11,209,941.06	11,529,240.46

Sumber : BPS Batam

**TABEL 2. PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
MENURUT LAPANGAN USAHA 2005 - 2006 (JUTAAN RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2005				2006		
	Trw.I	Trw.II	Trw.III	Trw.IV	Trw.I	Trw.II	Trw.III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. PERTANIAN	333,331.80	336,520.88	361,306.57	353,467.25	378,314.54	385,684.79	396,979.93
a. Tanaman Pangan & Hortikultura	23,509.21	20,625.21	20,475.96	13,915.94	23,019.89	22,915.49	21,515.25
b. Perkebunan	15,075.58	21,689.59	26,130.44	19,158.74	19,358.26	20,167.66	23,652.37
c. Peternakan	56,198.66	55,844.75	56,633.71	57,687.59	58,064.17	59,552.94	59,068.33
d. Kehutanan	4,429.06	5,185.53	4,960.32	5,253.01	5,716.29	5,781.47	5,389.84
e. Perikanan	257,628.50	253,801.01	273,582.11	271,367.91	272,155.92	277,267.23	287,354.14
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	513,779.96	514,874.68	530,515.95	523,590.30	524,705.03	532,542.17	539,292.08
a. Pertambangan	450,311.47	446,004.26	457,874.84	447,461.74	447,788.08	451,516.83	457,317.25
b. Pertambangan non migas	33,873.47	38,779.16	41,134.17	43,967.52	44,104.33	47,324.21	48,019.56
c. Penggalian	29,595.02	30,091.26	31,506.94	32,161.05	32,812.62	33,701.13	33,955.27
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	4,923,237.99	5,064,164.01	5,161,245.41	5,280,709.94	5,342,551.90	5,455,945.06	5,544,603.95
a. Industri Migas	-	-	-	-	-	-	-
b. Industri Non migas	4,923,237.99	5,064,164.01	5,161,245.41	5,280,709.94	5,342,551.90	5,455,945.06	5,544,603.95
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	16,971.43	17,454.17	17,652.93	18,197.85	18,288.26	18,778.90	18,842.41
a. Listrik	13,985.19	14,456.25	14,637.19	15,146.47	15,202.61	15,651.13	15,702.46
b. Air Bersih	2,986.24	2,997.92	3,015.74	3,051.39	3,085.65	3,127.77	3,139.95
5. BANGUNAN	187,767.28	190,907.00	199,906.19	204,073.75	209,025.45	216,832.84	219,971.04
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	611,923.30	619,780.77	631,136.96	628,386.04	630,612.82	635,410.85	646,844.24
a. Perdagangan Besar dan Eceran	529,084.70	532,659.12	541,581.72	538,321.77	539,529.91	541,607.16	550,985.27
b. Hotel	53,736.49	57,478.32	59,404.63	59,536.81	60,082.47	62,172.60	63,834.85
c. Restoran	29,102.10	29,643.34	30,150.61	30,527.45	31,000.44	31,631.09	32,024.12
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	265,422.85	273,572.82	287,039.59	298,041.42	305,931.92	311,807.20	317,240.12
a. Angkutan	234,315.04	241,672.91	253,811.82	263,291.96	270,710.30	275,467.08	280,383.61
b. Komunikasi	31,107.81	31,899.91	33,227.77	34,749.46	35,221.62	36,340.12	36,856.51
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PRS	329,789.12	326,188.13	334,297.46	345,351.12	351,905.08	358,225.02	363,784.40
a. Bank	222,594.37	217,021.56	222,917.33	231,118.32	237,159.82	240,681.13	243,971.54
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & JPK	11,712.35	11,838.68	12,039.12	12,307.18	12,422.04	12,963.23	13,303.12
c. Jasa Penunjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Sewa Bangunan	93,453.45	95,240.52	97,188.45	99,706.88	100,044.59	102,259.37	104,151.28
e. Jasa Perusahaan	2,028.96	2,087.36	2,152.56	2,218.75	2,278.63	2,321.29	2,358.46
9. JASA - JASA	144,507.06	146,278.11	147,375.25	149,507.54	150,675.71	153,661.46	157,044.13
P D R B	7,326,730.78	7,489,740.57	7,670,476.32	7,801,325.21	7,912,010.71	8,068,888.29	8,204,602.30

Sumber : BPS Batam

TABEL 3. PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Apr '06 s.d Sept '06 (Tahun 2002=100)

Kelompok	April 06		Mei 06		Juni 06		Juli 06		Agustus 06		Sept 06	
	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.	Indeks	% Perbh.
UMUM	126.85	-0.56	126.82	-0.02	127.06	0.19	128.60	1.21	128.69	0.07	129.98	1.00
I. BAHAN MAKANAN	123.08	-2.32	122.24	-0.68	123.27	0.84	127.35	3.31	124.29	-2.40	128.99	3.78
a. Padi-padian, umbi-umbian & hasil hasilnya	150.10	-4.55	150.54	0.29	154.06	2.34	153.98	-0.05	154.14	0.10	154.74	0.39
b. Daging dan hasil-hasilnya	105.53	-0.85	104.40	-1.07	104.69	0.28	113.58	8.49	110.72	-2.52	113.45	2.47
c. Ikan segar	124.22	-3.56	121.07	-2.54	124.82	3.10	132.02	5.77	127.81	-3.19	130.27	1.92
d. Ikan diawetkan	129.23	-0.10	129.22	-0.01	129.46	0.19	129.10	-0.28	128.75	-0.27	128.85	0.08
e. Telur, susu dan hasil-hasilnya	108.56	-1.41	109.70	1.05	110.44	0.67	111.04	0.54	111.97	0.84	111.88	-0.08
f. Sayuran	134.79	0.57	129.77	-3.72	127.07	-2.08	143.38	12.84	125.77	-12.28	162.60	29.28
g. Kacang-kacangan	117.13	0.02	116.70	-0.37	116.79	0.08	116.79	0.00	116.79	0.00	121.41	3.96
h. Buah-buahan	114.91	-0.80	114.48	-0.37	118.16	3.21	118.70	0.46	119.14	0.37	118.31	-0.70
i. Bumbu-bumbuan	121.77	-5.60	124.05	1.86	119.67	-3.52	119.33	-0.28	114.27	-4.24	115.77	1.31
j. Lemak dan minyak	114.24	0.07	113.76	-0.42	113.63	-0.11	113.35	-0.25	114.33	0.86	116.80	2.16
k. Bahan makanan lainnya	124.74	-0.07	125.31	0.46	125.31	0.00	128.72	2.72	128.72	0.00	129.13	0.32
II. MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	128.43	-0.05	128.67	0.19	128.81	0.11	130.86	1.59	132.16	0.99	132.56	0.30
a. Makanan jadi	129.14	0.02	129.47	0.26	129.49	0.02	129.49	0.00	129.49	0.00	129.51	0.02
b. Minuman yang tidak beralkohol	126.22	-0.32	126.66	0.35	127.46	0.63	127.83	0.29	130.55	2.13	132.18	1.25
c. Rokok, tembakau dan minuman beralkohol	128.50	0.00	128.50	0.00	128.51	0.01	134.09	4.34	136.49	1.79	136.84	0.26
III. PERUMAHAN	119.96	0.03	120.19	0.19	120.21	0.02	120.36	0.12	120.36	0.00	120.37	0.01
a. Biaya tempat tinggal	111.39	0.03	111.73	0.31	111.73	0.00	111.73	0.00	111.84	0.10	111.84	0.00
b. Bahan bakar, penerangan dan air	148.77	0.00	148.77	0.00	148.77	0.00	148.77	0.00	148.37	-0.27	148.37	0.00
c. Perlengkapan rumah tangga	108.10	0.31	108.45	0.32	108.59	0.13	108.59	0.00	108.88	0.27	108.94	0.06
d. Penyelenggara rumah tangga	108.62	0.13	108.64	0.02	108.74	0.09	110.35	1.48	110.46	0.10	110.51	0.05
IV. SANDANG	112.84	0.88	113.78	0.83	112.23	1.36	112.95	0.64	113.06	0.10	120.37	0.01
a. Sandang laki-laki dewasa	102.96	0.00	102.96	0.00	103.09	0.13	103.09	0.00	103.18	0.09	111.84	0.00
b. Sandang wanita dewasa	100.68	0.01	100.68	0.00	100.90	0.22	100.90	0.00	101.34	0.44	148.37	0.00
c. Sandang anak-anak	103.23	0.04	103.23	0.00	103.27	0.04	103.27	0.00	103.20	-0.07	108.94	0.06
d. Sandang pribadi dan sandang lainnya	175.30	3.92	181.71	3.66	170.29	-6.28	175.23	2.90	174.86	-0.21	110.51	0.05
V. KESEHATAN	107.87	0.12	107.87	0.00	108.22	0.32	108.24	0.02	108.30	0.06	108.30	0.00
a. Jasa kesehatan	111.03	0.00	111.03	0.00	111.03	0.00	111.03	0.00	111.03	0.00	111.03	0.00
b. Obat-obatan	112.95	0.01	112.95	0.00	112.95	0.00	112.95	0.00	112.95	0.00	112.95	0.00
c. Jasa Perawatan Jasmani	111.97	0.00	111.97	0.00	111.97	0.00	111.97	0.00	111.97	0.00	111.97	0.00
d. Perawatan Jasmani dan Kosmetika	105.12	0.20	105.12	0.00	105.73	0.58	105.75	0.02	105.85	0.09	105.85	0.58
VI. PENDIDIKAN, REKREASI & OLAH RAGA	120.79	0.07	121.31	0.43	121.14	-0.14	121.14	0.00	138.85	14.62	139.01	0.12
a. Jasa Pendidikan	137.22	0.00	137.22	0.00	137.22	0.00	137.22	0.00	178.42	30.02	178.78	0.20
b. Kursus-kursus/Pelatihan	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00
c. Perlengkapan/Peralatan Pendidikan	107.18	0.00	107.09	-0.08	107.09	0.00	107.09	0.00	107.09	0.00	107.09	0.00
d. Rekreasi	110.42	0.25	111.98	1.41	111.47	-0.46	111.47	0.00	111.47	0.00	111.47	0.00
e. Olahraga	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
VII. TRANSPOR & KOMUNIKASI	154.60	0.00	154.79	0.12	154.78	-0.01	154.78	0.00	155.20	0.27	155.20	0.01
a. Transpor	177.12	0.00	177.26	0.08	177.26	0.00	177.26	0.00	177.82	0.32	177.82	0.00
b. Komunikasi dan pengiriman	115.92	0.00	115.92	0.00	115.92	0.00	115.92	0.00	115.92	0.00	115.92	0.00
c. Sarana dan penunjang transpor	103.06	0.04	105.07	1.95	105.07	0.00	105.07	0.00	105.07	0.00	105.07	0.00
d. Jasa Keuangan	170.78	0.00	170.78	0.00	170.78	0.00	170.78	0.00	173.68	1.70	173.68	0.00

Sumber : BPS Batam

TABEL 4. PERKEMBANGAN INFLASI KOTA BATAM, PEKANBARU DAN NASIONAL

Kota	Q.III/03	Q.IV/03	JAN/04	Q II/04	Q III/04	Q IV/04	Q I/05	Q II/05	Q III/05	Q IV/05	Q I/06	Q II/06	Q III/06
1. Batam	0.75	2.35	0.03	1.10	0.70	1.89	2.65	0.39	1.52	14.79	0.66	-0.39	1.34
2. Pekanbaru	1.61	2.76	0.89	3.45	1.30	2.71	2.75	0.14	2.91	17.1	0.73	0.90	1.98
3. Nasional	1.24	2.50	0.57	2.35	0.49	2.46	3.19	1.05	2.03	17.11	1.98	0.89	1.16

Sumber : BPS Batam

**TABEL 5. DATA BANK UMUM
WILAYAH KERJA BANK INDONESIA BATAM**

Dim. Juta Rp.

KETERANGAN	Periode						
	Mar-05	Jun-05	Sep-05	Dec-05	Mar-06	Jun-06	Sep-06
TOTAL ASSET	9,316,232	9,715,095	10,213,912	10,666,450	10,559,530	12,173,496	13,115,164
DANA PIHAK III	7,806,495	8,120,960	8,373,778	8,707,149	8,552,495	10,250,252	11,134,372
a. Giro	3,106,069	3,183,277	3,262,739	3,524,558	3,429,726	4,435,878	4,988,060
b. Deposito	1,616,147	1,805,531	2,070,995	2,169,291	2,302,858	3,089,243	2,934,752
c. Tabungan	3,084,279	3,132,152	3,040,044	3,013,300	2,819,911	2,725,131	3,211,560
KREDIT							
a. Jenis Penggunaan	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,877,399	5,771,562	6,118,262	6,258,180
- Modal Kerja	1,803,592	1,848,852	1,962,136	2,137,919	2,081,520	2,199,868	2,299,214
- Investasi	1,359,514	1,433,060	1,712,592	1,637,894	1,511,012	1,596,120	1,528,315
- Konsumsi	1,598,024	1,822,461	2,010,746	2,101,586	2,179,030	2,322,274	2,430,651
b. Golongan Kredit	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,877,399	5,771,562	6,118,262	6,258,180
- KUK	794,299	787,396	757,976	725,638	733,613	745,690	660,367
- Non KUK	3,966,831	4,316,977	4,927,498	5,151,761	5,037,949	5,372,572	5,597,813
b. Jenis Kredit	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,877,399	5,771,562	6,118,262	6,258,180
- UMKM	2,623,049	2,828,126	3,016,067	3,107,943	3,157,413	3,311,625	3,447,910
- Non UMKM	2,138,081	2,276,247	2,669,407	2,769,456	2,614,149	2,806,637	2,810,270
c. Kolektibilitas	4,761,130	5,104,373	5,685,474	5,877,399	5,771,562	6,118,262	6,258,180
- Lancar	4,267,390	4,288,212	4,615,820	4,844,373	4,650,364	4,957,027	4,978,457
- D.P.Khusus	364,458	605,892	776,895	680,053	789,573	801,847	878,791
- Kurang Lancar	21,268	46,585	63,022	86,674	22,604	43,229	113,297
- Diragukan	54,412	33,562	79,628	23,721	52,004	40,739	30,406
- Macet	53,602	130,122	150,109	242,578	257,017	275,420	257,229
RATIO							
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	60.99%	62.85%	67.90%	67.50%	67.48%	59.69%	56.21%
b. Non Performing Loans (NPL)	2.72%	4.12%	5.15%	6.01%	5.75%	5.87%	6.41%
c. Penyaluran KUK	16.68%	15.43%	13.33%	12.35%	12.71%	12.19%	10.55%
b. Penyaluran UMKM	55.09%	55.41%	53.05%	52.88%	54.71%	54.13%	55.09%

Sumber : Bank Indonesia Batam

TABEL 6. DATA BANK UMUM
WILAYAH KEPULAUAN RIAU *)

Dlm. Juta Rp.

KETERANGAN	Periode						
	Mar-05	Jun-05	Sep-05	Des-05	Mar-2006	Jun-06	Sep-06
TOTAL ASSET	2,238,450	2,113,432	2,191,751	2,478,341	2,398,828	3,042,097	3,693,744
DANA PIHAK III	2,206,829	2,071,113	2,149,477	2,437,201	2,373,852	3,052,762	3,527,586
a. Giro	735,859	714,414	769,934	935,856	925,238	1,444,613	1,799,219
b. Deposito	395,319	374,358	411,866	459,923	544,678	989,615	649,991
c. Tabungan	1,075,651	982,341	967,677	1,041,422	903,936	618,534	1,078,376
KREDIT							
a. Jenis Penggunaan	639,497	639,267	697,352	739,121	1,942,175	815,656	991,558
- Modal Kerja	334,687	285,325	300,031	325,025	306,969	323,429	342,744
- Investasi	120,945	118,910	148,491	149,391	1,355,768	167,130	181,457
- Konsumsi	183,865	235,032	248,830	264,705	279,438	325,097	467,357
b. Golongan Kredit	639,497	639,267	697,352	739,121	741,651	815,656	991,558
- KUK	165,365	165,373	160,911	165,491	156,478	164,503	219,646
- Non KUK	474,132	473,894	536,441	573,630	585,173	651,153	771,912
b. Jenis Kredit	639,497	639,267	697,352	739,121	741,651	815,656	991,558
- UMKM	457,185	440,462	476,980	514,989	508,797	543,262	2,183,879
- Non UMKM	182,312	198,805	220,372	224,132	232,854	272,394	(1,192,321)
c. Kolektibilitas	639,497	639,267	697,352	739,121	887,192	815,656	991,558
- Lancar	607,656	548,440	586,079	613,762	595,463	675,715	801,294
- D.P Khusus	20,119	78,174	34,149	37,822	53,146	26,564	72,340
- Kurang Lancar	1,646	1,712	11,706	413	19,663	13,959	86,919
- Diragukan	4,408	1,334	54,760	11,768	41,865	14,464	3,883
- Macet	5,668	9,607	10,658	75,356	177,055	84,954	27,122
RATIO							
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	28.98%	30.87%	32.44%	30.33%	81.82%	26.72%	28.11%
b. Non Performing Loan (NPLs)	1.83%	1.98%	11.06%	11.84%	26.89%	13.90%	11.89%
c. Penyaluran KUK	25.86%	25.87%	23.07%	22.39%	21.10%	20.17%	22.15%
d. Penyaluran UMKM	71.49%	68.90%	68.40%	69.68%	68.60%	66.60%	220.25%

Sumber : Bank Indonesia Batam

*) meliputi Tj. Pinang, Tj. Balai Karimun, Natuna

**TABEL 7. DATA BANK UMUM
WILAYAH KOTA BATAM**

dlm.juta Rp

KETERANGAN	Periode						
	Mar.2005	Jun.2005	Sep.2005	Des-05	Mar.2006	Jun 2006	Sep-06
TOTAL ASSET	7,077,782	7,601,663	8,022,161	#####	8,160,702	9,131,399	9,421,420
DANA PIHAK III	5,599,666	6,049,847	6,224,301	#####	6,178,643	7,197,490	7,606,786
a. Giro	2,370,210	2,468,863	2,492,805	2,588,702	2,504,488	2,991,265	3,188,841
b. Deposito	1,220,828	1,431,173	1,659,129	1,709,368	1,758,180	2,099,628	2,284,761
c. Tabungan	2,008,628	2,149,811	2,072,367	1,971,878	1,915,975	2,106,597	2,133,184
KREDIT							
a. Jenis Penggunaan	4,121,633	4,465,106	4,988,122	#####	5,029,911	5,302,606	5,266,622
- Modal Kerja	1,468,905	1,563,527	1,662,105	1,812,894	1,774,551	1,876,439	1,956,470
- Investasi	1,238,569	1,314,150	1,564,101	1,488,503	1,355,768	1,428,990	1,346,858
- Konsumsi	1,414,159	1,587,429	1,761,916	1,836,881	1,899,592	1,997,177	1,963,294
b. Golongan Kredit	4,121,633	4,465,106	4,988,122	#####	5,029,911	5,302,606	5,266,622
- KUK	628,934	622,023	597,065	560,147	577,135	581,187	440,721
- Non KUK	3,492,699	3,843,083	4,391,057	4,578,131	4,452,776	4,721,419	4,825,901
b. Jenis Kredit	4,121,633	4,465,106	4,988,122	#####	5,029,911	5,302,606	5,266,622
- UMKM	2,165,864	2,387,664	2,539,087	2,592,954	2,648,616	2,768,363	1,264,031
- Non UMKM	1,955,769	2,077,442	2,449,035	2,545,324	2,381,295	2,534,243	4,002,591
c. Kolektibilitas	4,121,633	4,465,106	4,988,122	#####	5,029,911	5,302,606	5,266,622
- Lancar	3,659,734	3,739,772	4,029,741	4,230,611	4,054,901	4,281,312	4,177,163
- D.P. Khusus	344,339	527,718	742,746	642,231	736,427	775,283	806,451
- Kurang Lancar	19,622	44,873	51,316	86,261	19,663	29,270	26,378
- Diragukan	50,004	32,228	24,868	11,953	41,865	26,275	26,523
- Macet	47,934	120,515	139,451	167,222	177,055	190,466	230,107
RATIO							
a. Loan to Dept Ratio (LDR)	73.60%	73.81%	80.14%	81.95%	81.41%	73.67%	69.24%
b. Non Performing Loan (NPL)	2.85%	4.43%	4.32%	5.17%	4.74%	4.64%	5.37%
c. Penyaluran KUK	15.26%	13.93%	11.97%	10.90%	11.47%	10.96%	8.37%
d. Penyaluran UMKM	52.55%	53.47%	50.90%	50.46%	52.66%	52.21%	24.00%

Sumber : Bank Indonesia Batam
Kepri (Tj.Pinang, Tj.Uban, Karimun dan Natuna)

**TABEL 8. DATA PENGALIRAN KAS MASUK / KELUAR
DAN KEGIATAN PTTB KBI BATAM**

No	Nama Bulan	Pengaliran Masuk (Jutaan Rp)	Pengaliran Keluar (Jutaan Rp)	Pemberian Tanda Tidak Berharga (Jutaan Rp)
1	Tahun 2000	462,953.66	2,635,234.81	398,055.62
2	Tahun 2001	629,831.60	2,987,016.25	239,678.80
3	Tahun 2002	1,033,638.93	2,549,992.51	452,865.93
4	Tahun 2003	1,495,116.25	2,484,657.11	788,860.84
5	Trw. I 2004	482,275.13	581,277.17	260,294.19
	April 2004	152,857.99	288,966.46	111,347.04
	Mei 2004	137,012.24	242,827.66	78,855.53
	Juni 2004	121,594.16	359,354.24	121,919.03
	Trw. II 2004	411,464.39	891,148.36	312,121.60
	Juli 2004	180,275.04	259,625.84	169,516.95
	Agustus 2004	160,469.24	277,640.31	152,555.05
	September	142,558.76	299,878.74	91,383.82
	Trw. III 2004	483,303.04	837,144.89	413,455.82
	Oktober 2004	134,354.00	387,480.00	84,342.00
	Nopember 2004	207,334.00	548,980.00	55,606.00
	Desember 2004	198,076.19	403,276.86	168,836.92
	Trw. IV 2004	539,764.19	1,339,736.86	308,784.92
5	Tahun 2004	1,916,806.75	3,649,307.28	1,294,656.53
	Januari 2005	205,005.66	250,477.47	134,589.81
	Februari 2005	210,216.68	355,120.71	132,907.53
	Maret 2005	225,008.47	321,391.88	141,725.89
	Trw. I 2005	640,230.81	926,990.06	409,223.23
	April 2005	184,344.20	350,837.86	96,965.36
	Mei 2005	193,099.56	296,952.62	80,157.14
	Juni 2005	167,293.98	351,735.51	75,162.38
	Trw. II 2005	544,737.73	999,525.99	252,284.87
	Juli 2005	187,939.07	315,171.45	68,621.75
	Agustus 2005	151,851.55	311,778.20	34,082.81
	Sept 2005	159,589.62	386,899.07	30,538.20
	Trw. III 2005	499,380.25	1,013,848.73	133,242.75
6	Januari 2006	264,207.72	257,567.63	67,711.87
	Februari 2006	269,475.86	278,910.89	65,945.72
	Maret 2006	270,355.37	397,274.49	71,261.43
	Trw. I 2006	804,038.95	933,753.01	204,919.02
7	April 2006	259,239.21	289,319.31	86,798.58
	Mei 2006	96,796.99	255,199.80	28,321.03
	Juni 2006	60,424.38	309,874.21	16,302.79
	Trw. II 2006	416,460.58	854,393.15	131,422.41
8	Juli 2006	107,594.32	208,750.69	41,043.63
	Agustus 2006	75,633.01	180,680.87	25,709.93
	September 2006	52,102.99	296,627.42	24,550.11
	Trw. III 2006	235,330.32	686,058.98	91,303.67

Sumber : Bank Indonesia Batam

TABEL 9. PERPUTARAN KLIRING BATAM, TANJUNG PINANG DAN TANJUNG BALAI KARIMUN

JENIS	Trw.I/2005		Trw.II/2005		Trw.III/2005		Trw.I/2006		Trw.II/2006		Trw.III/2006	
	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari	Total	Rata-Rata Perhari
A. WARKAT KLIRING												
1. WARKAT (Lbr)	144,005	2,400	154,879	2,539	157,535	2,583	146,241	2,359	154,662	2,535	134,863	2,141
2. NOMINAL (Jt.Rp)	2,054,496	34,242	2,208,473	36,204	2,371,965	38,885	2,168,735	34,980	2,734,433	44,827	2,584,609	41,026
B. TOLAKAN KLIRING												
1. CEK KOSONG												
- Lembar	360	6	369	6	321	5	323	5	327	5	339	5
- Nominal (Jt.Rp)	11,296	188	8,456	139	7,845	129	18,482	298	6,654	109	7,384	117
2. BG. KOSONG												
- Lembar	500	8	618	10	660	11	537	9	685	11	517	8
- Nominal (Jt.Rp)	12,504	208	13,932	228	13,204	216	10,936	176	13,270	218	7,122	113
3. ALASAN LAIN												
- Lembar	570	10	637	10	653	11	528	9	491	8	568	9
- Nominal (Jt.Rp)	8,135	136	11,148	183	11,196	184	9,567	154	7,802	128	6,889	109
4. TOTAL TOLAKAN												
- Lembar	1,430	24	1,624	27	1,634	27	1,388	22	1,503	25	1,424	23
- Nominal (Jt.Rp)	31,914	532	33,536	550	32,245	529	38,985	629	27,725	455	21,826	346

Sumber : Bank Indonesia Batam